Volume 5 No. 2, Desember 2015

ISSN: 2089-6980

JURNAL
KEBIJAKAN SOSIAL EKONOMI
KELAUTAN DAN PERIKANAN

J. Kebijakan Sosial Ekonomi KP	Vol. 5	No. 2	Hal. 71 - 146	Jakarta Desember 2015	ISSN 2089-6980

Diterbitkan bersama :

Balai Besar Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Jaringan Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

ISSN 2089-6980

JURNAL KEBIJAKAN SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN

Volume 5 Nomor 2, Desember 2015

Penanggung Jawab :
Kepala Balai Besar Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Dewan Redaksi :

Ketua:
Prof. Dr. Zahri Nasution (*Sosiologi Perikanan*)

Anggota:
Dr. Agus Heri Purnomo (Ekonomi Sumberdya)
Dr. Anthon Effani (*Ekonomi*)
Dr. Andy Ahmad Zailany (*Antropologi*)
Drs. Masyhuri Imron, MA (*Sosiologi*)

Mitra Bestari :
Dr. Fatuchri Sukadi *(Analisis Kebijakan Perikanan)*
Dr. Andin H. Taryoto *(Sosiologi Pedesaan)*
Dr. Luky Adrianto *(Ekonomi Ekologi)*
Dr. Rilus A. Kinseng *(Sosiologi)*
Dr. Dedi S Adhuri *(Antropologi)*

Redaksi Pelaksana :
Catur Pramono Adi, M. Si
Subhechanis Saptanto, M. Se
Tikkyrino Kurniawan, M.Si
Hikmah, M.Si
Heny Lestari, SE
Asep Jajang Setiadi, S.Pi

Desain dan Tata Letak :
Ilham Ferbiansyah

Alamat Redaksi :
Balai Besar Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan
Gedung Balitbang KP LT. 3
Jalan Pasir Putih Nomor 1 Ancol Timur, Jakarta Utara
Telp. (021) 6471 1583, Faks.(021) 64700924
Email: pt.sosek@gmail.com

Jurnal ini merupakan perubahan dari Jurnal Kebijakan dan Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan dengan mengalami perubahan cover dan judul

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkat RahmatNya telah diselesaikan Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Volume 5 Nomor 2 Tahun 2015. Jurnal ini merupakan pengembangan dari Jurnal Kebijakan dan Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan yang telah terakreditasi berdasarkan keputusan Kepala LIPI No. 482/D/2011 tanggal 12 April 2011; secara spesifik memuat kebijakan sosial ekonomi kelautan dan perikanan.

Penerbitan jurnal ini didanai oleh Balai Besar Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan. Informasi yang ditampilkan meliputi: (i) Dampak Kebijakan Moratorium Kapal Eks Asing Terhadap Kondisi Perikanan Tuna: Studi Kasus di Dki Jakarta; (ii) Valuasi Ekonomi Sumberdaya di Teluk Palu, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah; (iii) Peningkatan Kapasitas Fasilitas Fungsional Melalui Program Minapolitan di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pekalongan, Jawa Tengah; (iv) Efektivitas Pemberlakuan Kebijakan Moratorium Kapal Eks Asing dan Transhipment Terhadap Kinerja Usaha Penangkapan Ikan; (v) Strategi Adaptasi Nelayan Terhadap Penetapan Kawasan Konservasi Perairan Daerah di Misool Selatan, KKPD Raja Ampat; (vi) Potensi Ekspor Nener Bandeng Indonesia: Peluang dan Tantangan; (vii) Analisis Dampak Moratorium Kapal Ex-Asing Terhadap Kondisi Pasar Tuna Indonesia.

Dengan diterbitkannya jurnal ini, diharapkan dapat memberikan informasi yang ada kepada masyarakat dan menambah wawasan ilmu pengetahuan di bidang perikanan dan kelautan. Saran dan masukan dari pembaca sangat diharapkan guna kesempurnaan penerbitan jurnal ini dimasa mendatang.

Redaksi

ISSN 2089-6980

JURNAL KEBIJAKAN SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN

Volume 5 Nomor 2, Tahun 2015

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAMPAK KEBIJAKAN MORATORIUM KAPAL EKS ASING TERHADAP KONDISI PERIKANAN TUNA: STUDI KASUS DI DKI JAKARTA

Oleh : Freshty Yulia Arthatiani dan Tenny Apriliani ..... 71 - 82

VALUASI EKONOMI SUMBERDAYA DI TELUK PALU, KOTA PALU, PROVINSI SULAWESI TENGAH

Oleh : Fachruddin Hari Anggara Putera dan Alfiani Eliata Sallata ..... 83 - 87

PENINGKATAN KAPASITAS FASILITAS FUNGSIONAL MELALUI PROGRAM MINAPOLITAN DI PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA (PPN) PEKALONGAN, JAWA TENGAH

Oleh : Reza Kukuh Febrianto, Abdul Kohar Mudzakir dan Abdul Rosyid ..... 89 - 100

EFEKTIVITAS PEMBERLAKUAN KEBIJAKAN MORATORIUM KAPAL EKS ASING DAN TRANSHIPMENT TERHADAP KINERJA USAHA PENANGKAPAN IKAN

Oleh : Yayan Hikmayani, Rikrik Rahadian, Nurlailii dan Rizky Muhartono ..... 101 - 112

STRATEGI ADAPTASI NELAYAN TERHADAP PENETAPAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN DAERAH DI MISOOL SELATAN, KKPD RAJA AMPAT

Oleh : Rici Tri Harpin Pranata dan Arif Satria ..... 113 - 128

POTENSI EKSPOR NENER BANDENG INDONESIA: PELUANG DAN TANTANGAN

Oleh : Achmad Zamroni, Irwan Mulyawan dan Fatriyandi Nur Priyatna ..... 129 - 136

ANALISIS DAMPAK MORATORIUM KAPAL EX-ASING TERHADAP KONDISI PASAR TUNA INDONESIA

Oleh : Subhechanis Saptanto, Risna Yusuf, Tenny Apriliani dan Freshty Yulia Arthatiani ..... 137 - 146

INDEKS ABSTRAK JURNAL KEBIJAKAN SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN
(ABSTRACT INDEX OF JOURNAL POLICY SOCIO-ECONOMICS MARINE AND FISHERIES)

ISSN 2089-6980 **Vol. 5 No. 2, 2015**

Kata kunci bersumber dari artikel. Lembar abstrak ini boleh diperbanyak tanpa izin dan biaya

UDC 639.22 (094.7)

DAMPAK KEBIJAKAN MORATORIUM KAPAL EKS ASING TERHADAP KONDISI PERIKANAN TUNA: STUDI KASUS DI DKI JAKARTA

Freshty Yulia Arthatiani dan Tenny Apriliani

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan informasi dan mendeskripsikan dampak kebijakan moratorium kapal eks asing yang tercantum dalam Permen KP Nomor 56 Tahun 2014 tentang Penghentian Sementara (Moratorium) Perizinan Usaha Perikanan Tangkap Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia terhadap kondisi perikanan tuna terutama di wilayah DKI Jakarta sebagai salah satu daerah ekspor tuna. Penelitian dilakukan dengan pendekatan retrospektif dimana analisis kebijakan dilakukan terhadap akibat-akibat kebijakan setelah suatu kebijakan diimplementasikan dan biasanya disebut sebagai model analisis evaluatif sehingga diharapkan dapat menghasilkan informasi yang dapat meningkatkan kualitas dari kebijakan yang diterapkan pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DKI Jakarta sebagai salah satu daerah ekspor utama tuna Indonesia dengan komoditas dominanya adalah tuna beku tidak mengalami dampak secara langsung terhadap pemberlakuan kebijakan moratorium kapal eks asing. Data yang diperoleh menunjukkan bahwa untuk periode bulan Oktober-Maret sebelum dilaksanakanya moratorium kapal eks asing dibandingkan dengan periode yang sama sesudah dilaksanakanya moratorium kapal eks asing menunjukkan adanya penurunan volume produksi sebesar 5%. Namun hal ini lebih disebabkan karena dampak kebijakan moratorium kapal transshipment. Hal ini sangat jelas terlihat pada terjadinya perubahan (*shifting*) produk tuna yang dihasilkan setelah adanya kebijakan dimana ekspor tuna segar mengalami penurunan sebesar 24%, disisi lain ekspor tuna beku justru mengalami kenaikan sebesar 8%. Rekomendasi yang dihasilkan dari analisis ini adalah perlu untuk disiapkan armada penangkapan ikan dari lokal dan penguatan SDM, kemudian perlu adanya evaluasi terhadap pelarangan kapal eks asing, verifikasi secara benar dan pengawasan melekat terhadap kepemilikan kapal sangat penting untuk dilakukan, serta perlunya pemberlakuan pelaporan SHTI bagi semua pelaku usaha penangkapan ikan untuk menjamin asal-usul kapal tidak hanya terbatas bagi pelaku usaha dengan tujuan ekspor uni eropa. Selain itu juga perlu adanya peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan moratorium kapal eks asing sehingga tepat sasaran.

Kata Kunci: tuna, moratorium, kapal eks asing

INDEKS ABSTRAK JURNAL KEBIJAKAN SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN
(ABSTRACT INDEX OF JOURNAL POLICY SOCIO-ECONOMICS MARINE AND FISHERIES)

ISSN 2089-6980 **Vol. 5 No. 2, 2015**

Kata kunci bersumber dari artikel. Lembar abstrak ini boleh diperbanyak tanpa izin dan biaya

UDC 639.2.03 (594.21)

VALUASI EKONOMI SUMBERDAYA DI TELUK PALU, KOTA PALU, PROVINSI SULAWESI TENGAH

Fachruddin Hari Anggara Putera dan Alfiani Eliata Sallata

Teluk Palu merupakan sumberdaya yang memiliki nilai ekonomi dan ekologi yang sangat besar. Di samping itu, Teluk Palu sebagai sumber penghidupan bagi nelayan setempat. Penelitian valuasi ekonomi telah dilakukan pada bulan Mei – Juni 2015 di Teluk Palu. Tujuan penelian ini untuk mengetahui valuasi ekonomi sumberdaya Teluk Palu. Pengamatan dilakukan dengan metode pengumpulan data di lapangan dan data dianalisis secara deskriptif analitik yang disajikan dalam bentuk tabulasi. Berdasarkan hasil kajian, didapat hasil bahwa Total nilai ekonomi sumberdaya Teluk Palu adalah sebesar Rp. 35.846.290.000,- per tahun. Sektor Perikanan memberikan kontribusi sebesar Rp. 13.104.000.000,- per tahun. Sektor Pariwisata dengan nilai ekonomi sebesar Rp. 2.422.750.000,- per tahun. Fungsi Terumbu Karang sebagai physical protection global life sebesar Rp. 20.319.540.000,- per tahun. Berdasarkan kenyataan tersebut diatas, selain memberikan fungsi ekologi, sumberdaya Teluk Palu juga memberikan nilai ekonomi yang sangat tinggi.

Kata Kunci: valuasi ekonomi, Teluk Palu, Palu

INDEKS ABSTRAK JURNAL KEBIJAKAN SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN
(ABSTRACT INDEX OF JOURNAL POLICY SOCIO-ECONOMICS MARINE AND FISHERIES)

ISSN 2089-6980 **Vol. 5 No. 2, 2015**

Kata kunci bersumber dari artikel. Lembar abstrak ini boleh diperbanyak tanpa izin dan biaya

UDC 639.2.067 (594.51)

PENINGKATAN KAPASITAS FASILITAS FUNGSIONAL MELALUI PROGRAM MINAPOLITAN DI PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA (PPN) PEKALONGAN, JAWA TENGAH

Reza Kukuh Febrianto, Abdul Kohar Mudzakir dan Abdul Rosyid

Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pekalongan Kota Pekalongan merupakan Unit Pelaksana Teknis dibawah Kementrian Kelautan Perikanan dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi fasilitas fungsional, menganalisis program Minapolitan di PPN Pekalongan dan menganalisis tingkat pemanfaatan fasilitas fungsional, Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitik dengan pengambilan sampel *Purposive sampling* dengan teknik non probability sampling dan kuota sampling kemudian menggunakan analisa tingkat pemanfaatan, analisa likerts dan analisa SWOT . Hasil penelitian diperoleh dari analisis likerts responden non pegawai atau masyarakat sekitar pengguna pelabuhan, nilai skor pemanfaatan fasilitas pelabuhan 3,1 dan responden pegawai pelabuhan, nilai skor pemanfaatan fasilitas pelabuhan berkisar antara 3,9 dengan hasil baik. Hasil perhitungan tingkat pemanfaatan TPI 14,04%, areal parkir 21,63%, dan Bak air bersih 60%. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa tingkat pemanfaatan fasilitas fungsional secara keseluruhan belum termanfaatkan secara optimal. Hasil analisa SWOT total skor pada faktor internal dan eksternal matrik. Dari perhitungan skoring faktor total nilai skor untuk faktor internal didapatkan 3,09 sedangkan untuk faktor eksternal didapatkan 2,86 yang untuk selanjutnya ditempatkan pada matrik didapatkan pada kuadran I yaitu strategi S-O (*strength-opportunity*). Strategi ini dibuat untuk menggunakan seluruh kekuatan untukmemanfaatkan peluang yang ada.

Kata Kunci: fasilitas fungsional, minapolitan, PPN Pekalongan, pengembangan

INDEKS ABSTRAK JURNAL KEBIJAKAN SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN
(ABSTRACT INDEX OF JOURNAL POLICY SOCIO-ECONOMICS MARINE AND FISHERIES)

ISSN 2089-6980 **Vol. 5 No. 2, 2015**

Kata kunci bersumber dari artikel. Lembar abstrak ini boleh diperbanyak tanpa izin dan biaya

UDC 639.2.055

EFEKTIVITAS PEMBERLAKUAN KEBIJAKAN MORATORIUM KAPAL EKS ASING DAN TRANSHIPMENT TERHADAP KINERJA USAHA PENANGKAPAN IKAN

Yayan Hikmayani, Rikrik Rahadian, Nurlailii dan Rizky Muhartono

Penelitian untuk melihat efektivitas kebijakan moratorium kapal eks asing dan transhipment telah dilakukan pada Bulan Maret 2015. Tujuan penulisan makalah ini yaitu untuk melihat pengaruh langsung dari pemberlakuan kebijakan tersebut terhadap kinerja usaha perikanan. Lokasi penelitian dilakukan di tempat pendaratan ikan bagi kapal-kapal ikan yang terkena dampak, seperti di Bitung dan DKI Jakarta. Metode pengambilan responden dilakukan secara terpilih, yaitu instansi terkait : pelabuhan perikanan, pengawas perikanan, serta pelaku usaha. Pengambilan data terdiri dari data primer dan data sekunder. Analisis data dilakukan secara tabulasi dan diolah menggunakan statistik sederhana untuk menjawab tujuan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan yang telah diimplementasikan dilihat dari tujuan untuk mengurangi *illegal fishing* dianggap secara nyata cukup efektif. Hal ini ditunjukkan dengan menurunnya jumlah *illegal fishing*. Namun demikian, di sisi lainnya kebijakan tersebut dinilai tidak efektif bagi peningkatan kinerja usaha penangkapan skala besar dan telah cukup efektif untuk meningkatkan kinerja usaha penangkapan ikan skala kecil. Diharapkan keijakan ini akan diikuti oleh perbaikan sistem monitoring yang baik dari pihak pemerintah agar pemberlauan kembali kapal transhipment tidak digunakan untuk kegiatan *illegal fishing*, namun membangkitkan inerja usaha perikanan dari hulu ke hilir yang berkembang di Indonesia.

Kata Kunci: efektivitas, moratorium, kapal eks asing dan transhipment

INDEKS ABSTRAK JURNAL KEBIJAKAN SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN
(ABSTRACT INDEX OF JOURNAL POLICY SOCIO-ECONOMICS MARINE AND FISHERIES)

ISSN 2089-6980 **Vol. 5 No. 2, 2015**

Kata kunci bersumber dari artikel. Lembar abstrak ini boleh diperbanyak tanpa izin dan biaya

UDC 639.2.057 (594.81)

STRATEGI ADAPTASI NELAYAN TERHADAP PENETAPAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN DAERAH DI MISOOL SELATAN, KKPD RAJA AMPAT

Rici Tri Harpin Pranata dan Arif Satria

Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) ditujukan untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya laut berkelanjutan. Hal yang perlu diperhatikan adalah sumber daya di kawasan KKPD serta karakteristik sosial-budaya dan ekonomi nelayan. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik masyarakat nelayan di wilayah KKPD dan strategi adaptasi yang dilakukan dalam merespon penetapan KKPD. Kasus yang terjadi di KKPD Misool Selatan Raja Ampat menunjukkan adanya karakteristik sosial-budaya dan ekonomi masyarakat nelayan yang beragam meliputi interaksi sosial, organisasi kerja, gaya hidup, diversifikasi pekerjaan, manajemen keuangan, dan adaptasi teknologi. Pada aspek interaksi sosial, mayoritas melayan memilih berhutang ke toko/kios terdekat, disamping kegiatan yang berhubungan dengan plasma dan meminjam uang ke tetangga. Mayoritas nelayan mengikuti perkumpulan nelayan, disamping mengikut pemilik kapal dan menjadi pemimpin kelompok sementara untuk aspek organisasi sosial. Gaya hidup meliiputi kebiasaan jajan, merokok, berada di rumah ketika tidak melaut, dan membawa minuman keras ketika melaut. Untuk aspek manajemen keuangan, mayoritas nelayan menggunakan uang mereka untuk kebutuhan makan dan perawatan perahu, disamping untuk jajan, membeli rokok dan menambah alat tangkap. Diversifikasi pekerjaan dilakukan oleh sebagian besar nelayan dengan bekerja di perusahaan, budidaya rumput laut, membuka kebun, membeli dan memelihara ternak dan memiliki kios/toko untuk berjualan. Mayoritas nelayan melakukan adaptasi teknologi berupa penggunaan motor tempel pada perahu tradisional, disamping memodifikasi alat tangkap dan beralih ke perahu Johnson. Strategi adaptasi nelayan merupakan respon yang muncul, karena adanya perubahan di kawasan konservasi. Seiring dengan berbagai perubahan yang beragam, mayoritas nelayan memilih strategi adaptasi dengan cara berinvestasi untuk menghadapi penetapan KKPD.

Kata Kunci: karakteristik masyarakat nelayan, strategi adaptasi, karakteristik rumah tangga nelayan, KKPD

INDEKS ABSTRAK JURNAL KEBIJAKAN SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN
(ABSTRACT INDEX OF JOURNAL POLICY SOCIO-ECONOMICS MARINE AND FISHERIES)

ISSN 2089-6980 **Vol. 5 No. 2, 2015**

Kata kunci bersumber dari artikel. Lembar abstrak ini boleh diperbanyak tanpa izin dan biaya

UDC 639.2.03 (594.61)

POTENSI EKSPOR NENER BANDENG INDONESIA: PELUANG DAN TANTANGAN

Achmad Zamroni, Irwan Mulyawan dan Fatriyandi Nur Priyatna

Produksi nener untuk kebutuhan budidaya bandeng di Indonesia secara kuantitas sudah terpenuhi, namun secara kualitas masih belum memenuhi syarat. Kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi keragaan usaha nener di Indonesia, menganalisis peluang ekspor nener dan merumuskan kebijakan pengembangan nener. Lokasi survey dilakukan di Gondol dengan menggunakan snowball sebagai metode pengambilan data. Hasil analisis secara kualitatif dan kuantitatif menunjukkan bahwa nilai ekonomi usaha nener di lokasi Gondol, Bali setiap tahunnya sebesar Rp 171.360.000.000. Potensi nilai ekspor nener yang berasal dari lokasi Gondol, Bali sebesar Rp 37.800.000.000 per tahun selama tiga bulan. Sementara nilai kehilangan produksi akibat produksi nener berlebih dan tidak terserap oleh pasar baik domestik maupun ekspor selama 9 bulan sebesar Rp 10.800.000.000 per tahun. Oleh karena itu, rekomendasi kebijakan yang bisa diberikan terkait dengan upaya pengembangan dan pengaturan usaha budidaya nener adalah dengan memberikan rekomendasi berupa program prioritas dan langkah eksekusi yang sebaiknya dilakukan oleh direktorat jenderal teknis terkait.

Kata Kunci: expor, nener, peluang, tantangan

INDEKS ABSTRAK JURNAL KEBIJAKAN SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN
(ABSTRACT INDEX OF JOURNAL POLICY SOCIO-ECONOMICS MARINE AND FISHERIES)

ISSN 2089-6980 **Vol. 5 No. 2, 2015**

Kata kunci bersumber dari artikel. Lembar abstrak ini boleh diperbanyak tanpa izin dan biaya

UDC 639.22 (094.7)

ANALISIS DAMPAK MORATORIUM KAPAL EX-ASING TERHADAP KONDISI PASAR TUNA INDONESIA

Subhechanis Saptanto, Risna Yusuf, Tenny Apriliani dan Freshty Yulia Arthatiani

Peraturan Menteri No. 56 yang dikeluarkan pada bulan Nopember 2014 tentang moratorium kapal eks asing diduga memberikan dampak terhadap sektor perikanan termasuk komoditas tuna. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak moratorium kapal ex-asing terhadap kondisi pasar tuna Indonesia. Waktu penelitian dilakukan dari bulan April hingga bulan Mei 2015 dengan mengambil lokasi di Jakarta dan Bali. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer berasal dari wawancara dengan pelaku usaha eksportir tuna dan data sekunder bersumber dari data produksi, pola pemasaran, dan ekspor perikanan. Sumber data berasal dari Pelabuhan, Dinas KP di lokasi penelitian dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Data-data yang digunakan dalam penelitian diperoleh melalui penelusuran pustaka (desk study) yang relevan dengan kegiatan penelitian dan survey lapang. Data-data yang telah dikumpulkan kemudian ditabulasi dan dianalisis secara deskriptif dan disajikan dalam bentuk tabel dan grafik. Selanjutnya hasil analisis akan diinterpretasikan untuk menghasilkan informasi yang dapat menjawab tujuan dari penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya Permen No. 56 ini memberikan pengaruh pada triwulan pertama (bulan januari sampai Maret), volume ekspor ikan tuna segar mengalami penurunan untuk tuna segar mengalami penurunan sebesar 13% sedangkan nilainya mengalami kenaikan sebesar 1%. Hal ini mengindikasikan Penurunan volume produksi yang dapat berdampak pada penurunan volume ekspor hendaknya harus diimbangi dengan adanya peningkatan harga ekspor sehingga nilai ekspor tidak mengalami penurunan. Jika terjadi penurunan maka dapat berdampak pada penerimaan devisa negara yang secara makro dapat menyebabkan penurunan kontribusi PDB dari sektor perikanan.

Kata Kunci: pasar tuna, moratorium, kapal ex-asing

DAMPAK KEBIJAKAN MORATORIUM KAPAL EKS ASING TERHADAP KONDISI PERIKANAN TUNA: STUDI KASUS DI DKI JAKARTA

Impact of Policy Moratorium For The Licensing of Ex-Foreign Fishing Vessels on Tuna Fishing: Case Study on DKI Jakarta

***Freshty Yulia Arthatiani dan Tenny Apriliani**

Balai Besar Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan
Gedung Balitbang KP I Lt. 4
Jalan Pasir Putih Nomor 1 Ancol Timur, Jakarta Utara
*email: freshty.arthatiani@gmail.com

Diterima 12 Oktober 2015 - Disetujui 27 November 2015

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan informasi dan mendeskripsikan dampak kebijakan moratorium kapal eks asing yang tercantum dalam Permen KP Nomor 56 Tahun 2014 tentang Penghentian Sementara (Moratorium) Perizinan Usaha Perikanan Tangkap Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia terhadap kondisi perikanan tuna terutama di wilayah DKI Jakarta sebagai salah satu daerah ekspor tuna. Penelitian dilakukan dengan pendekatan retrospektif dimana analisis kebijakan dilakukan terhadap akibat-akibat kebijakan setelah suatu kebijakan diimplementasikan dan biasanya disebut sebagai model analisis evaluatif sehingga diharapkan dapat menghasilkan informasi yang dapat meningkatkan kualitas dari kebijakan yang diterapkan pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DKI Jakarta sebagai salah satu daerah ekspor utama tuna Indonesia dengan komoditas dominanya adalah tuna beku tidak mengalami dampak secara langsung terhadap pemberlakuan kebijakan moratorium kapal eks asing. Data yang diperoleh menunjukkan bahwa untuk periode bulan Oktober-Maret sebelum dilaksanakanya moratorium kapal eks asing dibandingkan dengan periode yang sama sesudah dilaksanakanya moratorium kapal eks asing menunjukkan adanya penurunan volume produksi sebesar 5%. Namun hal ini lebih disebabkan karena dampak kebijakan moratorium kapal transshipment. Hal ini sangat jelas terlihat pada terjadinya perubahan (*shifting*) produk tuna yang dihasilkan setelah adanya kebijakan dimana ekspor tuna segar mengalami penurunan sebesar 24%, disisi lain ekspor tuna beku justru mengalami kenaikan sebesar 8%. Rekomendasi yang dihasilkan dari analisis ini adalah perlu untuk disiapkan armada penangkapan ikan dari lokal dan penguatan SDM, kemudian perlu adanya evaluasi terhadap pelarangan kapal eks asing, verifikasi secara benar dan pengawasan melekat terhadap kepemilikan kapal sangat penting untuk dilakukan, serta perlunya pemberlakuan pelaporan SHTI bagi semua pelaku usaha penangkapan ikan untuk menjamin asal-usul kapal tidak hanya terbatas bagi pelaku usaha dengan tujuan ekspor uni eropa. Selain itu juga perlu adanya peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan moratorium kapal eks asing sehingga tepat sasaran.

Kata Kunci: tuna, moratorium, kapal eks asing

ABSTRACT

The aim of this study is to provide information and describe the impact of the policy moratorium for the licensing of ex-foreign fishing vessels contained in Regulation of the Minister of Marine Affairs and Fisheries No. 56 Year 2014 about Business Licensing moratorium Fishing in Regional Fisheries Management of the Republic of Indonesia on the condition of tuna fisheries, especially in the area of Jakarta as one of the tuna exports. The study was conducted by a retrospective approach, policy analysis carried out on the consequences of the policy after a policy is implemented and is usually referred to as an evaluative analysis model that is expected to yield information that can improve the quality of the policies implemented by the government. The results showed that Jakarta as one of the main export of tuna Indonesia with main commodities are frozen tuna does not affect direct impact on the implementation of the moratorium policy. The data obtained show that for the period from October to March months before the implementation of the moratorium on ex-foreign fishing vessels compared to the same period after the implementation of the moratorium showed a decrease in production volume by

5%. However this is mainly due to the impact of the moratorium ship transshipment. It can be explained by the change (shifting) tuna products produced after the policy whereby fresh tuna exports decreased by 24%, on the other hand frozen tuna exports actually increased by 8%. The recommendations from this analysis is the need to increase the readiness of the local fishing vessels and human resources capacity building, and the need for an evaluation of the banning of ex-foreign fishing vessels, verify proper and oversight attached to the ownership of the vessel is very important to do, as well as the need for enforcement of reporting SHTI for all fishing businesses to guarantee the origin of the ship is not limited to businesses with the aim of European Union exports. There was also a need to increase supervision of the implementation of the moratorium on ex-foreign fishing vessels right on target in accordance with policy objectives.

Keywords: tuna, moratorium, ex-foreign vessels

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara kepulauan dihadapkan pada maraknya kegiatan *Illegal Unreported dan Unregulated (IUU) Fishing* yang menimbulkan gejala *overfishing*. Hal ini dicerminkan dengan menurunnya sumber daya ikan di beberapa wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, seperti Laut China Selatan dan Laut Arafura. Adapun negara-negara yang menjadi pelaku utama *IUU Fishing* di perairan Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) di antaranya adalah Malaysia, Vietnam, Myanmar, Thailand, Filipina dan China (Nikijuluw, 2008). Kerugian ekonomi yang diderita Indonesia akibat kegiatan *illegal fishing* oleh kapal ikan asing diperkirakan sebesar Rp 30 triliun per tahun, dengan perhitungan didasarkan pada adanya 25% potensi perikanan yang dicuri atau sekitar 1,6 juta ton, dengan harga jual ikan US$ 2 per kilogram.

Salah satu satu kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam mengantisipasi terjadinya IUU *Fishing* adalah kebijakan moratorium eks kapal asing yang tertuang dalam Peraturan Menteri No. 56/2014 yang isinya adalah kapal yang pembuatannya dilakukan di luar negeri tidak akan dberikan izin baru Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI), Surat Ijin Kelayakan Penangkapan Ikan (SIKPI) dan perpanjangan SIPI dan SIKPI. Kebijakan ini diambil pemerintah karena kerugian besar dari sektor kelautan dan perikanan yang disebabkan beroperasinya kapal-kapal eks asing tersebut dan sebagai bentuk antisipasi terjadinya IUU *Fishing*. Berdasarkan kajian awal dari Institut Pertanian Bogor (IPB) sebelum diterapkan kebijakan moratorium tersebut diperoleh informasi bahwa terdapat 1.240 kapal buatan asing dari total 5.329 kapal yang berukuran di atas 30 GT di Indonesia (Kurniawan, 2014).

Kebijakan moratorium diambil oleh pemerintah karena kerugian besar dari sektor kelautan dan perikanan yang disebabkan beroperasinya kapal-kapal eks asing tersebut. Pada tahun 2013, PNBP dari total 5.329 kapal tersebut sebesar 250 miliar rupiah. Jumlah ini sangat jauh jika dibandingkan dengan kerugian sebesar US$ 20 miliar atau Rp 240 triliun rupiah akibat *Illegal, Unreported dan Unregulated (IUU) Fishing* yang terjadi di perairan Indonesia. (Nurhayat, 2014).

Salah satu komoditas yang menjadi tangkapan dominan kapal eks asing yang berukuran lebih dari 30 GT adalah ikan tuna. Komoditas tuna merupakan salah satu komoditas unggulan dalam program industrialisasi. Hal ini karena tuna merupakan jenis ikan ekonomis tinggi dan merupakan komoditas penghasil devisa negara nomor dua untuk komoditas perikanan setelah udang. Pada tahun 2011, komoditas tuna, dalam hal ini Tuna Tongkol dan Cakalang (TTC) menyumbang nilai ekspor sebesar US$ 498.591.000 atau 14% dari total nilai ekspor perikanan Indonesia.Pada tahun 2009, secara angka potensi produksi komoditas tuna di Indonesia diperkirakan hampir mencapai 1,2 juta ton per tahun, dengan nilai ekspor lebih dari 3,5 miliar Dolar Amerika Serikat (AS).

Kebijakan moratorium eks kapal asing yang tertuang dalam Peraturan Menteri No. 56/2014 ini memiliki dampak terhadap kondisi perikanan tuna sebagai salah satu komoditas utama dalam perikanan tangkap di Indonesia. DKI Jakarta merupakan salah satu daerah asal ekspor utama tuna Indonesia dengan komposisi sebesar 36% dari total ekspor tuna Indonesia, sehingga perlu untuk dikaji bagaimana kebijakan ini berpengaruh terhadap kondisi perikanan tuna di DKI Jakarta.

Berdasarkan latar belakang diatas, makalah ini bertujuan untuk mengeevaluasi dampak kebijakan moratorium kapal eks asing yang tercantum dalam Permen KP Nomor 56 Tahun 2014 tentang Penghentian Sementara (Moratorium) Perizinan Usaha Perikanan Tangkap Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia terhadap kondisi perikanan tuna

METODOLOGI

Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Jakarta sebagai daerah ekspor tuna terbesar. Selain itu jumlah kapal eks-asing yang ada di wilayah tersebut relatif banyak, merupakan salah satu pelabuhan ekspor terbesar di Indonesia. Waktu penelitian dilakukan dari bulan April hingga bulan Mei 2015**.**

Metode Analisis Data

Penelitian dilakukan dengan pendekatan retrospektif, yaitu analisis kebijakan dilakukan terhadap akibat-akibat kebijakan setelah suatu kebijakan diimplementasikan. Analisis ini juga disebut sebagai model analisis evaluatif sehingga diharapkan dapat menghasilkan informasi yang dapat meningkatkan kualitas kebijakan yang diterapkan pemerintah (Dunn, 2003). Analisis dilakukan dengan berorientasi pada aplikasi yang berusahan menerangkan sebab dan konsekuensi kebijakan. Informasi mengenai tujuan evaluasi hasil kebijakan yang spesifik dapat dignakan oleh para praktisi untuk merumusakan masalah-masalah kebijakan, mengembangkan alternative kebijakan baru dan merekomendasikan arah tindakan dalam pemecahan masalah kebijakan.

Data dan Sumber Data.

Berdasarkan sumbernya, data yang diperlukan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data/informasi yang diperoleh dari hasil diskusi dan wawancara dengan *stakeholders.* Data primer diperoleh dari wawancara langsung dengan informan kunci seperti para pelaku usaha perikanan, pejabat di PPS Nizam Zachman, LPPMHP Jakarta, BKIPM dan dinas terkait Kelautan dan Perikanan. Selain itu, data sekunder merupakan data teks berupa keterangan mengenai jumlah kapal eks asing, nilai dan volume ekspor tuna, jumlah pengurusan SHTI, dan lain sebagainya. Data-data tersebut diperoleh melalui informasi dari instansi terkait seperti Badan Pusat Statistik, PPS Nizam Zachman DJPT (KKP), Pusdatin (KKP), LPPMHP Provinsi Jakarta, BKIPM (KKP), *FAO,* (WTO),UN Comtrade dan WITS.

KONDISI PERIKANAN TUNA NASIONAL

Sebelum adanya Peraturan Menteri No 56 tentang Moratorium Kapal Eks Asing, secara nasional produksi tuna mengalami peningkatan dari tahun 2002 hingga 2012 yaitu sebesar rata-rata 6,5% per tahun. Sedangkan volume ekspor tuna ke dunia pada tahun 2012 mencapai 533 ribu ton dengan nilai ekspor mencapai 116 juta USD. Tuna diekspor dalam bentuk segar, beku dan kaleng. Selama ini tuna dipasarkan dalam bentuk segar, beku dan kaleng dimana market share tuna segar ke Jepang 93%, AS 4% dan Uni Eropa 3%. Pasar tuna beku ke Jepang sebesar 50%, AS sebesar 32% dan Uni Eropa 17%. Pasar Ekspor tuna kaleng ke Uni Eropa 36%, Jepang 33% dan AS 31%. Hal ini menunjukkan bahwa Jepang merupakan negara tujuan ekspor utama tuna Indonesia.

Data ekspor yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran (Ditjen P2HP) dari tahun 2010-2012 menunjukkan bahwa terdapat lima daerah ekspor utama untuk komoditas tuna baik dalam bentuk tuna segar, tuna beku dan tuna kaleng di Indonesia sebelum disalurkan ke berbagai negara tujuan ekspor. Beberapa daerah asal ekspor tersebut digambarkan dalam Tabel 1.

Berdasarkan Tabel 1 maka dapat diketahui bahwa daerah asal ekspor utama tuna Indonesia berasal dari DKI Jakarta yaitu sebesar 36% dengan komoditas dominannya adalah tuna beku, sedangkan untuk tuna kaleng dominan diekspor dari daerah Surabaya. Komoditas tuna segar banyak diekspor dari Bali dengan presentase mencapai 63% dari total ekspor tuna segar dari seluruh daerah di Indonesia, namun secara keseluruhan Bali menempati posisi keempat sebagai daerah ekspor setelah DKI Jakarta, Surabaya dan Bitung.

KONDISI PERIKANAN TUNA DI JAKARTA

Seperti dijelaskan pada Tabel 1 yang menunjukkan bahwa daerah asal utama ekspor tuna adalah berasal dari DKI Jakarta maka salah satu lokasi penelitian untuk menggambarkan dampak moratorium kapal eks asing terhadap ekspor tuna dilakukan pengambilan data pada

Tabel 1. NIlai Ekspor Tuna Berdasarkan daerah Asal Tahun 2010-2012 (USD).
Table 1. Tuna Export Value Based on Origin Year 2010-2012 (USD).

No.	Daerah/ *Origin*	Jenis Komoditas Tuna (US$)/ *Tuna Comoodities (US$)*			Persentase(%)/ *Precentage(%)*
		Segar/ *Fresh*	Beku/ *Frozen*	Kaleng/ *Canned*	
1	DKI Jakarta	28,378,129	87,892,008	53,396,802	36%
2	Surabaya	951,585	33,863,222	143,217,130	37%
3	Bitung	2,849,092	13,403,767	51,597,031	14%
4	Bali	53,726,626	3,265,486	-	12%
5	Ambon	3,200	3,136,541	-	1%
	Total	85,908,633	141,561,024	248,210,963	**100%**

Sumber : Rekap Ekspor Tuna (Ditjen P2HP,2014)/
Source : Recap Tuna Exports (Directorate General of Fishery Product Processing and Marketing,2014)

lokasi DKI Jakarta khususnya pada Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman (PPSNZJ) Muara Baru. Berdasarkan laporan statistik PPSNZJ tahun 2013 dapat diketahui bahwa produksi perikanan berasal dari produksi laut yaitu produksi kapal penangkap ikan yang mendaratkan ikan hasil tangkapan di PPSNZJ dan produksi ikan masuk yaitu produksi kapal pengangkut ikan dari pelabuhan lain, maupun daerah luar DKI Jakarta yang kiangkuut ke PPSNZJ melalui jalur darat maupun jalur laut. Total nilai produksi ikan pada tahun 2013 mencapai 252.762,72 ton yang terdiri dari produksi laut sebesar 113.342.916 Ton (44.84%) dan produksi ikan masuk sebesar 139.419.808 Ton (42.87%) dan sisanya produksi ikan impor sebesar 31.054,498 Ton (12.29%). Jenis ikan yang dominan dari produksi laut pada tahun ini adalah Cakalang (29.72%), Tuna Sirip Kuning (15,43%), Tuna Mata Besar (12,84%) sedangkan untuk produksi ikan masuk didominasi oleh ikan layang, sanglir, lemuru dan tuna yang sebagian besar didatangkan dari Provinsi Sulawesi Utara.

Dilihat volume produksi perikanan tangkap berdasarkan jenis komoditasnya yaitu Tuna Tongkol dan Cakalang (TTC), terlihat bahwa volume produksi pada tahun 2010-2013 mengalami peningkatan sebesar 34% seperti terlihat pada tabel perkembangan Produksi Tuna Tongkol Cakalang (TTC) Pada Tahun 2011-2013 (Ton) (Tabel 2).

Berdasarkan Tabel 2 dapat diketahui bahwa dari sisi produksi TTC komoditas yang paling dominan pada PPSNZJ yang mewakili kondisi di daerah DKI Jakarta adalah cakalang yang diikuti oleh produksi ikan *yellow fin* tuna, sedangkan untuk tuna sirip biru memang mengalami penurunan setiap tahunya, hal tersebut juga terjadi secara global karena terkait dengan ketersedian sumberdaya tuna sirip biru yang semakin langka.

Tabel 2. Perkembangan Produksi Tuna di PPS Nizam Zachman Tahun 2011-2013 (Ton).
Table 2. Development of Tuna Production on Nizam Zachman Ocean Fishing Port Year 2011-2013 (Ton).

Jenis Ikan/ *Type of Fish*	Tahun/ *Year*		
	2011	2012	2013
Cakalang/ *Skipjack Tuna*	35,229.46	30,552.47	33,684.84
Tongkol/ *Bonito*	10,906.39	2,201.36	3,081.87
Tuna Mata Besar/ *Big Eye Tuna*	10,374.86	13,593.93	14,553.92
Tuna Sirip Biru/ *Blue Fin Tuna*	3,913.74	47.41	30.75
Yellow Fin/ *Yellow Fin Tuna*	11,152.57	13,605.61	17,489.28
Total	**71.577.02**	**60,000.78**	**68,840.67**

Sumber : Laporan Statistik PPSNZJ (2014)/*Source: Statistic Report of Nizam Zachman Ocean Fishing Port (2014)*

Data lain yang diperoleh menyebutkan terdapat tiga jenis alat tangkap yang digunakan dalam menangkap komoditas tuna pada PPSNZJ yakni rawai tuna, *purse seine* dan *handline*. Berdasarkan alat tangkap tuna yang digunakan, terlihat bahwa pada tahun 2008-2013 jumlah alat tangkap mengalami peningkatan rata-rata sebesar 4%. Fenomena yang menarik adalah makin menurunnya alat tangkap tuna *longline* namun makin meningkatnya pengguna alat tangkap *purse seine*. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pelaku usaha dapat diketahui bahwa penurunan alat tangkap *longline* disebabkan biaya operasional yang semakin tinggi yang tidak berimbang dengan hasil yang diperoleh karena alat tangkap ini dikhususkan untuk menangkap komoditas tuna, sedangkan untuk alat tangkap *purse seine* dapat menangkap segala jenis komoditas sehingga dianggap lebih menguntungkan. Data lengkap terkait jenis alat tangkap tuna yang digunakan pada PPSNZJ terlihat pada Tabel 3.

wawancara tidak merasakan dampak kebijakan moratorium kapal eks asing secara signifikan. Dampak yang dirasakan lebih pada kebijakan pelarangan kapal '*transshipment* terhadap kualitas tuna yang didaratkan. Waktu operasional kapal tuna (*longline*) yang mencapai 8 bulan hingga 1 tahun sangat membutuhkan kapal *transshipment* khususnya untuk produk tuna segar, tanpa adanya kapal transit akhirnya produk tuna yang dihasilkan oleh kapal long line adalah tuna beku. Langkah responsif yang dilakukan oleh eksportir tuna karena kesulitan pemenuhan kuota ekspor tuna segar dan beku adalah :

1. Mengkomunikasikan dengan pihak '*buyer*' (pembeli) terkait kesulitan pemenuhan kuota sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, khususnya untuk produk tuna segar.
2. Upaya pemenuhan tuna segar dengan cara membeli tuna segar dari nelayan di Palabuhanratu dan Cilacap.

Tabel 3. Jenis Alat Penangkap Tuna di PPSNZJ Pada Tahun 2008-2013.

Table 3. Types of Tuna Catcher on Nizam Zachman Ocean Fishing Port Year 2008-2013.

Jenis Alat Tangkap/ *Types of Tuna Catcher*	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Rawai tuna/*Longline*	478	468	453	442	366	339
Pukat cincin/*Purse seine*	172	194	218	265	345	426
Handline			12	11	15	13
Jumlah/*Total*	**650**	**662**	**683**	**718**	**726**	**778**

Sumber : Laporan Statistik PPSNZJ (2014)/ *Source: Statistic Report of Nizam Zachman Ocean Fishing Port (2014)*

DAMPAK MORATORIUM KAPAL EKS-ASING

Hasil pengumpulan data dan wawancara dengan Pejabat yang berwenang pada PPSNZJ menyebutkan bahwa dampak moratorium eks kapal asing tidak mempengaruhi sistem perizinan kapal ikan di PPS Nizam Zahman, karena memang sejak tahun 2013 kapal eks asing dengan alat tangkap *longline* sudah tidak memperpanjang perizinan penangkapan ikan lagi. Dari sisi jumlah juga hanya terdapat 15 kapal dari 1624 kapal yang terdata pada PPSNZJ sehingga tidak berpengaruh secara signifikan dampak permen KP 56 tersebut khususnya pada daerah Jakarta. Data kapal eks asing yang beroperasi pada PPSNZJ DKI Jakarta dapat dilihat pada Tabel 4.

Pelaku usaha khususnya eksportir Tuna di PPS Nizam Zahman, berdasarkan hasil

3. Akan dilakukan impor tuna dari negara lain (seperti Jepang, China dan Filipina) dengan kualitas yang lebih bagus karena penanganan pasca panen yang lebih baik.
4. Mengalihkan komoditas ekspor dari tuna segar menjadi tuna beku karena kualitas tuna segar yang tidak dapat dipenuhi
5. Mengalihkan pasar tuna ke non eropa atau pasar lain yang tidak membutuhkan sertifikasi SHTI, karena pelarangan kapal *transshipmen*t menyulitkan dalam pengurusan lembar awal SHTI. Hal ini karena beberapa kapal sudah terlanjur berangkat sebelum diberlakukanya kebijakan pelarangan *transshipment* sehingga SIPI tidak sesuai dengan SIUP jika ingin diubah menjadi SIPI laut lepas.

Tabel 4. Kapal Eks Asing Yang Ada di Kolam Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta, Maret 2015.

Table 4. Ex-Foreign Vessels on Nizam Zachman Ocean Fishing Port in March 2015.

No	Nama/*Name*		Alat Tangkap/ *Type of Catcher*	Tgl Terakhir Keluar/ *Last Register*	Keterangan/ *Description*
	Kapal/*Vessel*	Pemilik/*Owner*			
1	Kusuma Graha (Eks. Mv. Daniela)	Tri Kusuma Graha, PT	ANG	04/02/15	SPB Terakhir Ada
2	Haslindo Ii (Eks. Maruky Boshi Maru No.32)	Sumber Haslindo, PT	LL	01/11/10	SPB Terakhir Ada
3	Haslindo 7	Sumber Haslindo, PT	LL	26/05/12	SPB Terakhir Ada
4	Haslindo 8	Sumber Haslindo, PT	LL	04/04/13	SPB Terakhir Ada
5	Haslindo 5	Sumber Haslindo, PT	JI	04/04/14	SPB Terakhir Ada
6	Haslindo 6	Sumber Haslindo, PT	RT	23/06/13	SPB Terakhir Ada
7	Lulu Marina 33	Rico Dian Jayatama, PT	GN	14/03/14	SPB Terakhir Ada
8	Sinar Abadi 69	Tuna Permata Rezeki, PT	PS		Belum Pernah Keluar (STBLKK)
9	Mina Fajar 16 (Eks. Sombon Phoon)	Asroben. PT	GN	03/03/14	SPB Terakhir Ada
10	Naili - Xv (Eks. Dae Ii No.301)	Samudera Mandiri Selatan, PT	LL	16/04/13	SPB Terakhir Ada
11	Naili – Xvi	Samudera Mandiri Selatan, PT	LL	05/03/13	SPB Terakhir Ada
12	Naili – Ii	Weny Yuhadi	HL	15/01/14	SPB Terakhir Ada
13	Sultra Mandiri 01	Samudera Mandiri Selatan, PT	ANG	28/08/10	SPB Terakhir Ada
14	Sultra Mandiri – 02	Samudera Mandiri Selatan, PT	PC	26/08/13	SPB Terakhir Ada
15	Gloria	Arifin Wijaya	ANG	13/01/15	SPB Terakhir Ada

Sumber : PPS Nizam Zahman, 2015/ *Source :Nizam Zachman Ocean Fishing Port (2015)*

Langkah antisipatif yang dilakukan oleh pelaku usaha khususnya eksportir yang memiliki kapal *transshipment* dan kapal penangkap ikan adalah :

1. Merubah fungsi kapal penampung di laut menjadi kapal pengangkut dari pelabuhan ke pelabuhan (*port to port*).
2. Merubah SIUP dan SIPI kapal menjadi laut lepas untuk memperluas daerah penangkapan ikan karena adanya potensi SDI yang belum termanfaatkan akibat adanya pelarangan armada kapal eks asing
3. Perubahan alat tangkap dari *Longline* menjadi *Gillnet*.

Kapal eks asing yang berlabuh di PPS Nizam Zahman sampai dengan bulan Maret 2015 hanya berjumlah 15 unit kapal seperti pada Tabel 4. Khusus kapal *longline* yang menangkap ikan tuna hanya berjumlah lima unit yang sudah tidak beroperasi lagi sejak tahun 2013 yang disebabkan karena ketidakmampuan untuk pembiayaan operasional kapal. Kebijakan moratorium eks kapal asing di PPS Nizam Zahman tidak mempengaruhi produksi ikan tuna secara signifikan karena kapal-kapal tersebut memang sudah berhenti beroperasi sejak tahun 2013. Beberapa kapal *longline* eks asing tersebut beralih fungsi menjadi kapal transit.

Dampak moratorium eks kapal asing tidak mempengaruhi sistem perizinan kapal ikan di PPS Nizam Zahman, karena memang sejak tahun 2013 kapal eks asing dengan alat tangkap *longline* sudah tidak memperpanjang perizinan penangkapan ikan lagi. Beberapa perijinan yang untuk komoditas ikan tuna khususnya untuk pasar luar negeri diantaranya:

1. *Health Cerifificate* (HC) sebagai persyaratan umum untuk ekspor ikan ke luar negeri.
2. Sertifikat Hasil Penangkapan Ikan (SHTI) sebagai persyaratan untuk pasar Uni Eropa.

Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan (SHTI) dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan selaku Otoritas Kompeten (*Commpetent Authority)* dan divalidasi oleh unit kerja yang telah ditunjuk

sebagai Otoritas Kompeten Lokal. Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan diberikan bagi produk yang akan dieksport ke Uni Eropa baik secara langsung maupun tidak langsung, dan mulai diberlakukan sejak tanggal 01 Januari 2010 dengan acuan EC Regulation 1005/2008. Sertifikat ini tidak berlaku bagi produk – produk perikanan dari hasil kegiatan budidaya (air tawar, payau dan laut), produk perikanan air tawar, ikan hias, kekerangan, rumput laut, *scallops* dan *oyster*.

Otoritas Kompeten Lokal (OKL) yang ditunjuk di pelabuhan masing-masing akan memvalidasi SHTI setelah terlebih dahulu diverifikasi oleh pihak PSDKP (Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan) setempat. Dalam pelaksanaan, yang dimaksud dengan sertifikat hasil tangkapan ikan adalah:

1. Sertifikat hasil tangkapan ikan (SHTI), adalah surat keterangan yang menyatakan bahwa hasil perikanan yang akan dieksport bukan dari kegiatan illegal*, unreported and unregulated (IUU) fishing.*
2. SHTI –Lembar Awal adalah surat keterangan yang memuat informasi hasil tangkapan ikan yang didaratkan dari kapal penangkap ikan untuk tujuan pencatatan.
3. SHTI – Lembar Turunan adalah surat keterangan yang memuat informasi sebagian atau seluruh hasil tangkapan ikan sesuai dengan lembar awal sebagai dokumen yang menyertai produk perikanan yang dipasarkan ke Uni Eropa.
4. SHTI – Lembar Turunan yang Disederhanakan adalah surat keterangan yang memuat informasi hasil tangkapan ikan yang didaratkan dari kapal penangkap ikan sebagai dokumen yang menyertai produk perikanan yang dipasarkan ke Uni Eropa.

Berdasarkan tabel 5 dapat diketahui bahwa secara rata-rata terdapat peningkatan setiap tahunya pada pengurusan SHTI pada PPSNZJ, terutama pada SHTI lembar turunan. Hal ini menunjukkan bahwa pada PPSNZJ komoditas ekspor yang dihasilkan kebanyakan berasal dari daerah lain yang sebagai penerbit lembar awalnya. Lembar turunan tersebut biasanya diurus oleh UPI setelah adanya SHTI lembar awal, karakteristik di DKI Jakarta yang memiliki banyak UPI sehingga lebih banyak pengurusan lembar turunan pada daerah ini. Hal tersebut sekaligus dapat menunjukkan kesadaran dari pelaku usaha untuk memenuhi syarat ekspor dari negara tujuan, namun yang disayangkan persyaratan pengurusan SHTI hanya berlaku untuk negara tujuan Uni Eropa sehingga pencatatan tersebut tidak menggambarkan kondisi ekspor secara nasional. Langkah kedepannya dapat memberlakukan aturan pengurusan SHTI keseluruh pelaku usaha dengan meningkatkan kesadaran pelaku usaha terhadap *traceability* dan pelaporan data dalam mendukung berbagai kebijakan pemerintah untuk meningkatkan sektor perikanan dan kelautan.

Kebijakan moratorium kapal eks-asing yang telah diberlakukan sejak bulan November 2014 yang kemudian diperpanjang sampai tahun 2015 tentunya berdampak pada kondisi komoditas tuna Indonesia di pasar ekspor. Untuk melihat sejauh mana dampak kebijakan moratorium ini terhadap kondisi komoditas tuna Indonesia dipilih lokasi-lokasi penelitian yang dapat dijelaskan secara detail pada Tabel 6, 7, 8, 9.

Tabel 5 . Pelaksanaan Penerbitan Sertifikat Hasil Tangkap Ikan di PPS Nizam Zahman, Tahun 2010-2014.

Table 5 . Implementation of Catch Cetificate Publishing on Nizam Zachman Ocean Fishing Port Year 2010-2014.

SHTI/ *Catch Certificate*	Tahun/*Year*					Jumlah/ *Total*	Persentase (%)/ *Percentage(%)*
	2010	2011	2012	2013	2014		
LA	755	1.040	251	231	252	2.529	17,16
LT	1.201	2.646	1.060	1.849	4.232	10.988	74,55
LTS	80	184	139	318	501	1.222	8.29
Jumlah/*Total*						**14.739**	**100,00**

Sumber : PPS Nizam Zahman, 2015/ *Source: PPS Nizam Zahman, 2015*

Keterangan/*Remaks* :
LA = Lembar Awal/ *Initial Sheet*
LT = Lembar Turunan/ *Derivative Sheet*
LTS = Lembar Turunan yang disederhanakan/ *Simplified Derivative Sheet*

Tabel 6. Perkembangan Volume dan Nilai Ekspor Komoditas Tuna di DKI Jakarta Triwulan 4, Tahun 2013 (Sebelum Moratorium Kapal Eks Asing).

Table 6. Development of Value and Exports Volume for Tuna Commodities in DKI Jakarta, Quarter 4, Year 2013 (Before Moratorium Ex Foreign Vessels).

Jenis Olahan Tuna/ *Tuna Comodities*	Tahun 2013/*Year 2013*						Jumlah/ *Total*	
	Oktober/ *October*		November/ *November*		Desember/ *December*			
	Volume/ *Volume*	Nilai/*Value*	Volume/ *Volume*	Nilai/ *Value*	Volume/ *Volume*	Nilai/ *Value*	Volume/ *Volume*	Nilai/ *Value*
Tuna Segar/ *Fresh*	560,261	5,042,347	550,747	4,956,727	624,772	5,622,949	1,735,780	15,622,024
Tuna Beku/ *Frozen*	1,198,837	10,789,534	831,415	7,482,736	509,875	4,588,875	2,540,127	22,861,145
Tuna Kaleng/ *Canned*	-	-	-	-	-	-	-	

Sumber : Data LPPMHP Jakarta diolah (2015)/ *Source : Data LPPMHP Jakarta (2015)*

Tabel 7. Perkembangan Volume dan Nilai Ekspor Komoditas Tuna di DKI Jakarta Triwulan 4, Tahun 2014 (Sesudah Moratorium Kapal Eks Asing).

Table 7. Development of Value and Exports Volume for Tuna Commodities in DKI Jakarta, Quarter 4, Year 2014 (After Moratorium Ex Foreign Vessels).

Jenis Olahan Tuna/ *Tuna Comodities*	Tahun 2014/*Year 2014*						Jumlah/ *Total*	
	Oktober/ *October*		November/ *November*		Desember/ *December*			
	Volume/ *Volume*	Nilai/ *Value*	Volume/ *Volume*	Nilai/ *Value*	Volume/ *Volume*	Nilai/ *Value*	Volume/ *Volume*	Nilai/ *Value*
Tuna Segar/ *Fresh*	361,890	3,257,006	401,300	3,611,702	576,141	5,185,273	1,339,331	12,053,981
Tuna Beku/ *Frozen*	847,791	7,630,119	688,570	6,197,130	760,791	6,847,119	2,297,152	20,674,368
Tuna Kaleng/ *Canned*	361,890	3,257,006	401,300	3,611,702	576,141	5,185,273	1,339,331	12,053,981

Sumber: Data LPPMHP Jakarta diolah (2015)/ *Source: Data LPPMHP Jakarta (2015)*

Tabel 8. Perkembangan Volume dan Nilai Ekspor Komoditas Tuna di DKI Jakarta Triwulan 1, Tahun 2014 (Sebelum Moratorium Kapal Eks Asing).

Table 8. Development of Value and Exports Volume for Tuna Commodities in DKI Jakarta, Quarter 1, Year 2014 (Before Moratorium Ex Foreign Vessels).

Jenis Olahan Tuna/ *Tuna Comodities*	Tahun 2014/*Year 2014*						Jumlah/ *Total*	
	Januari/*January*		Februari/ *February*		Maret/*March*			
	Volume/ *Volume*	Nilai/ *Value*	Volume/ *Volume*	Nilai/ *Value*	Volume/ *Volume*	Nilai/ *Value*	Volume/ *Volume*	Nilai/ *Value*
Tuna Segar/ *Fresh*	583,667	19,518,528	390,724	3,516,516	429,657	3,866,911	1,404,048	26,901,955
Tuna Beku/ *Frozen*	729,942	3,198,171	673,217	6,058,951	435,883	3,922,943	1,839,042	13,180,064
Tuna Kaleng/ *Canned*	-	-	-	-	-	-	-	

Sumber: Data LPPMHP Jakarta diolah (2015)/ *Source: Data LPPMHP Jakarta (2015)*

Tabel 9. Perkembangan Volume dan Nilai Ekspor Komoditas Tuna di DKI Jakarta Triwulan 1, Tahun 2015 (Sesudah Moratorium Kapal Eks Asing).

Table 9. Development of Value and Exports Volume for Tuna Commodities in DKI Jakarta, Quarter 1, Year 2015 (After Moratorium Ex Foreign Vessels).

Jenis Olahan Tuna/ *Tuna Comodities*	Tahun 2015/*Year 2015*						Jumlah/ *Total*	
	Januari/*January*		Februari/ *February*		Maret/*March*			
	Volume/ *Volume*	Nilai/ *Value*	Volume/ *Volume*	Nilai/ *Value*	Volume/ *Volume*	Nilai/ *Value*	Volume/ *Volume*	Nilai/ *Value*
Tuna Segar/ *Fresh*	410,674	3,696,064	372,167	9,516,240	244,403	8,125,402	1,027,244	21,337,706
Tuna Beku/ *Frozen*	1,013,869	9,124,821	697,023	1,918,083	732,875	3,508,582	2,443,767	14,551,485
Tuna Kaleng/ *Canned*	-	-	-	-	-	-	-	

Sumber: Data LPPMHP Jakarta diolah (2015)/ *Source: Data LPPMHP Jakarta (2015)*

Tabel-Tabel tersebut merupakan data yang dikeluarkan oleh LPPMHP DKI Jakarta tahun 2013-2015 yang menunjukkan bahwa volume ekspor ikan tuna setelah adanya kebijakan moratorium kapal eks asing mengalami penurunan pada Triwulan 4 yaitu periode Oktober-Desember tahun 2014, dibandingkan dengan periode Oktober-Desember tahun 2013, yaitu terjadi penurunan tuna segar sebesar 23% dan tuna beku sebesar 10%. Selain itu data juga membandingkan nilai ekspor pada Triwulan 1 yakni Januari-Maret tahun 2014, dibandingkan dengan periode Januari-Maret 2015 setelah diberlakukannya Permen KP 56 Moratoraium Kapal eks asing, yang secara rata-rata mengalami penurunan sebesar 27% untuk tuna segar dan mengalami peningkatan pada tuna beku sebesar 33%. Perubahan volume ekspor tuna dibandingkan antara periode yang sama pada tahun yang berbeda diindikasikan karena beberapa faktor penyebab diantaranya :

1. Adanya perubahan kualitas lingkungan perairan laut;
2. Dampak dari beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh KKP terkait penanganan *IUU Fishing* (Pelarangan Alat Tangkap, Moratorium Kapal Asing dan *Transhipment*);
3. Peningkatan kualitas tuna yang didaratkan karena adanya peningkatan penanganan pasca tangkap.

Ekspor ikan Tuna dikelompokkan kedalam dua kelompok besar yaitu Tuna segar dan Tuna beku dengan pasar utama tujuan ekspor yaitu Jepang, Amerika, Uni Eropa, Timur Tengah dan Thailand. Pasar ekspor terbesar untuk tuna segar adalah Jepang dengan persentase di atas 70%, sedangkan tuna beku pasar ekspor terbesar adalah Amerika dan UE dengan kisaran persentase 20-30%. Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa terdapat perubahan (*shifting*) produk

Tabel 10. Perubahan Volume dan Nilai Komoditas Tuna Indonesia di Pasar Ekspor pada Triwulan 4.

Table 10. Changes in Volume and Value for Indonesian Tuna Commodities on Export Market in the 4th Quarter.

Jenis Olahan Tuna/ *Tuna Comodities*	Perubahan (%)/*Changes (%)*						Rata-rata/ *Average*	
	Oktober/ *October*		November/ *November*		Desember/ *December*			
	Volume/ *Volume*	Nilai/ *Value*	Volume/ *Volume*	Nilai/ *Value*	Volume/ *Volume*	Nilai/ *Value*	Volume/ *Volume*	Nilai/ *Value*
Tuna Segar/ *Fresh*	-35.41	-35.41	-27.14	-27.14	-7.78	-7.78	-23.44	-23.44
Tuna Beku/*Frozen*	-29.28	-29.28	-17.18	-17.18	49.21	49.21	0.92	0.92
Tuna Kaleng/ *Canned*								

Sumber: Data LPPMHP Jakarta diolah (2015)/ *Source: Data LPPMHP Jakarta (2015)*

Tabel 11. Perubahan Volume dan Nilai Komoditas Tuna Indonesia di Pasar Ekspor pada Triwulan 1.
Table 11. Changes in Volume and Value for Indonesian Tuna Commodities on Export Market in the Quarter 1.

Jenis Olahan Tuna/ *Tuna Comodities*	Perubahan (%)/*Changes (%)*						Rata-rata/ *Average*	
	Januari/ *January*		Februari/ *February*		Maret/ *March*			
	Volume/ *Volume*	Nilai/ *Value*	Volume/ *Volume*	Nilai/ *Value*	Volume/ *Volume*	Nilai/ *Value*	Volume/ *Volume*	Nilai/ *Value*
Tuna Segar/ *Fresh*	-29.64	-81.06	-4.75	170.62	-43.12	110.13	-25.83	66.56
Tuna Beku/*Frozen*	38.90	185.31	3.54	-68.34	68.14	-10.56	36.86	35.47
Tuna Kaleng/ *Canned*	-	-	-	-	-	-	-	-

Sumber: Data LPPMHP Jakarta diolah (2015)/ *Source: Data LPPMHP Jakarta (2015)*

tuna yang dihasilkan setelah adanya kebijakan moratorium. Data ini menunjukkan bahwa ekspor tuna segar mengalami penurunan sebesar 24%, tetapi ekspor tuna beku justru mengalami kenaikan sebesar 8%. Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku usaha/eksportir tuna di PPS Nizam Zahman, perubahan volume produk tuna yang ekspor bukan karena dampak moratorium eks kapal asing melainkan karena moratorium kapal *transshipment*. Waktu operasional kapal *longline* selama 8-12 bulan, tidak memungkinan untuk menghasilkan tuna segar tanpa adanya kapal transit. Moratorium terhadap kapal *transshipment* merupakan salah satu penyebab penurunan ekspor ikan segar. Kapal-kapal *longline* yang sebelumnya bisa menitipkan tuna segar kepada kapal transit beralih pada pembekuan tuna langsung diatas kapal. Berdasarkan hasil wawancara juga menyebutkan bahwa pengaruh dari pelarangan kapal *transshipment* dirasakan oleh pelaku usaha karena untuk komoditas tuna segar harus dalam kualitas yang baik dan kurang dari 15 hari setelah penangkapan, sehingga dengan pelarangan *transshipment* komoditas tuna yang dihasilkan tidak memenuhi standar untuk diekspor menjadi komoditas tuna segar sehingga dialihkan menjadi tuna beku.

Berdasarkan tabel perubahan volume dan nilai komoditas tuna Indonesia pada triwulan 4 dan triwulan 1 setelah diberlakukanya moratorium kapal eks asing dapat dilihat bahwa terjadi perubahan yang cukup signifikan untuk komoditas tuna segar yakni penurunan sebesar 23,44% pada triwulan 4 dan 25,83% pada triwulan 1, sedangkan untuk komoditas tuna beku justru mengalami peningkatan signifikan yakni sebesar 0,92% pada triwulan 4 dan 36,86 % pada triwulan 1. Hal tersebut menunjukkan bahwa terjadi peralihan komoditas ekspor dari komoditas tuna segar menjadi tuna beku yang berkaitan juga dengan pemberlakuan kebijakan KKP tentang pelarangan kapal *transshipment* sehingga menyebabkan bahan baku tuna segar sulit diperoleh pelaku usaha.

Selain melihat perubahan yang terjadi pada sisi volume dan nilai komoditas tuna Indonesia di pasar ekspor, juga melihat perubahan harga komoditas berdasarkan jenis tuna yang di ekspor (segar, beku dan kaleng) seperti dijelaskan pada Tabel 12.

Tabel 12. Perubahan Harga Komoditas Tuna Indonesia di Pasar Ekspor, tahun 2014-2015.
Table 12. Changes in prices of Indonesian Tuna Commodities in Export Markets, years 2014-2015.

Jenis Olahan Tuna/ *Tuna Comodities*	Perubahan Harga (%)/*Changes Prices (%)*						Rata-Rata/ *Average*
	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	
Tuna Segar/ *Fresh*	0.00	0.00	0.00	-73.09	184.11	269.40	63.40
Tuna Beku/*Frozen*	0.00	0.00	0.00	105.41	-69.42	-46.81	-1.80
Tuna Kaleng/ *Canned*							

Sumber: Data LPPMHP Jakarta diolah (2015)/ *Source: Data LPPMHP Jakarta (2015)*

Tabel 12 menunjukan perubahan harga komoditas tuna Indonesia di pasar ekspor. Perubahan harga ini dilihat berdasarkan jenis tuna (segar, beku dan kaleng). Secara rinci rata-rata perubahan harga untuk tuna segar mengalami kenaikan sebesar 63,44%, sedangkan untuk komoditas tuna beku mengalami penurunan sebesar 1,80 %. Jika dilihat secara rinci perubahan harga komoditas tuna segar pada bulan Januari terjadi penurunan harga sebesar 73,09%, kemudian meningkat secara signikan pada bulan Februari sebesar 184,11%, dan kembali meningkat pada bulan Maret sebesar 269,40%. Perbandingan harga untuk komoditas Tuna beku pada bulan Januari mengalami kenaikan harga sebesar 105,41%, kemudian mengalami penurunan sebesar 69,42% pada bulan Februari dan 46,81% pada bulan Maret. Secara umum yang mengalami perubahan signifikan adalah harga tuna segar yang secara rata-rata naik sebesar 63,40%, namun hal ini juga dibarengi dengan penurunan volume ekspor komoditas tuna segar dari DKI Jakarta yang disebabkan sulitnya bahan baku yang memenuhi standar kualitas ekspor tuna segar.

PENUTUP

Tuna merupakan salah satu komoditas perikanan yang memiliki nilai ekonomis tinggi. Seiring dengan adanya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 56 tentang adanya Moratorium Kapal Eks Asing menimbulkan beberapa dampak terhadap Pasar Tuna di lokasi penelitian sebagai berikut.

1. Berdasarkan data dari PPSNZJ diketahui bahwa hanya ada 15 kapal eks asing yang berpangkalan di DKI Jakarta dan sebagian besar di antaranya sudah tidak beroperasi sehingga dampak dari Permen KP 56 tahun 2014 tentang Moratorium Perizinan Usaha Perikanan Tangkap tidak berdampak signifikan terhadap ekspor dari DKI Jakarta.
2. Secara rata-rata pada triwulan ke empat (oktober-desember) sejak diberlakukanya Permen KP 56 tahun 2014 volume ekspor tuna mengalami penurunan sebesar 16% namun mengalami peningkatan sebesar 3% pada triwulan 1 (bulan januari sampai Maret) .
3. Komoditas ekspor tuna dari daerah DKI Jakarta terdiri dari tuna segar dan tuna beku, dimana pada triwulan 4 (oktober-desember) tuna segar mengalami penurunan sebesar 23% dan 27% pada triwulan 1 (januari-maret)
4. Komoditas ekspor tuna beku yang berasal dari DKI Jakarta mengalami penurunan sebesar 10% pada triwulan 4 (oktober-desember) namun mengalami peningkatan sebesar 33% pada triwulan 1 (januari-maret)
5. Penurunan volume ekspor secara signifikan dialami oleh komoditas tuna segar terutama pada bulan Oktober, Januari dan Maret.. Sedangkan untuk tuna beku justru mengalami kenaikan volume ekspor pada bulan Desember, Januari dan Maret.
6. Rata-rata perubahan harga untuk tuna segar pada periode pemberlakuan permen KP 56 tahun 2014 mengalami kenaikan sebesar 63,40% sedangkan tuna beku justru mengalami penurunan sebesar 1,80%
7. Pelaku usaha di DKI Jakarta lebih mengeluhkan kebijakan pelarangan *transshipment* yang menyebabkan kesulitan memperoleh kualitas bahan baku tuna segar sehingga banyak mengalihkan produksinya menjadi tuna beku. Selain itu kebijakan tersebut juga berkaitan dengan efisiensi biaya operasional.

Penurunan volume produksi yang dapat berdampak pada penurunan volume ekspor hendaknya diimbangi dengan adanya peningkatan harga ekspor sehingga nilai ekspor tidak mengalami penurunan. Jika terjadi penurunan maka dapat berdampak pada penerimaan devisa negara yang secara makro dapat menyebabkan penurunan kontribusi PDB dari sektor perikanan. Pemberlakuan Permen KP 56 tahun 2014 tentang Moratorium Perizinan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia yang diperpanjang berlakunya dengan penerbitan Permen KP 10 Tahun 2015 tentang perubahan Permen KP 56 Tahun 2014 berdasarkan hasil kajian dihasilkan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Perlu disiapkan armada penangkapan ikan dari lokal dan penguatan SDM. Hal ini disebabkan karena terdapat potensi yang tidak termanfaatkan pada daerah penangkapan tertentu yang sebelumnya banyak beroperasi kapal eks asing karena pelarangan kapal eks asing tidak disiapkan armada pengganti untuk memanfaatkan sumberdaya tersebut
2. Perlu evaluasi terhadap pelarangan kapal eks asing. Harus dilakukan verifikasi secara benar dan pengawasan melekat terhadap kepemilikan kapal tersebut apabila memang

dikelola dan dimanfaatkan oleh WNI diperbolehkan untuk beroperasi

3. Perlu pemberlakuan pelaporan SHTI bagi semua pelaku usaha penangkapan ikan untuk menjamin asal-usul kapal tidak hanya terbatas bagi pelaku usaha dengan tujuan ekspor Uni Eropa, hal ini akan mempermudah mekanisme pengawasan pencatatan data ikan dan membantu apabila akan dilakukan kebijakan kuota terhadap sumberdaya.
4. Peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan moratorium kapal eks asing sehingga tepat sasaran

DAFTAR PUSTAKA

Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (Ditjen P2HP). 2014. Statistik Ekspor Komoditas Perikanan Indonesia 2013. Kemeterian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Dunn, W. N. 2003.. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Edisi Kedua.. Yogyakarta: Gajahmada University Press.687 hlm http://finance.detik.com/read/2015/02/06/143512/2825834/4/dampak-kebijakan-menteri-susi-dari-1300-kapal-eks-asing-hanya-67-yang-berlayar.

Kurniawan, A. 2014. Susi Usul Subsidi untuk Kapal Besar Dihapuskan. http://www.indopos.co.id/2014/11/susi-usul-subsidi-untuk-kapal-besar-dihapuskan.html.

Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan [LPPMHP]. 2015. Data Volume Ekspor Komoditas Perikanan di Indonesia. Jakarta

Nikijuluw, V. 2008. Dimensi Sosial Ekonomi Perikanan Ilegal (Blue Water Crime). Jakarta : Penerbit PT. Pustaka Cidesindo

Nurhayat, W. 2014. 2014. Menteri Susi: Kerugian Akibat Illegal Fishing Rp 240 Triliun.

Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman (PPSNZ). 2014. Buku Statistik 2013 Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. Jakarta

Susanto, I. 2015. Tuna Indonesia Dihargai Lebih Tinggi. http://www.koran-sindo.com/read/973227/150/tuna-indonesia-dihargai-lebih-tinggi-1425693969

VALUASI EKONOMI SUMBERDAYA DI TELUK PALU, KOTA PALU, PROVINSI SULAWESI TENGAH

Valuation of Resources Economic In Palu Bay, City of Palu, Province of Central Sulawesi

[*]Fachruddin Hari Anggara Putera dan Alfiani Eliata Sallata

Dosen Fakultas Peternakan dan Perikanan Univeristas Tadulako
Jl. Soekarno Hatta Km. 9 Palu – Sulawesi Tengah
Telp : 0451-422611 Fax: 0451-422844
[*]email: fachruddinharianggaraputera@gmail.com

Diterima 3 September 2015 - Disetujui 27 Nopember 2015

ABSTRAK

Teluk Palu merupakan sumberdaya yang memiliki nilai ekonomi dan ekologi yang sangat besar. Di samping itu, Teluk Palu sebagai sumber penghidupan bagi nelayan setempat. Penelitian valuasi ekonomi telah dilakukan pada bulan Mei – Juni 2015 di Teluk Palu. Tujuan penelian ini untuk mengetahui valuasi ekonomi sumberdaya Teluk Palu. Pengamatan dilakukan dengan metode pengumpulan data di lapangan dan data dianalisis secara deskriptif analitik yang disajikan dalam bentuk tabulasi. Berdasarkan hasil kajian, didapat hasil bahwa Total nilai ekonomi sumberdaya Teluk Palu adalah sebesar Rp. 35.846.290.000,- per tahun. Sektor Perikanan memberikan kontribusi sebesar Rp. 13.104.000.000,- per tahun. Sektor Pariwisata dengan nilai ekonomi sebesar Rp. 2.422.750.000,- per tahun. Fungsi Terumbu Karang sebagai physical protection global life sebesar Rp. 20.319.540.000,- per tahun. Berdasarkan kenyataan tersebut diatas, selain memberikan fungsi ekologi, sumberdaya Teluk Palu juga memberikan nilai ekonomi yang sangat tinggi.

Kata Kunci: valuasi ekonomi, Teluk Palu, Palu

ABSTRACT

Palu Bay has a super big of economic and ecology values. Beside that, Palu Bay is a life resources of fishermen. Study on economic valuation was carried out in May – Juny 2015 in Palu Bay. The aim of this study is to know economic valuation of resources in Palu Bay. Observation has been done by using data collection in the field and data analysis by analitic description, which are presented in tabulation form. Based on study, the total economic valuation was Rp. 35.846.290.000,- per year. Fisheries sector provides the economic value of Rp. 13.104.000.000,- per year. Tourism sector, which was economic value Rp. 2.422.750.000,- per year. Function of coral reef ecosystem was a physical protection global life, which was valuated Rp. 20.319.540.000,- per year. Based on this fact, beside giving ecological function, resources of Palu Bay also gave a very high economic value.

Keywords: economic valuation, Palu Bay, Palu

PENDAHULUAN

Ekosistem sumberdaya pesisir merupakan salah satu ekosistem sumberdaya yang sangat penting bagi masyarakat khususnya bagi masyarakat pesisir. Ekosistem sumberdaya pesisir tersebut antara lain ekosistem mangrove, lamun, terumbu karang, dan pantai. Ekosistem tersebut memiliki 4 fungsi pokok bagi kehidupan manusia yaitu sebagai jasa-jasa pendukung kehidupan, jasa-jasa kenyamanan, penyedia sumberdaya alam, dan penerima limbah (Bengen, 2004). Oleh karena itu, pemanfaatan ekosistem tersebut harus dilakukan secara hati-hati. Kerusakan pada salah satu ekosistem tersebut dapat menganggu keseimbangan pada ekosistem lainnya. Dengan demikian, pengelolaan ekosistem tersebut harus dilakukan secara terpadu (Dahuri *et al.,* 2008).

Teluk Palu adalah sebuah ekosistem teluk yang berada di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. Keberadaan Teluk Palu bagi masyarakat Kota Palu adalah sangat penting. Semua lapisan masyarakat, baik masyarakat pesisir sampai dengan masyarakat yang tinggal di daerah perkotaan Kota Palu memanfaatkan keberadaan Teluk Palu ini untuk berbagai aktivitas. Mulai aktivitas penangkapan ikan, berenang, snorkeling, diving, kegiatan wisata olahraga air seperti jetski, berjualan makanan dan minuman (cafe), jogging, bersepeda, hingga menikmati sunrise, sunset, dan suasana malam hari di Teluk Palu. Berbagai kegiatan pemanfaatan ini tentunya harus dinilai secara ekonomi agar input kebijakan pengelolaan Teluk Palu dilakukan secara komprehensif dalam konteks manfaat (*benefit*) dan kerugiannya (*cost*). Hal ini dilakukan karena berbagai kegiatan pemanfaatan ini dapat menimbulkan potensi konflik.

Pengelolaan Teluk Palu tentu saja menginginkan adanya pembangunan ekonomi di wilayahnya, namun demikian pada saat yang sama dipahami pentingnya kelestarian sumberdaya alam pesisir dan laut Teluk Palu. Dengan kata lain, pengelolaan Teluk Palu diasumsikan memiliki tujuan untuk mengetahui manfaat dan kerugian dari ekosistem Teluk Palu yang nantinya dapat didistribusikan secara adil dan merata kepada seluruh *stakeholder* Teluk Palu. Dalam konteks inilah perlunya pendekatan valuasi ekonomi Teluk Palu.

Selanjutnya, peran valuasi ekonomi terhadap ekosistem sumberdaya yang terkandung di dalamnya adalah penting dalam kebijakan pembangunan, termasuk dalam hal ini pengelolaan sumberdaya pesisir dan lautan. Hilangnya ekosistem atau sumberdaya lingkungan merupakan merupakan masalah ekonomi karena hilangnya ekosistem berarti hilangnya kemampuan ekosistem tersebut untuk menyediakan barang dan jasa serta berbagai fungsi dari ekositem tersebut. Pilihan kebijakan pembangunan yang melibatkan ekosistem apakah akan dipertahankan seperti apa adanya, atau di konversi menjadi pemanfaatan lain merupakan persoalan pembangunan yang dapat dipecahkan dengan pendekatan valuasi ekonomi. Tujuan penelitian ini adalah untuk melakukan penilaian ekonomi dari ekosistem sumberdaya Teluk Palu yang dapat digunakan untuk merencanakan pengelolaan Teluk Palu yang berkelanjutan.

METODOLOGI

Penelitian ini dilakukan pada bulan Mei sampai Juni 2015 di wilayah Teluk Palu, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah.

Pengumpulan data penelitian menggunakan metode wawancara mendalam mengenai hal-hal yang berkaitan dengan keberadaan sumberdaya Teluk Palu. Kemudian dilanjutkan dengan observasi langsung di lapangan mengenai kegiatan-kegiatan pemanfaatan yang terdapat di Teluk Palu. Penentuan responden dilakukan secara *purposive sampling*.

Nilai ekonomi total (*Total Economic Value*) sumberdaya Teluk Palu dianalisis dengan menggunakan metode valuasi ekonomi. Valuasi ekonomi sumberdaya Teluk Palu bertujuan untuk mengetahui nilai-nilai ekonomi yang terkandung dari keberadaan ekosistem sumberdaya di lokasi penelitian, baik nilai manfaat langsung (*Direct Use Value*) maupun nilai manfaat tidak langsung (*Indirect Use Value*). Dengan demikian, nilai ekonomi total sumberdaya Teluk Palu dapat dituliskan sebagai berikut: *TEV* = *DUV* + *IUV* (Adrianto 2006; Fauzi dan Anna 2005; Kusumastanto 2000a, 2000b, 2004; Winpenny 1991).

VALUASI EKONOMI SUMBERDAYA TELUK PALU

Ekosistem sumberdaya pesisir dan laut Teluk Palu termasuk salah satu ekosistem yang kompleks karena pada ekosistem ini terdapat berbagai macam aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat yang jika tidak di kelola dengan bijak maka akan menyebabkan terjadinya konflik pemanfaatan sumberdaya

tersebut. Peran valuasi ekonomi sumberdaya Teluk Palu ini adalah untuk menilai ekonomi sumberdaya Teluk Palu tersebut, sehingga berbagai aktivitas pemanfaatan sumberdaya tersebut yang dilakukan oleh *stakeholders* dapat berjalan bersama-sama tanpa harus mengorbankan bahkan mematikan kegiatan ekonomi lainnya. Peran valuasi ekonomi ini adalah untuk memberikan kesadaran kepada setiap *stakeholders* tersebut bahwa setiap aktivitas tersebut memiliki nilai ekonomi yang sangat penting bagi kehidupannya.

Nilai ekonomi yang terkandung dalam ekosistem sumberdaya pada dasarnya terdiri atas nilai manfaat langsung (*direct use value*) dan nilai manfaat tidak langsung (*indirect use value*). Nilai manfaat langsung (*direct use value*) adalah *output* (barang dan jasa) yang terkandung dalam ekosistem Teluk Palu yang secara langsung dapat dimanfaatkan, seperti ikan, udang, kepiting, dll. Nilai ini didapatkan dengan melakukan survey langsung ke masyarakat untuk mengetahui jumlah tangkapan dan harga jual dari masing-masing komoditi yang dihasilkan. Sebagai contoh, nilai manfaat ekosistem sebagai penghasil ikan, dianalisis dengan menggunakan metode Nilai Pasar (*Market Value*). Nilai pasar dari tiap nilai manfaat langsung dari ikan misalnya, merupakan nilai bersih (nilai bersih = pendapatan – biaya operasional). Sedangkan nilai manfaat ekosistem untuk fungsi kawasan wisata menggunakan metode analisis biaya perjalanan (*Travel Cost Method*). Analisis dengan metode biaya perjalanan yakni menjumlahkan biaya perjalanan pulang pergi, makan, dan penginapan dari setiap pengunjung.

Nilai manfaat tidak langsung (*indirect use value*) adalah *output* (barang dan jasa) yang ada karena keberadaan ekosistem Teluk Palu yang tidak secara langsung dapat diambil dari sumberdaya alam tersebut, misalnya tempat pemijahan ikan, pembesaran, mencari makan, peredam ombak, dan lain-lain. Nilai ini dihitung dengan substitusi fungsi tiap variable fungsi tersebut atau biasa juga disebut dengan metode pendekatan biaya pencegahan. Misalnya fungsi sumberdaya sebagai peredam ombak dapat dihitung dengan pendekatan biaya pembangunan alat pemecah ombak.

KUANTIFIKASI MANFAAT LANGSUNG

Nilai manfaat langsung yang dinilai dari keberadaan Teluk Palu terdiri atas nilai sumberdaya perikanan sebagai penghasil produk hasil perikanan dan nilai kunjungan wisatawan yang diperolah dari kunjungan wisatawan untuk melakukan berbagai aktivitas yaitu berenang, snorkeling, olahraga jetski, jogging, bersepeda, dan kunjungan wisatawan ke cafe-cafe yang berada di Teluk Palu.

PRODUKSI PERIKANAN

Produksi perikanan Teluk Palu berasal dari masyarakat nelayan yang memanfaatkan Teluk Palu sebagai daerah penangkapan ikan. Berdasarkan hasil survei dan wawancara diperoleh informasi bahwa hasil tangkapan nelayan di wilayah Teluk Palu sebagian besar berupa ikan cakalang, tongkol, katombo, rumah-rumah, dan ekor kuning. Total produksi perikanan laut tersebut adalah sebesar 2.673,04 ton per tahun.

Nelayan yang beroperasi di wilayah Teluk Palu adalah sebagian besar nelayan tradisional yang pada umumnya menggunakan perahu tak bermotor sebanyak 523 (jukung sebanyak 271 dan papan sebanyak 252), perahu motor tempel sebanyak 141, kapal motor sebanyak 2, dan tanpa perahu sebanyak 62. Adapun alat tangkap yang digunakan terdiri atas pukat pantai sebanyak 25, jaring insang hanyut sebanyak 136, jaring insang tetap sebanyak 88, pancing sebanyak 406, dan perangkap sebanyak 10. Jumlah keseluruhan Rumah Tangga Perikanan nelayan yang beroperasi di Teluk Palu adalah sebanyak 728 RTP.

Perhitungan pendapatan nelayan yaitu dengan menggunakan jumlah hari kerja efektif perbulan. Keadaan Teluk Palu yang relatif tertutup membuat kondisi perairannya relatif tenang sehingga sangat jarang ditemukan ombak yang besar membuat nelayan hampir tiap harinya melaut sehingga pendapatan nelayan pun selalu hampir sama tiap harinya. Berdasarkan hal tersebut, diketahui bahwa hasil pendapatan nelayan perbulan sebesar Rp. 1.500.000 atau sebesar Rp. 18.000.000 pertahun. Dengan demikian, total penghasilan nelayan yang terdiri atas 728 RTP dalam setahun adalah sebesar Rp. 13.104.000.000.

PARIWISATA

Teluk Palu merupakan salah satu teluk yang sangat strategis sebagai objek wisata yang ada di Indonesia. Hal ini disebabkan karena Teluk Palu memiliki pemandangan yang sangat indah dan dari Teluk Palu dapat terlihat pemandangan seluruh Kota Palu. Dari Teluk Palu tersebut juga dapat

melihat sunrise maupun sunset dan keindahan malam hari Teluk Palu. Disamping itu, berbagai kegiatan juga dapat dilakukan di sepanjang pesisir Teluk Palu, seperti berenang, snorkeling, diving, olahraga jetski, jogging, dan bersepeda. Letaknya yang strategis ini membuat Teluk Palu menjadi primadona bagi wisatawan baik dalam maupun luar negeri untuk datang ke Kota Palu.

Perhitungan nilai manfaat ekosistem untuk fungsi kawasan wisata menggunakan metode analisis biaya perjalanan (*Travel Cost Method*). Analisis dengan metode biaya perjalanan yakni menjumlahkan biaya perjalanan pulang pergi, makan, dan penginapan dari setiap pengunjung. Data yang diperoleh didapatkan bahwa jumlah wisatawan yang berasal dari dalam maupun luar negeri berjumlah 48.455 orang dengan rincian sebanyak 47.431 orang merupakan pengunjung domestik, dan sebanyak 1.024 orang adalah berasal dari wisatawan mancanegara. Total biaya perjalanan diperoleh sebesar Rp. 50.000. Dengan demikian, besarnya nilai ekonomi ekosistem Teluk Palu sebagai kawasan wisata dari kunjungan wisatawan baik dalam maupun luar negeri adalah sebesar Rp. 2.422.750.000.

KUANTIFIKASI MANFAAT TIDAK LANGSUNG

Nilai manfaat tidak langsung didapatkan dari nilai yang dapat diidentifikasi dari keberadaan ekosistem terumbu karang di Teluk Palu berupa peran penting dari ekosistem tersebut sebagai perlindungan fisik (*physical protection global life*). Manfaat tidak langsung dari keberadaan ekosistem terumbu karang sebagai pemecah gelombang disetimasi melalui biaya pengganti (*replacement cost*) pembangunan bangunan pemecah gelombang (*break water*). Hal ini dikarenakan bangunan pemecah gelombang tersebut sudah dapat menggantikan fungsi dari terumbu karang sebagai pemecah gelombang pada sepanjang garis pantai Teluk Palu.

Menurut data Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Sulawesi Tengah tahun 2014, untuk membuat bangunan pemecah gelombang dengan ukuran 50 m x 2 m x 2,5 m (p x l x t) diperlukan biaya sebesar Rp. 33.865.900 atau sekitar Rp. 677.318 per meter. Panjang garis pantai yang dilindungi oleh terumbu karang yaitu 30.000 meter. Nilai dari biaya pembuatan *breakwater* tersebut kemudian dikalikan dengan panjang garis pantai yang terlindungi oleh terumbu karang yaitu sepanjang 30.000 meter. Dengan demikian, nilai manfaat tidak langsung kawasan ekosistem terumbu karang di kawasan Teluk Palu sebagai pemecah gelombang tersebut adalah sebesar Rp. 20.319.540.000.

TOTAL NILAI EKONOMI

Perhitungan total nilai ekonomi Teluk Palu didasarkan pada manfaat langsung maupun manfaat tidak langsung dari keberadaan ekosistem sumberdaya Teluk Palu tersebut sebagai kawasan perikanan tangkap, kawasan wisata, dan keberadaan ekosistem terumbu karang. Dengan demikian, total kontribusi ekonomi yang diberikan sumberdaya Teluk Palu kepada masyarakat dan pemerintah adalah sebesar Rp. 35.846.290.000. Rekapitulasi total nilai ekonomi sumberdaya Teluk Palu tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Rekapitulasi Total Nilai Ekonomi Sumberdaya Teluk Palu.
Table 1. Summary of Total Value Resources Economics Palu Bay.

No	Penggunaan/*Use*	Jenis Manfaat/ *Benefit Type*	Nilai Ekonomi Per tahun/ *Economic Value Per year*
1	Penggunaan ekstraksi/ *Extraction use*		
	Perikanan/*Fisheries*	Manfaat Langsung/*Direct Benefits*	Rp. 13.104.000.000
2	Penggunaan non ekstraksi/ *Non Extraction Use*		
	Pariwisata/*Tourism*	Manfaat Langsung/*Direct Benefits*	Rp. 2.422.750.000
3	Jasa Lingkungan/ *Environmental Services*		
	Perlindungan Fisik Pantai/ *physical protection global life*	Manfaat tidak langsung/ *Indirect Benefits*	Rp. 20.319.540.000
Total Nilai Ekonomi/*Total Economic Value*			**Rp. 35.846.290.000**

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh nilai ekonomi total ekosistem sumberdaya Teluk Palu adalah sebesar Rp. 35.846.290.000 per tahun, yang dihitung dari manfaat langsung (Rp. 15.526.750.000 per tahun) dan manfaat tidak langsung (Rp. 20.319.540.000 per tahun). Dengan memperhatikan nilai ekonomi total yang diperoleh dari ekosistem sumberdaya Teluk Palu, ternyata sumberdaya Teluk Palu mempunyai manfaat dan fungsi yang penting sebagai semberdaya ekonomi maupun sumberdaya ekologi bagi masyarakat maupun pemerintah. Oleh karena itu keberadaan Teluk Palu harus tetap dipelihara sebagai aset pembangunan, baik itu oleh masyarakat setempat maupun pihak lain seperti pemerintah, swasta, peneliti dan LSM, sehingga kegiatan pembangunan dapat berjalan dengan baik dan ketersediaan sumberdaya Teluk Palu tetap terjamin.

PERSANTUNAN

Tulisan ini didanai oleh DIPA Universitas Tadulako yang dialokasikan pada Fakultas Peternakan dan Perikanan. Penulis mengucapkan terima kasih kepada Rektor Universitas Tadulako yang telah mengalokasikan dana untuk kegiatan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Adrianto L. 2006. Pengantar Penilaian Ekonomi Sumberdaya Pesisir dan Laut. Bogor: Departemen Manajemen Sumbedaya Perairan. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB. Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan IPB. Bogor.

Bengen DG. 2004. Sinopsis Ekosistem Sumberdaya Alam Pesisir dan Laut Serta Prinsip dan Pengelolaannya. Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan (PKSPL) IPB, Bogor.

Dahuri R, Rais J, Ginting SP, Sitepu MJ. 2008. Pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir dan lautan secara terpadu. PT Pradnya Paramitha. Jakarta.

Fauzi A dan Anna S. 2005. Pedoman Valuasi Ekonomi Kawasan Konservasi Laut (KKL). Departemen Kelautan dan Perikanan, Direktorat Konservasi, Ditjen Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Kusumastanto T. 2004. Penilaian Ekonomi Keane-karagaman Hayati Wilayah Pesisir dan Lautan. Jakarta. 78 hal.

Kusumastanto T. 2000a. Valuasi Ekonomi dan Analisis Manfaat Biaya Pemanfaatan Sumberdaya Pulau-Pulau Kecil. Jurnal Ekonomi Lingkungan. Center for Economic and Environmental Studies. Jakarta. 82 hal.

Kusumastanto T. 2000b. *Ekonomi Sumberdaya Alam dan Lingkungan*. Institut Pertanian Bogor. 56 hal.

Winpenny JT. 1991. Values For The Environment. London. 201 pp.

PENINGKATAN KAPASITAS FASILITAS FUNGSIONAL MELALUI PROGRAM MINAPOLITAN DI PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA (PPN) PEKALONGAN, JAWA TENGAH

Enhancement the Capacity of Functional Facilities Through Minapolitan Program In Nusantara Fishery Port (PPN) Pekalongan, Central Java

***Reza Kukuh Febrianto, Abdul Kohar Mudzakir dan Abdul Rosyid**

Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Diponegoro
Jl. Prof.Soedharto, SH. Tembalang, Semarang
*email: arezaccelera07@gmail.com

Diterima 25 Januari 2014 - Disetujui 8 November 2015

ABSTRAK

Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pekalongan Kota Pekalongan merupakan Unit Pelaksana Teknis dibawah Kementrian Kelautan Perikanan dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi fasilitas fungsional, menganalisis program Minapolitan di PPN Pekalongan dan menganalisis tingkat pemanfaatan fasilitas fungsional, Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitik dengan pengambilan sampel *Purposive sampling* dengan teknik non probability sampling dan kuota sampling kemudian menggunakan analisa tingkat pemanfaatan, analisa likerts dan analisa SWOT . Hasil penelitian diperoleh dari analisis likerts responden non pegawai atau masyarakat sekitar pengguna pelabuhan, nilai skor pemanfaatan fasilitas pelabuhan 3,1 dan responden pegawai pelabuhan, nilai skor pemanfaatan fasilitas pelabuhan berkisar antara 3,9 dengan hasil baik. Hasil perhitungan tingkat pemanfaatan TPI 14,04%, areal parkir 21,63%, dan Bak air bersih 60%. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa tingkat pemanfaatan fasilitas fungsional secara keseluruhan belum termanfaatkan secara optimal. Hasil analisa SWOT total skor pada faktor internal dan eksternal matrik. Dari perhitungan skoring faktor total nilai skor untuk faktor internal didapatkan 3,09 sedangkan untuk faktor eksternal didapatkan 2,86 yang untuk selanjutnya ditempatkan pada matrik didapatkan pada kuadran I yaitu strategi S-O (*strength-opportunity*). Strategi ini dibuat untuk menggunakan seluruh kekuatan untukmemanfaatkan peluang yang ada.

Kata Kunci: fasilitas fungsional, minapolitan, PPN Pekalongan, pengembangan

ABSTRACT

Pekalongan Archipelagic Fishing Port a Technical Implementation Unit under the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries is responsible to the Directorate General of fisheries. Over the last 5 years emerging issues concerning the implementation of the program at the Pekalongan Archipelagic Fishing Port. It is caused by disagreement between the respective stakeholders involved in the implementation of this program. This study aims to identify functional facilities, then develop a program to analyze the utilization rate Minapolitan and functional facilities in PPN Pekalongan. The method used in this research is descriptive analytic method of sampling quota sampling and then use the analysis of the level of utilization, Likerts analysis and SWOT analysis. The results were obtained from analysis of respondents Likerts non employees or the community around the port, the port facility utilization score of 3.1 and the respondent employees of the port, the port facility utilization score value ranging between 3.9 with good results. The calculation result TPI utilization rate 14.04%, 21.63% parking area, and Bak 60% clean water. From these results it can be concluded that the utilization rate of the overall functional facility has not been utilized optimally. SWOT analysis results of the total score on the internal and external factors matrix. From the calculation of the total value of scoring factor scores obtained for internal factor of 3.09 while for external factors to obtain 2.86 which subsequently placed on the matrix obtained in the first quadrant is SO strategy (strength-opportunity). This strategy is made to use the whole power untuk memanfaatkan opportunities.

Keywords: functional facilities, minapolitan, Pekalongan Archipelagic Fishing Port, development

PENDAHULUAN

Selama 5 tahun terakhir muncul permasalahan-permasalahan tentang pelaksanaan program minapolitan di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pekalongan. Program yang diinisiasi oleh pemerintah, pengembangan minapolitan membutuhkan strategi yang tepat berdasarkan faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dan faktor eksternal (peluang dan ancaman). Strategi tersebut perlu diterjemahkan ke dalam seperangkat ukuran dan target yang jelas dan menyeluruh yang memberi kerangka kerja bagi pelaksana program maupun *stakeholder* terkait lainnya agar visi, tujuan dan strategi dapat tercapai secara optimal.

Konsep minapolitan diuraikan sebagai kota perikanan berbasis pembangunan ekonomi kelautan dan perikanan wilayah melalui pendekatan dan sistem manajemen kawasan yang terintegrasi, efisien, berkualitas, dan berakselerasi tinggi. Kawasan Minapolitan adalah suatu bagian wilayah yang mempunyai fungsi utama ekonomi terdiri dari sentra produksi, pengolahan, pemasaran komoditas perikanan, pelayanan jasa, dan/atau kegiatan pendukung lainnya.

Pada tahun 2010, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menetapkan 197 kabupaten/ kota dalam rangka kegiatan terpadu pembangunan perikanan berbasis kawasan dengan konsepsi Minapolitan dan menetapkan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pekalongan sebagai lokasi proyek minapolitan perikanan tangkap. Minapolitan merupakan sebuah konsep pembangunan kelautan dan perikanan yang berbasis wilayah dengan pendekatan sistem manajemen kawasan untuk mendorong peningkatan produksi perikanan sekaligus mendorong pusat pertumbuhan ekonomi didaerah tersebut (Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 32 Tahun 2010).

Pihak pemerintah kota juga ikut andil dalam pengembangan minapolitan dengan mengeluarkan SK Walikota Nomor 523/138 bahwa pemerintah kota mendukung pengembangan ekonomi strategis berbasis perikanan dengan konsepsi minapolitan, dan menentukan dan menetapkan kawasan minapolitan yang meliputi zona inti, zona pendukung dan zona terkait. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi fasilitas fungsional PPN Pekalongan, menganalisis program Minapolitan di PPN Pekalongan dan menganalisis tingkat pemanfaatan fasilitas fungsional yang ada di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan Kota Pekalongan.

METODOLOGI

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yaitu metode yang mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data sampel atau populasi sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku secara umum. Data yang diperoleh dapat melalui observasi, wawancara atau dokumentasi (Sugiono, 2005).

Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang didapatkan secara langsung dari obyek penelitian primer terdiri dari data Observasi langsung ke Pelabuhan Perikanan Nusantara terkait kondisi fasilitas sarana prasarana yang ada, Data hasil wawancara dengan kuisioner kepada pedagang, nelayan dan bakul terkait kondisi fasilitas kekurangan, kelebihan, serta kendala fasilitas yang tersedia di PPN Pekalongan, Dokumentasi penelitian berupa foto fasilitas sarana prasarana yang ada di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan dan Wawancara dengan kuisioner kepada Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan, Kepala Dinas Perikanan Kota Pekalongan *Strength, Weakness, Opportunity,* dan *Treath* dari faktor internal dan eksternal di PPN Pekalongan.

Data sekunder terdiri dari Buku laporan tahunan sumber PPN Pekalongan, Buku data statistic sumber PPN Pekalongan, Brosur dan pamflet berisi Profil sumber PPN Pekalongan, LAKIP Laporan Kinerja Instansi Pemerintah PPN Pekalongan sumber PPN Pekalongan dan Buku Rakor Minapolitan sumber Pemerintah Kota Pekalongan. Penelitian ini telah dilaksanakan pada bulan April 2015 di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan Kota Pekalongan Jawa Tengah.

Metode Pengambilan Sampel

Metode pengambilan sampel digunakan dengan teknik *non probability sampling* dan metode *sampling kuota*. Menurut Sugiyono (2012), metode *sampling kuota* adalah teknik menentukan sampel populasi sampai jumlah (kuota) diinginkan. Roscoe (1982) *dalam* Sugiyono (2012) memberikan saran-

saran ukuran sampel untuk penelitian salah satunya adalah ukuran sampel yang layak dalam penelitian adalah antara 30 sampai dengan 500.

Metode Analisis Data

1. Analisis Likerts

Dalam analisis tingkat kepuasan digunakan penilaian dengan menggunakan skala Likert's. Langkah-langkah dalam penggunaan skala Likert's adalah :

- penetapan fasilitas fungsional yang akan diteliti;
- menentukan indikator-indikator yang dapat mengukur variabel yang diteliti; dan
- menurunkan indikator tersebut menjadi daftar pertanyaan.

Skala likert *dalam* Budiaji (2013) menggunakan beberapa butir pertanyaan mengukur perilaku individu dengan merespon 5 titik pilihan setiap butir pertanyaan, sangat setuju, setuju, tidak memutuskan, tidak setuju, dan sangat tidak setuju.Karena dalam skala Likert's skor yang diberikan pada jawaban sering dijumlahkan, maka skala Likert's sering disebut dengan *Likert's Summated Rating* menurut Suliyanto (2005) *dalam* Prasojo *et al.* (2015).

Berdasarkan indikator di atas didapatkan kriteria sebagai berikut (Tabel 2):

2. Analisis tingkat pemanfaatan

Perhitungan dalam Yahya *et al.* (2013), untuk mencari tingkat pemanfaatan dan kapasitas yang dimiliki oleh tiap fasilitas pelabuhan dapat menggunakan metode-metode sebagai berikut:

A. Luas gedung pelelangan

$$D = d + S + C$$

Dimana :

a = Rasio antara ruang lelang dengan gedung lelang/ *The ratio between the auction room with auction house*

R = Frekuensi pelelangan per hari/ *The frequency of auctions per day*

N = Jumlah produksi rata-rata per hari/ *The amount of the average production per day*

S = Luas gedung pelelangan (m^2)/ *Auction building area (m^2)*

P = Daya tampung ruang terhadap produksi (ton)/ *Space on the production capacity (tonnes)*

B. Areal Parkir:

$$L = P\,x\,R$$

D = Daya angkut tiap kendaraan kendaraan

R = Ruang gerak yang dibutuhkan

dimana:

P = jumlah produksi rata-rata per hari dalam 1 tahun

L = luas tempat parkir (m^2)

Tabel 1. Sampel Penelitian yang Dipergunakan.
Table 1. Used Research Sample.

1	Pemerintah daerah/ *Local government*	2	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, Badan Lingkungan Hidup Kota Pekalongan/ *Department of Marine and Fisheries Central Java province, the Environment Agency Pekalongan*
2	Pengelola PPN Pekalongan/ *Employees PPN Pekalongan in Pekalongan*	14	Pegawai di lingkungan PPN Pekalongan/ *Employees PPN Pekalongan environment.*
3	Masyarakat/ *People*	14	Nelayan, pengolah ikan/ *Fishermen, fish processors.*

Sumber: Hasil penelitian, 2015/ *Source: Research result, 2015*

Tabel 2. Skoring Skala Likert's.
Table 2. Likert's Scale Scoring.

Kriteria/ *Criteria*	Skoring/ *Scoring*
Sangat Kurang/ *Very less*	0 - 1
Kurang/ *Less*	1.01 - 2.0
Cukup/ *Enough*	2.01 - 3.0
Baik/ *Good*	3.01 - 3.5
Sangat Baik/ *Very good*	3.51 - 4.0

Sumber: Suliyanto (2005) *dalam* Prasojo *et al.* (2015)/ *Source: Suliyanto (2005) in Prasojo et al. (2015)*

C. Menara air dan bak air

$$V1 = (C1/C0)V$$

dimana:
V_1 = volume tangki
V_0 = ukuran fasilitas yang tersedia (m^2)
C_1 = besaran aktivitas (ton/hari) Menara air dan bak air
C_0 = kapasitas tersedia (ton/hari)

Untuk mengetahui tingkat pemanfaatan optimalisasi pemanfaatan fasilitas yang ada digunakan analisis presentasi pemanfaatan. Dalam Zain *et al.* (2011) analisis tingkat pemanfaatan fasilitas menggunakan formula sebagai berikut :

$$P = \left(\frac{Up}{Ut}\right) x\ 100\%$$

dimana :
P : tingkat pemanfaatan fasilitas
Up : ukuran fasilitas yang terpakai dengan kondisi yang ada
Ut : ukuran fasilitas yang tersedia

Menurut Mustari dan Dahri (2011), tingkat optimalisasi 0% - 40% artinya sangat kurang, 40,01% - 60% artinya sedang, 60,01% - 80% artinya baik, dan 80,01% - 100% artinya tingkat optimalisasi sangat baik. Pada fasilitas yang kapasitasnya tidak tentu, maka besarnya pemanfaatan dipertimbangkan secara subjektif.

3. Analisis SWOT

Sedang Rangkuti (2002), menerangkan proses yang harus dilakukan dalam pembuatan analisis SWOT perlu melalui tahapan sebagai berikut :

- Tahap pengambilan data, yaitu evaluasi faktor internal dan eksternal;
- Tahap analisis, yaitu pembuatan matriks internal eksternal matriks SWOT; dan
- Tahap pengambilan keputusan.

Rangkuti (2002), juga mengemukakan tahap pembuatan matriks internal eksternal adalah sebagai berikut :

- Kolom I dilakukan penyusunan terhadap semua faktor-faktor yang dimiliki oleh perusahaan dengan membagi menjadi dua bagian, yaitu internal /"IFE" (*Internal Factor Evaluation*) dan faktor eksternal /"EFE" (*Eksternal Factor Evaluation*);
- Pemberian bobot masing-masing faktor pada kolom 2, mulai dari 2,0 (sangat penting) sampai dengan 0,0 (tidak penting). Menurut Husein Umar bobot dapat ditentukan sebagai berikut :
- Bobot keterangan

  0,20 sangat kuat 0,05 di bawah rata-rata

  0,15 di atas rata-rata
  0,00 tidak terpengaruh

  0,10 rata-rata
- Kolom 3 diisi perhitungan rating terhadap faktor-faktor tersebut berdasarkan pengaruhnya terhadap kondisi PPN Pekalongan. Rentang nilai rating adalah 1 sampai 4, dimana perinciannya :

  1= sangat lemah 3 = cukup kuat

  2 = tidak begitu lemah 4 = sangat kuat
- Kolom 4 diisi dengan mengalikan bobot kolom 2 dengan rating pada kolom 3; dan
- Penjumlahan total skor pembobotan untuk masing-masing faktor internal dan eksternal. Strategi yang tepat bagi pengembangan PPN Pekalongan dapat diperoleh dengan meletakkan nilai tersebut pada kuadran yang yang tepat dan sesuai, kemudian dilakukan pembuatan matriks SWOT yang menjelaskan alternatif strategi yang dapat dilakukan.

KONDISI UMUM KOTA PEKALONGAN

Kota Pekalongan dibagi menjadi empat kecamatan yaitu Kecamatan Pekalongan Utara, Pekalongan Selatan, Pekalongan Barat dan Kecamatan Pekalongan Timur. Kecamatan yang memiliki pantai dan berbatasan langsung dengan laut (Laut Jawa) adalah Kecamatan Pekalongan Utara, tepatnya di Kelurahan Krapyak Lor, Kelurahan Panjang Wetan dan Kelurahan Kandang Panjang Kota Pekalongan terletak di dataran rendah pantai utara Pulau Jawa, ketinggiannya 1 meter di atas permukaan laut dengan posisi geografis antara 6º50'42''6º55'44''LS dan 109º37'55''109º42'19''BT. Batas batas wilayah administrative Kota Pekalongan sebagai berikut :

Utara : Laut Jawa
Selatan : Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Batang
Barat : Kabupaten Pekalongan
Timur : Kabupaten Batang

Luas Wilayah Kota Pekalongan 4.525 ha dengan topografis terletak di dataran rendah pantai Utara Pulau Jawa, dengan ketinggian antara 0 - 6 meter dpl dengan tanah berwarna agak kelabu jenis tanah aluvial kelabu kuning dan aluvial yohidromorf (Pekalongan, 2015).

Kegiatan pembangunan fisik penunjang minapolitan sudah dilakukan dan tertuang dalam RPJMD tahun 2010-2015 arah kebijakan umum akan tetap memprioritaskan pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi Berbasis Perikanan dengan Pengembangan Pelabuhan Perikanan *on shore*.

ANALISIS LIKERTS

Jumlah total pengambilan sampel sebanyak 30 orang yang terdiri dari pegawai PPN Pekalongan, Pemerintah Kota lalu beberapa pengguna sekitar areal pelabuhan itu sendiri. Hal ini diambil agar penilaian analisis likerts tidak hanya dari Internal saja melainkan juga melibatkan masyarakat dalam hal ini adalah pengguan fasilitas fungsional itu sendiri.

Hasil skorsing pemanfaatan fasilitas pelabuhan menurut para pengguna pelabuhan dapat dillihat pada Tabel 5.

Tabel 3. Kegiatan Pembangunan Fisik Fasilitas Penunjang Minapolitan.
Table 3. Physical Development Activities Supporting Minapolitan Facilities.

No.	Kegiatan Fisik/ *Physical activity*	TA	Sumber Pembiayaan/ *Source of financing*
1.	Pembebasan Lahan 47.400 m² / *47,400 m² Land Acquisition*	2011	APBN
2.	Pematangan Lahan / *Maturation Land*	2011	APBN
3.	Talud sisi barat / *Talud west side*	2011	APBN
4.	Talud sisi timur / *Talud east side*	2011	APBN
5.	Rehabilitasi breakwater timur / *Rehabilitation eastern breakwater*	2012	APBN
6.	Rehabilitasi breakwater barat / *Rehabilitation western breakwater*	2013	APBN
7.	Rehabilitasi MCK / *Rehabilitation MCK*	2013	APBN
8.	Peninggian lantai TPI / *TPI floor elevation*	2013	Perindo
9.	Pembuatan tanggul penahan banjir ROB di seputar darmaga bagian utara / *Making the ROB flood dike surrounding the northern part dock*	2013	Walikota Pekalongan/ *Mayor of Pekalongan*
10.	Pemeliharaan sarana prasarana/ *Maintenance of infrastructure*	2013	PPNP
11.	Peninggian jalan akses WR Supratman / *Access road elevation of WR Supratman*	2014	PU Provinsi/ *Public works province*

Sumber/ *Source*: LAKIP Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan 2014/ *LAKIP Nusantara Fishery Port Pekalongan, 2014*

Tabel 4. Sampel Penelitian yang dipergunakan.
Table 4. Used Research Sample.

1	Pemerintah daerah/ *Local government*	2	Pemerintah Kota Pekalongan
2	Pengelola PPN Pekalongan/ *Administrator of PPN Pekalongan*	14	Pegawai di lingkungan PPN Pekalongan/ *The staff of PPN Pekalongan*
3	Masyarakat/ *People*	14	Nelayan, pengolah ikan, tukang parkir, pedagang/ *Fishermen, fish processors, parking attendants, merchant*

Sumber/ *Source*: Hasil Penelitian, 2015/ *Research result, 2015*

Tabel 5. Pemanfaatan Fasilitas Fungsional Pelabuhan Non Pegawai PPN Pekalongan.
Table 5. Utilization Functional Ports Facilities of Ports Non-Employee of PPN Pekalongan.

No.	Pemanfaatan Fasilitas/ *Utilization of facilities*	Total Skor/ *Total Score*	Rata-rata skor/ *Average Score*
1	Perbengkelan/*Workshop*	50	3.3
2	Slip Way *(Docking)/ Slipway (Docking)*	47	3.1
3	Tempat Perbaikan / Penjemuran Jaring/ *Place Repair / Drying Nets*	49	3.3
4	Tempat Parkir/ *Parking lot*	49	3.3
5	Jaringan Instalasi Air/ *Water Network Instalation*	49	3.3
6	Tempat Pelelangan Ikan Higienis/ *Hygienic Fish Auction Place*	47	3.1
7	Tempat Peristirahatan Nelayan/ *Rest place Fishermen*	51	3.4
8	Pasar Pengecer Ikan/ *Retailers Fish Market*	44	2.9
9	Rumah Genset dan genset/ *Genset and home generator*	51	3.4
10	Balai Pertemuan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan/ *The meeting hall Nusantara Fishery Port Pekalongan*	45	3.0
11	Unit Pengolah Limbah/ *Waste Processing Unit*	46	3.1
12	Pos Pemeriksaan Terpadu/ *Integrated Checkpoint*	41	2.7
13	Gudang Perlengkapan/ *Warehouse Equipment*	44	2.9
14	Bangunan Penyaluran BBM/ *Fuel Distribution Buildings*	42	2.8
15	Drainase/ *Drainage*	46	2.9
16	Gudang Keranjang Ikan/ *Fish Basket Warehouse*	44	3.1
17	Pos Keamanan TPI/ *Security post TPI*	49	3.3
18	Jalan Komplek Pelabuhan *Ports Complex Road*	42	2.8
19	Gedung Laboratorium Mini/ *Mini Lab Building*	49	3.3
20	Gedung Pos Syahbandar Perikanan/ *Post building of Fisheries Shahbandar*	49	3.3
	Jumlah/*Total*	**934**	**3.1**

Sumber Hasil Analisis Lickert (2015)/*Source : Result of Lickert Analysis (2015)*

Berdasarkan tabel 5, dari responden non pegawai atau masyarakat sekitar pengguna pelabuhan, nilai skor pemanfaatan fasilitas pelabuhan berkisar antara 2,9-3,4. Berdasarkan tabel kriteria skorsing hal tersebut dikatakan cukup. Artinya pemanfaatan fasilitas fungsional yang ada di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan oleh pengguna sekitar pelabuhan sudah cukup puas untuk menunjang kegiatan Minapolitan perikanan tangkap di kota Pekalongan.

Hasil skorsing pemanfaatan fasilitas fungsional pelabuhan menurut pegawai dapat dillihat padaTabel 6. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada lampiran.

Tabel 6. Pemanfaatan Fasilitas Fungsional Pelabuhan Bagi Pegawai.
Table 6. Utilization of Functional Facilityof Port For Employees.

No.	Pemanfaatan Fasilitas/ *Utilization of Facilities*	Total Skor/ *Total Score*	Rata-rata skor/ *Average Score*
1	Perbengkelan/ *Workshop*	61	4.1
2	Slip Way *(Docking)/ Slipway (Docking)*	59	3.9
3	Tempat Perbaikan / Penjemuran Jaring/ *Place Repair / Drying Nets*	61	4.1
4	Tempat Parkir/ *Parking lot*	58	3.9
5	Jaringan Instalasi Air/ *Water Network Instalation*	59	3.9
6	Tempat Pelelangan Ikan Higienis/ *Hygienic Fish Auction Place*	56	3.7
7	Tempat Peristirahatan Nelayan/ *Rest place Fishermen*	55	3.7
8	Pasar Pengecer Ikan/ *Retailers Fish Market*	57	3.8
9	Rumah Genset dan genset/ *Genset and home generator*	59	3.9
10	Balai Pertemuan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan/ *The meeting hall Nusantara Fishery Port Pekalongan*	62	4.1
11	Unit Pengolah Limbah/ *Waste Processing Unit*	61	4.1
12	Pos Pemeriksaan Terpadu/ *Integrated Checkpoint*	60	4.0
13	Gudang Perlengkapan/ *Warehouse Equipment*	57	3.8
14	Bangunan Penyaluran BBM/ *Fuel Distribution Buildings*	62	4.1
15	Drainase/ *Drainage*	49	3.3
16	Gudang Keranjang Ikan/ *Fish Basket Warehouse*	53	3.5
17	Pos Keamanan TPI/ *Security post TPI*	60	4.0
18	Jalan Komplek Pelabuhan *Ports Complex Road*	61	4.1
19	Gedung Laboratorium Mini/ *Mini Lab Building*	61	4.1
20	Gedung Pos Syahbandar Perikanan/ *Post building of Fisheries Shahbandar*	58	3.9
	Jumlah/*Total*	**1,169**	**3.9**

Sumber Hasil Analisis Lickert (2015)/*Source : Result of Lickert Analysis (2015)*

Berdasarkan tabel, dari responden pegawai, nilai skor rata-rata pemanfaatan fasilitas pelabuhan berkisar antara 3,3 - 4,1. Berdasarkan tabel kriteria skorsing hal tersebut masuk ke dalam kriteria pemanfaatan yang cukup puas dan puas. Sistem drainase menjadi satu catatan penting karena pada indikator ini nilai yang didapat sangat rendah yaitu 3,3 hal ini dapat dilihat dilapangan bahwa masih adanya genangan air rob yang seringkali pada bulan/tanggal tertentu air rob naik menggenang sebagian wilayah pelabuhan.

ANALISIS TINGKAT PEMANFAATAN

Tingkat pemanfaatan fasilitas dasar dan fungsional di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan secara teknis dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7. Tingkat Pemanfaatan Fasilitas Dasar dan Fungsional.
Table 7. Utilization Levels Are Basic and Functional Facilities.

Fasilitas/ *Amenities*	Volume (m^2)/ *Volume*	Tahun Pembuatan/ *Year*	Tingkat Pemanfaatan/ *Utilization rate*	Keterangan/ *Description*
Area Pelabuhan/ *Area Ports*	317.185	2014	62,64%	Cukup optimal/ *Quite optimal*
Areal parkir TPI/ *TPI parking area*	1,500 m^2	2000	21.63%	Kurang optimal/ *Less optimal*
Tangki air/ *Water tank*	3,000 m^3	1992	60%	Cukup optimal/ *Quite optimal*
TPI/ *TPI*	5,089 m^2	1992	14,04%	Kurang optimal/ *Less optimal*

Sumber: Hasil Penelitian, 2015/*Source*: *Research result, 2015*

Tempat Pemasaran Ikan (TPI)

Berdasarkan perhitungan dari lampiran, luas TPI yang termanfaatkan adalah 715 m^2. Untuk optimalisasi pemanfaatan di PPN Pekalongan adalah 14,04%. Menurut Mustari dan Dahri (2011), tingkat optimalisasi 0%-40% artinya sangat kurang. Salah satu faktor adalah karena frekuensi pelelangan yang hanya dilakukan 1 kali sehari. Ikan ikan layang, tongkol/cakalang biasa dilelang di TPI namun ada pembagian lagi yaitu untuk yang diasinkan masuk ke TPI utama (*outdoor*) sedangkan yang *freezer* dimasukkan ke TPI hygienis.

Areal Parkir

PPN Pekalongan memiliki areal lahan parkir seluas 1500 m^2. Untuk optimalisasi pemanfaatan di PPN Pekalongan adalah 21,63 %. Menurut Mustari dan Dahri (2011), tingkat optimalisasi 0%-40% artinya sangat kurang. Salah satu faktor adalah karena frekuensi pelelangan yang hanya dilakukan 1 kali sehari. Lahan parkir yang tersedia telah cukup memadai dan teratur dengan rapi ditambahn adanya pos satpam pada pintu masuk utama areal parkir, namun apabila terjadi banjir rob maka sebagian lahan parkir akan tergenang dan mengganggu proses pengangkutan ikan hasil lelang**.**

Tangki air

Kebutuhan air tawar juga merupakan salah satu perbekalan yang dibutuhkan saat melaut. Dan harus memanfaatkan air tawar apabila waktu pelayaran sampai berhari-hari. Selain itu juga sebagai sarana kebersihan baik untuk toilet maupun penyiraman kebersihan TPI itu sendiri. Tingkat pemanfaatan tangki air tawar PPN Pekalongan yang berada di TPI sebelah utara dan selatan adalah 60% dengan nilai skor masih dalam kondisi cukup termanfaatkan.

Berdasarkan perhitungan dari lampiran, Untuk optimalisasi pemanfaatan di PPN Pekalongan adalah 4,85 %. Menurut Mustari dan Dahri (2011), tingkat optimalisasi 0%-40% artinya sangat kurang.

ANALISIS SWOT

Analisis SWOT digunakan untuk mencari alternatif strategi dalam upaya pengembangan PPN Pekalongan, yaitu dengan cara mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan minapolitan PPN, faktor internal maupun faktor eksternal. Setelah itu mencari strategi dengan cara membandingkan antara faktor eksternal dan faktor internal tersebut kedalam matriks SWOT.

Skoring Faktor

Skoring faktor digunakan untuk menentukan strategi mana yang akan diambil dengan cara melakukan skoring faktor internal dan eksternal dapat dilihat pada tabel 8.

Hasil skor yang didapat adalah 3,09 yang berarti menunjukan faktor internal pelabuhan cukup kuat untuk menunjang program Minapolitan, paling menonjol adalah SDM yang baik dan sarana prasarana yang baik oleh PPN Pekalongan dan juga pemerintah kota untuk berjalannya program Minapolitan dengan baik. Program Minapolitan dapat berjalan baik apabila bersinergi dalam penentuan program dan bekerja sama dalam implikasi program (Tabel 9).

Tabel 8. Analisa Skoring Faktor Internal Pelabuhan.
Table 8. Scoring Analysis of Internal Factors of Ports.

Faktor Internal/ *Internal Factors*	Bobot/ *Weights*	Rating/ *Rating*	Skor/ *Scores*
Kekuatan/ *Power*			
- PPN Pekalongan memiliki lokasi strategis dan mudah dijangkau/ *PPN Pekalongan has a strategic location and easily accessible*	0.08	3	0.24
- SDM yang bekerja di PPN Pekalongan sudah sesuai keahlian/ *Human resources working in PPN Pekalongan was appropriate expertise*	0.09	4	0.36
- Jenis SDI yang didaratkan mempunyai nilai ekonomis yang tinggi/ *Type SDI landed has a high economic value*	0.08	3	0.24
- TPI beroperasi dengan baik/ *TPI operates properly*	0.08	3	0.24
- Program Minapolitan didukung pemerintah kota/ *Program supported the city government Minapolitan*	0.09	3	0.27
- Peran pemerintah sangat tinggi terhadap pembangunan PPN Pekalongan/ *The role of government is very high on the development of PPN Pekalongan*	0.09 0.08	3 3	0.27 0.24
- Memiliki wilayah untuk pengembangan/ *Has the area for development*	0.08	3	0.24
- Memiliki area wisata bahari di PPN Pekalongan/ *Have a marine tourism area in PPN Pekalongan*	0.08	3	0.24
Kelemahan / *Weakness*			
- Tidak ada kolam pelabuhan dan IPAL/ *There is no port basin and WWTP*	0.07	3	0.21
- Kurang pengoptimalan Sosialisasi lanjutaan tentang minapolitan/ *Lack of socialization lanjutaan optimization of minapolitan*	0.09	3	0.27
- Kurang mengertinya masyarakat tentang program minapolitan/ *Lack of understanding of the public about the program minapolitan*	0.09	3	0.27
- Banjir rob mengganggu aktivitas pelabuhan/ *Flood rob interfere with the activity of the port*			
Jumlah/ *Total*	1	37	3.09

Sumber: Hasil Penelitian, 2015/*Source*: *Research result, 2015*

Tabel 9. Analisa Skoring Faktor Eksternal Pelabuhan
Table 9. Scoring Analysis External Factors of Ports

Faktor Eksternal/ *External Factors*	Bobot/ *Weights*	Rating/ *Rating*	Skor/ *Scores*
Peluang/ *Opportunity*	0.125		
- Pangsa pasar perikanan yang potensial/ *The market share of the fishery potential*	0.120	3	0.375
- lokasi dekat dengan daerah penngkapan ikan laut jawa/ *The location close to the sea fish penngkapan Java*	0.130	3	0.36
- tahap awal program minapolitan berjalan baik/ *The early stages of the program went well minapolitan*	0.125	3	0.39
- Fasilitas dan sarana prasarana tersedia cukup lengkap/ *Facilities and infrastructure are complete enough*	0.125	3	0.375
- PPN Pekalongan sudah masuk dalam kawasan minapolitan/ *PPN Pekalongan have entered in the Minapolitan*		3	0.25
Ancaman/ *Threat*			
- Kekurangan dana dalam pengembangan Minapolitan/ *Shortage of funds in the development of Minapolitan*	0.125	3	0.375
- Nelayan masih kurang memperhatikan program Minapolitan/ *Fishermen still less attention to program Minapolitan*	0.125	3	0.375
- Fasilitas penunjang kurang modern dan sesuai dengan program Minapolitan/ *Supporting facilities are less modern and in accordance with the program minapolitan*	0.120	3	0.36
Jumlah/ *Total*	1	18	2.86

Sumber: Hasil Penelitian, 2015/*Source*: *Research result, 2015*

Hasil Skor yang didapat adalah 2,86 yang berarti menunjukan faktor eksternal tidak begitu lemah dalam pengembangan program Minapolitan agar dapat berkembang dan berjalan lebih seperti yang menjadi visi dan misi bersama anatara PPNP dan Pemkot yaitu mengembangkan mengembangkan kawasan minapolitan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan.

Posisi strategi digunakan untuk menentukan pilihan pada keempat strategi yang telah didapatkan oleh analisa matrik SWOT, yaitu dengan cara menempatkan total skor pada faktor internal dan eksternal matrik. Dari perhitungan skoring faktor total nilai skor untuk faktor internal didapatkan 3,09 sedangkan untuk faktor eksternal didapatkan 2,86 yang untuk selanjutnya ditempatkan pada matrik. Dapat dilihat dalam matrik strategi di bawah ini :

<table>
<tr><td></td><td colspan="2">Peluang/ Opportunity</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">Kelemahan/ Wekness</td><td>Kuadaran/ Quadrant IV
(W-O)</td><td>Kuadaran/ Quadrant I
(S-O)</td><td rowspan="2">Kekuatan/ Strength</td></tr>
<tr><td>Kuadaran/ Quadrant III
(W-T)</td><td>Kuadaran/ Quadrant II
(S-T)</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">Ancaman/ Threat</td><td></td></tr>
</table>

Gambar 1. Matrik Strategi SWOT.
Figure 1. SWOT Strategy Matrics.

Dari matrik di atas dapat diketahui bahwa strategi yang dipilih adalah strategi pada kuadran I yaitu strategi S-O (*strength-opportunity*). Strategi ini dibuat untuk menggunakan seluruh kekuatan untuk memanfaatkan peluang yang ada. Hasil analisa SWOT total skor pada faktor internal dan eksternal matrik. menunjukan faktor internal pelabuhan cukup kuat untuk menunjang program Minapolitan, dalam hal ini adalah yang paling menonjol adalah SDM yang baik dan sarana prasarana yang baik oleh PPN Pekalongan dan juga pemerintah kota untuk berjalannya program Minapolitan dengan baik. Sedangkan hasil skor faktor eksternal menunjukan faktor eksternal tidak begitu lemah dalam pengembangan program Minapolitan.

Strategi yang diperlukan untuk PPN Pekalongan adalah menggunakan seluruh kekuatan untukmemanfaatkan peluang yang ada untuk meneruskan dan mengembangkan Program Minapolitan. Hasil yang sama sesuai Minapolitan Palabuhan ratu seperti yang tercantum pada Ardani (2013), memuat bahwa berdasarkan analisis SWOT pada pelabuhan ratu mengasilkan strategi yaitu peningkatan kinerja pengelolaaan pelabuhan serta membangun kesdaran kolektif untuk tetap komitmen dan konsisten dalam mengembangkan minapolitan peningkatan kerja serta konsisten pengembangan Minapolitan memang sangat dianjurkan karena program ini telah di inisiasi baik oleh pemerintah dan masyrakat.

PENUTUP

Dari penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa tingkat pemanfaatan fasilitas Fungsional Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan adalah area pelabuhan sebesar 4,85% artinya kurang optimal, Tempat Pelelangan Ikan sebesar 14,04% artinya kurang optimal, areal parkir sebesar 21,63% artinya kurang optimal dan menara air sebesar 60% artinya cukup optimal; tingkat kepuasan fasilitas fungsional berdasarkan responden non pegawai memperoleh nilai kriteria baik dengan skor rata-rata 3,1, responden pegawai sudah baik dengan skor rata-rata 3,9; dan hasil analisis SWOT yang menunjukan bahwa strategi yang harus dilakukan PPN Pekalongan adalah stategi S-O *(Strength Opportunity.*Strategi tersebut yaitu Peningkatan kinerja pokja minapolitan antara pihak PPN dan Pemkot sehingga program Minapolitan yang sistematis berjangka waktu yang jelas serta Menanggulangi banjir rob bersama pemkot agar dapat teratasi dan tidak setengah-setengah karena sangat mengganggu.

Terkait dengan tata kelola pengembangan perikanan khususnya peningkatan kapasitas fungsional serta program Minapolitan bagi PPN Pekalongan serta Pemerintah Kota Pekalongan, perlu memperhatikan sarana Sekitar TPI yang sering terkena banjir rob sehingga mengurangi kegiatan Bongkar Muat serta proses lelang TPI terganggu akibat malasnya pedagang atau pembeli masuk kawasan TPI saat Banjir Rob, agar seluruh kegiatan TPI lancar. Lalu dengan program Minapolitan yang telah berlangsung perlu dilakukan kegiatan yang lebih intens dan jelas untuk program-program yang mengarah ke sosisalisasi dan pengembangan program Minapolitan, agar lancar dan terpadu dalam pengelolaan antara PPNP dan Pemkot Kota Pekalongan.

DAFTAR PUSTAKA

Ardani. 2013. Model Integrasi Dalam pengembangan Minapolitan Perikanan Tangkap Di PalabuhanRatu,Kabupaten Sukabumi,Jawa Barat. Fakultas Perikanan Institut Pertanian Bogor. Bogor.

Budiaji, W. 2013. Skala Pengukuran Dan Jumlah Respon Skala Likert. Universitas Sultan Agung Tirtayasa. Banten

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.18/MEN/2011, Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Kawasan Minapolitan

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.32/MEN/2010, Tentang Penetapan Kawasan Minapolitan.

Keputusan Walikota Pekalongan tentang Penetapan Kawasan Minapolitan Kota Pekalongan Nomor 523 / 138 Tahun 2010 tanggal 1 Juli 2010).

Mustari, Y. dan K. Dahri. 2011. Evaluasi Optimalisasi Pemanfaatan Terminal Angkutan Penumpang Umum. Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm.6 (abstrak).

Peraturan Pemerintah RI Nomor. 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Umum Monitoring, Evaluasi, Dan Pelaporan Minapolitan.

Prasojo, Prastyo, A. Rosyid dan I. Triarso. 2015. Analisis Tingkat Pemanfaatan dan Kebutuhan Fasilitas Fungsional dan Fasilitas Penunjang di Pelabuhan Perikanan Pantai

Tasikagung Rembang. [Skripsi]. Universitas Diponegoro, Semarang, 34 hlm.

Rangkuti, F. 2001. Analisi SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis. Jakarta. Gramedia

Sugiyono. 2012. ANALISIS SWOT (Kekuatan, Kelemahan, Kesempatan,Ancaman). Tools for Policy Impact: A Handbook for Researchers

Sugiono. 2005. Statistika untuk Penelitian. Alfabeta. Bandung.

Yahya, E., A. Rosyid dan A. Suherman. 2013. Tingkat Pemanfaatan Fasilitas Dasar dan Fungsional Dalam Strategi Peningkatan Produksi Di Pelabuhan Perikanan Pantai Tegalsari Kota Tegal Jawa Tengah [Jurnal]. Universitas Diponegoro. Semarang. Hlm 56-65.

Zain, J., Syaifuddin dan Y. Aditya. 2011. Efisiensi Pemanfaatan Fasilitas di Tangkahan Perikanan Kota Sibolga. Jurusan Perikanan dan Kelautan , Universitas Riau, hlm. 4 (abstrak).

EFEKTIVITAS PEMBERLAKUAN KEBIJAKAN MORATORIUM KAPAL EKS ASING DAN *TRANSHIPMENT* TERHADAP KINERJA USAHA PENANGKAPAN IKAN

Effectivity of Ex Foreign Ships Moratorium and Transhipment Policy on Captured Fisheries Business Performance

***Yayan Hikmayani, Rikrik Rahadian, Nurlailii dan Rizky Muhartono**

Balai Besar Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan
Gedung Balitbang KP I Lt. 4
Jalan Pasir Putih Nomor 1 Ancol Timur, Jakarta Utara
*email: yayanhikmayani @yahoo.ca

Diterima 20 Juli 2015 - Disetujui 8 November 2015

ABSTRAK

Penelitian untuk melihat efektivitas kebijakan moratorium kapal eks asing dan transhipment telah dilakukan pada Bulan Maret 2015. Tujuan penulisan makalah ini yaitu untuk melihat pengaruh langsung dari pemberlakuan kebijakan tersebut terhadap kinerja usaha perikanan. Lokasi penelitian dilakukan di tempat pendaratan ikan bagi kapal-kapal ikan yang terkena dampak, seperti di Bitung dan DKI Jakarta. Metode pengambilan responden dilakukan secara terpilih, yaitu instansi terkait : pelabuhan perikanan, pengawas perikanan, serta pelaku usaha. Pengambilan data terdiri dari data primer dan data sekunder. Analisis data dilakukan secara tabulasi dan diolah menggunakan statistik sederhana untuk menjawab tujuan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan yang telah diimplementasikan dilihat dari tujuan untuk mengurangi *illegal fishing* dianggap secara nyata cukup efektif. Hal ini ditunjukkan dengan menurunnya jumlah *illegal fishing*. Namun demikian, di sisi lainnya kebijakan tersebut dinilai tidak efektif bagi peningkatan kinerja usaha penangkapan skala besar dan telah cukup efektif untuk meningkatkan kinerja usaha penangkapan ikan skala kecil. Diharapkan keijakan ini akan diikuti oleh perbaikan sistem monitoring yang baik dari pihak pemerintah agar pemberlauan kembali kapal transhipment tidak digunakan untuk kegiatan *illegal fishing*, namun membangkitkan inerja usaha perikanan dari hulu ke hilir yang berkembang di Indonesia.

Kata Kunci: efektivitas, moratorium, kapal eks asing dan *transhipment*

ABSTRACT

This study is aimed at investigating the effectiveness of the moratorium and transhipment policies. The investigation was conducted on March 2015 in several fish-landing sites which were heavily affected by the two policies, such as Bitung and DKI Jakarta, through surveys to acquire both primary and secondary data needed, with purposively chosen respondents. The data acquired were then descriptively analyzed and tabulated, which resulted in the finding that the policies implemented thus far had been very effective in suppressing illegal fishing. Despite their effectiveness, big fisheries business owners in jakarta complained that the transhipment policy had caused them quite a big loss through the effect of a hiking fishing cost as well as reducing catch. While the big fisheries business owners in Bitung complained that both policies had caused them much bigger lost by reducing the supply of input. But different stories were received by small scale fishers who felt that they had been getting more fish than they usually had. Therefore, the moratorium policies need to be continued while the government preparing to alter the transhipment policy – especially in the enhancement of the monitoring system – so that the policies may suppress illegal fishing while creating a condition for growth of fishery businesses from top to bottom in Indonesia.

Keywords: effectiveness, moratorium, transhipment and ex-foreign ships

PENDAHULUAN

Kegiatan *Illegal, Unreported, Unregulated (IUU) Fishing* di Indonesia sudah sangat merugikan rakyat dan bangsa Indonesia. Menurut Jaelani Aq dan Udiyo B. (2014) bahwa illegal fishing dilakukan oleh orang asing atau pun oleh warga negara Indonesia sendiri dengan berbagai cara yang tidak sesuai dengan UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Kerugian negara akibat *illegal fishing* mencapai 300 trilyun rupiah pertahun, yaitu dengan memperhitungkan tingkat kerugiannya yang mencapai 25% dari total potensi perikanan Indonesia (Anonim, 2014). Kerugian tersebut berdampak merugikan negara dan mengancam kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan. (Marlyna dan Riza, 2013) .

Kegiatan IUU Fishing telah banyak merugikan negara RI. Kerugian yang diakibatkan baik secara sosial, ekonomi,politik dan lingkungan. Sunyowati (2014) menyatakan dampak ekonomi, setiap tahun diperkirakan Indonesia mengalami kerugian akibat IUU Fishing sebesar Rp. 101.040 trilliun/tahun. Kerugian ekonomi lainnya adalah hilangnya nilai ekonomis dari ikan yang dicuri, pungutan hasil perikanan (PHP) akan hilang, dan subsidi BBM dinikmati oleh kapal perikanan yang tidak berhak. Selain itu, Unit Pengelolaan Ikan (UPI) kekurangan pasokan bahan baku sehingga melemahkan upaya pemerintah untuk mendorong peningkatan daya saing produk perikanan. Dampak politik sebagai salah satu pemicu konflik atau ketegangan hubungan diplomatik diantara negara-negara, mengganggu kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), menimbulkan citra negatif, karena beberapa negara menganggap kita tidak mampu mengelola sumber daya kelautan dengan baik. Dampak sosial rawannya terjadi konflik/sengketa diantara para nelayan tradisional antar negara dan pemilik kapal pukat/ *trawl*. Dampak lingkungan kejahatan pencurian ikan yang berakibat pada rusaknya sumberdaya kelautan dan perikanan. Alat tangkap yang digunakan dalam bentuk bahan beracun yang akan merusak terumbu karang (alat tangkap ikan yang tidak ramah lingkungan), sebagai tempat berpijahnya ikan, akan berakibat makin sedikitnya populasi ikan dalam suatu perairan tertentu, atau menangkap menggunakan alat tangkap ikan skala besar (seperti *trawl* dan pukat harimau) yang tidak sesuai dengan ketentuan dan keadaan laut Indonesia secara semena-mena dan eksploitatif sehingga menipisnya sumberdaya ikan. Hal ini akan mengganggu keberlanjutan perikanan. Dari sisi kedaulatan praktek IUU Fishing telah mengancam kedaulatan RI karena di beberapa lokasi perairan Indonesia bebas berkeliaran pelaku pencurian ikan yang menyebabkan ketidaknyamanan berusaha.

Sudah banyak dilakukan kebijakan yang tujuannya untuk mengurangi bahkan memberantas aksi pencurian ikan tersebut di era pemerintahan sebelumnya. tapi ternyata belum memberikan efek jera dan dapat berdampak banyak pada berkurangnya kegiatan *IUU Fishing*. Untuk itu, diperlukan upaya yang lebih serius dari pemerintah untuk membuat efek jera terhadap pelaku. Menurut Damanik (2014) bahwa *illegal fishing* dalam hal ini merupakan tindak kejahatan yang sudah nyata dan seharusnya ditindak tegas karena sudah memberikan kerugian yang sangat besar terhadap semua sektor kehidupan masyarakat Indonesia.

Pemerintahan era Presiden Jokowi dengan salah satu programnya yaitu “poros maritim” yang memperlihatkan bahwa keberadaan laut menjadi sangat penting. Bahkan kegiatan yang dilakukan yang bertujuan pada upaya keberlanjutan serta kedaulatan menjadi perhatian penting yang dilaksanakan di era pemerintahannya. Salah satu kementerian yang bertanggungjawab terhadap pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yaitu Kementerian kelautan Perikanan. Gebrakan program yang dilakukan dalam upaya pengelolaan sumberdaya laut tersebut yaitu dengan mengeluarkan kebijakan moratorium kapal eks asing yang pembuatannya dilakukan di luar negeri dan *transhipment*. Kebijakan tersebut di keluarkan melalui Permen KP No.56/2014 dan No 57/2015 tentang pelarangan praktek *transhipment.* Substansi dari aturan tersebut, yaitu melarang kapal eks asing dan transhipment untuk beroperasi di seluruh wilayah perairan Indonesia terhitung mulai tanggal 3 Nopember sampai 30 April 2015 langkah serius tersebut kemudian di lanjutkan dengan dikeluarkan Permen KP No Permen KP No.10/2015 tentang perpanjangan kebijakan moratorium yang menambah jangka waktu berhentinya operasi kapal eks asing sampai dengan Bulan Oktober 2015.

Berbagai bentuk kegiatan IUU *fishing* yang dilakukan pelaku, diantaranya adalah penjualan ikan di tengah laut dengan menggunakan kapal *transhipment* dan penangkapan menggunakan kapal eks asing berbendera Indonesia dengan izin yang digandakan. Bahkan modus operandi kegiatan IUU *fishing* ini terus berkembang sejalan dengan perkembangan teknologi komunikasi

dan penangkapan. Namun demikian, upaya pemberantasannya pun tidak boleh surut agar mengurangi tindak kejahatan *IUU Fishing*.

Tulisan ini bertujuan untuk melihat efektivitas kebijakan untuk memberantas iUU Fishing terutama implementasi permen 56 dan 57 tahun 2014. Diharapkan dari hasil kajian ini dapat memberikan masukan kepada pengambil kebijakan serta pembaca lainnya faktor penentu keberhasilan pelaksnaan suatu program pemerintah serta dampaknya bagi masyarakat.

METODOLOGI

Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret sampai dengan April 2015, dengan dua lokasi penelitian yang dipilih secara *purposive*, yaitu Bitung dan DKI Jakarta. Bitung dipilih sebagai lokasi penelitian sebab lokasi tersebut memiliki tempat pendaratan ikan yang berskala besar, selain juga merupakan sentra usaha pengolahan produk KP dengan skala yang beragam – dari skala tradisional hingga ke skala yang modern. DKI Jakarta dipilih dengan alasan bahwa lokasi ini memiliki dua pelabuhan pendaratan ikan yang cukup besar dan merupakan sentra usaha pengolahan produk KP.

Teknik Pengumpulan Data

Jenis dari kajian ini pada dasarnya adalah sebuah studi kasus yang meneliti tentang status subyek penelitian yang berkenaan dengan suatu fase khas dari keseluruhan personalitas (Nazir, 1988). Subyek penelitian adalah para pelaku usaha di sektor KP sebagai pihak yang terkena langsung dampak dari kebijakan moratorium dan *trans-shipment*. Adapun data yang diambil meliputi baik data primer maupun data sekunder.

Data primer diperoleh dari analisis dokumen, observasi dan wawancara. Untuk memverifikasi data-data tersebut dilakukan proses triangulasi. Menurut Sitorus (1998), triangulasi dapat diartikan sebagai “kombinasi sumber data “ yang memadukan sedikitnya tiga metode, seperti observasi, wawancara dan analisis dokumen. Kelebihan dari metode ini adalah saling menutupi kelemahan antara satu metode dengan metode lainnya sehingga hasil yang diharapkan dari realitas sosial masyarakat menjadi lebih valid. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran lebih jelas tentang kehidupan sosial (Nasution, 2006). Dengan observasi sebagai alat pengumpul data, diusahakan mengamati keadaan yang wajar dan yang sebenarnya tanpa usaha yang disengaja untuk mempengaruhi, mengatur atau memanipulasinya. Wawancara atau interview adalah suatu bentuk komunikasi verbal jadi semacam percakapan yang bertujuan untuk memperoleh informasi (Nasution, 2006).

Menurut Nasution (2006), Sumber data sekunder adalah sumber bahan bacaan. Bahan sekunder adalah hasil pengumpulan oleh orang lain dengan maksud tersendiri dan mempunyai kategorisasi atau klasifikasi menurut keperluan mereka. Data sekunder berupa bahan-bahan tertulis yang berupa laporan tahunan, hasil penelitian terdahulu (sebelumnya), buku serta publikasi media cetak maupun elektronik. Data ini dipakai sebagai pelengkap temuan atau sebagai *starting point* untuk memperoleh orientasi yang lebih luas mengenai topik yang diteliti. Sumber data sekunder yaitu: kementrian kelautan dan perikanan, pelabuhan perikanan, dinas kelautan dan perikanan, badan pusat statistik.

Metoda Analisis Data

Analisis data bertujuan untuk menyederhanakan data dalam bentuk yang lebih mudah dipahami (Nazir, 1988). Data yang telah terkumpul dalam penelitian ini dikelompokkan, kemudian disusun, ditabulasi dan dilakukan analisis secara deskriptif kualitatif. Analisis data dilakukan berdasarkan informasi yang didapat dari wawancara dan observasi lapang.

EFEKTIVITAS KEBIJAKAN TERHADAP AKTIVITAS PENANGKAPAN IKAN

Pemberlakuan kebijakan penghentian operasi penangkapan ikan oleh eks kapal asing dan *trans-shipment* diharapkan berdampak pada menurunnya praktek *illegal fishing UnReported, UnRegulated (IUU)* yang banyak dilakukan oleh kapal-kapal tersebut. Selain itu, tujuannya untuk menata ulang perizinan kapal penangkap ikan. Yang dimaksud dengan kapal eks asing yaitu Kapal perikanan Indonesia yang pembangunannya dilakukan di luar negeri (Anonim, 2015). Diduga banyak izin penangkapan yang disalahgunakan, duplikasi izin dan lain-lain. Selain itu, kapal-kapal *trans-shipment* diduga banyak melakukan transaksi ikan di tengah laut, sehingga ikan hasil tangkapannya tidak di daratkan di Indonesia. Menurut definisi,

kapal asing adalah kapal yang dibuat negara asing, tapi beroperasi secara ilegal di perairan Indonesia, memiliki kapasitas di atas 30 GT yang telah mendapat Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Usaha Penangkapan Ikan (SIPI) dari pemerintah. Praktek-praktek tersebut tentunya sangat merugikan bagi Indonesia. Dari data dapat dilihat jumlah pelanggaran yang dilakukan oleh kapal-kapal eks asing dan kapal *trans-shipment* selama kurun waktu 5 tahun terakhir (Tabel 1).

Laporan dari Tim Satgas Pemberantasan *Illegal Unreported dan Unregulated (IUU) Fishing* Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyatakan bahwa dari 1.132 kapal eks asing sebanyak 907 telah ditemukan melanggar. Jenis pelanggaran di antaranya tidak mengaktifkan *Vessel Monitoring System* (VMS) saat berlayar. Kalau mematikan alat itu sehingga tidak bisa dimonitor, mematikan alat itu mencapai berbulan-bulan, semua anak buah kapal (ABK) adalah warga asing, mempraktikan perbudakan sebagaimana di Maluku, praktik manipulasi data dengan menurunkan ukuran kapal di dokumen (mark down), berlayar tanpa Surat Laik Operasi (SLO), dan lainnya, pemalsuan dokumen dan isi kapal. Kapal-kapal itu ukurannya antara 100-300 Gross Ton (GT), tapi, dilaporkan di bawah 50 GT.

Semenjak Permen KP No. 56/2014 dan Permen KP No. 57/2014 diberlakukan pada awal november 2014 hingga April 2015 ini, tercatat telah terjadi penurunan kapal yang melaut di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Nizam Zachman seperti yang ditampilkan pada Tabel 2. Dari Tabel tersebut dapat kita lihat bahwa secara total, semenjak kedua peraturan diberlakukan, telah terjadi penurunan jumlah kapal yang melaut dari PPS Nizam Zachman sebesar rata-rata 5% per bulan, atau secara total sebesar 24%. Apabila dikelompokkan berdasarkan jenis kapal/alat tangkapnya, maka penurunan melaut tertinggi terjadi pada kapal jenis angkut, kelompok berikut

Tabel 1. Hasil Operasi Kapal Pengawas Tahun 2010-2013.
Table 1. The Results of Patrol Vessels, 2010-2013.

Tahun	Diperiksa/ *Checked*	Ditangkap/ *Apprehended*		
	Unit Kapal/ *Vessels*	KII	KIA	KII+KIA
2010	2,253	24	159	183
2012	3,348	31	75	106
2013	4,326	42	70	112
2014	3,871	24	44	68

Sumber: PSDKP-KKP/ *Source: PSDKP-KKP*
Keterangan/ *Description*: KII = Kapal Ikan Indonesia/ *Indonesian Fishing Ships*; KIA= Kapal Ikan Asing/ *Foreign Fishing Ships*

Tabel 2. Data Keberangkatan Kapal dari PPS Nizam Zachman Berdasarkan Jenis Kapal, Oktober 2014-Februari 2015.
Table 2. Vessel Departures From PPS Nizam Zachman According to Gear Classification, October 2014 – February 2015.

Jenis Kapal	Oktober	November	Desember	Januari	Februari
Angkut	70	78	37	34	24
Bouke Ami	158	165	122	87	167
Lain-lain	9	12	12	122	5
Pukat Cincin	118	108	80	0	82
Rawai Tuna	45	40	24	5	26
Total	**400**	**403**	**275**	**248**	**304**

Sumber: PPS NIZAM ZACHMAN Jakarta, 2015/ *Source: PPS NIZAM ZACHMAN, Jakarta, 2015*

yang mengalami penurunan tertinggi, dengan total sebesar 44%, dan Rawai Tuna, dengan total sebesar 42%.

Nampaknya pemberlakuan kedua peraturan yang berbarengan dengan terjadinya musim pacekliklah yang telah mengakibatkan terjadinya penurunan tersebut. Hal tersebut dapat dilihat dari terjadinya fenomena penurunan yang diikuti dengan peningkatan. Tabel 2 menunjukkan bahwa penurunan terjadi sejak bulan November 2014 dan mengalami titik paling rendah pada bulan Januari 2015, dengan angka penurunan sebesar 38% dari angka bulan Oktober 2014. Akan tetapi bersamaan dengan mulai berakhirnya musim paceklik, pada bulan Februari 2015 mulai terjadi peningkatan jumlah kapal yang melaut, meskipun dengan angka yang masih di bawah angka bulan Oktober 2014. Walaupun terjadi peningkatan akan tetapi telah terjadi penurunan kapal yang melaut dengan rata-rata sebanyak 20% per bulan, atau secara total, sebanyak 66% sepanjang periode pengamatan.

Dari sisi produksi, secara total, terjadi kecenderungan penurunan total produksi tangkapan yang didaratkan di PPS Nizam Zachman dengan rata-rata 11% perbulannya sepanjang periode Oktober 2014 hingga Februari 2015 ini. Serupa dengan angka kapal yang melaut, kecenderungan tersebut nampaknya terjadi sebagai akibat dari pengaruh musim penangkapan saja. Hal tersebut dapat dilihat dari penurunan yang mencapai titik terendah di angka 5780 Ton pada bulan Januari 2015, dan meskipun belum menyamai angka produksi pada Oktober 2014, akan tetapi nampaknya mulai terjadi kecenderungan peningkatan produksi tangkapan pada bulan Februari 2015, seiring dengan mulai bergantinya musim tangkapan (Tabel 3).

Apabila data tersebut dipilah berdasarkan alat tangkap yang digunakan, dapat dilihat bahwa Kedua PERMEN KP, yang diberlakukan pada November 2015 lalu, nampaknya sangat berdampak terhadap kegiatan operasi Kapal Angkut – yang umumnya melakukan kegiatan *Trans-shipment*. Meskipun pada awal diberlakukan PERMEN terkait *trans-shipment* memang sempat terjadi puncak pendaratan ikan bagi Kapal Angkut pada angka 2321 Ton, akan tetapi selepas itu terjadi penurunan pendaratan yang luarbiasa signifikan dan terjadi penghentian secara total operasi pengangkutan pada bulan Januari dan Februari 2015 ini.

Pada Tabel 4, terlihat jumlah kapal yang berlayar sejak diberlakukannya peraturan menteri kelautan terkait moratorium. Secara umum, terjadi pertumbuhan yang negatif -0,141 yang menunjukkan terjadi penurunan jumlah kapal yang berlayar.

EFEKTIVITAS TERHADAP KINERJA USAHA PENANGKAPAN

Kinerja Usaha Penangkapan Skala Besar

Gambaran tentang dampak kebijakan terhadap usaha penangkapan ikan skala besar diambil contoh lokasi di Pelabuhan Nizam Zachman (DKI Jakarta). Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa telah terjadi perubahan besar sebagai dampak langsung dari adanya pemberlakuan

Tabel 3. Data Produk Tangkapan yang Didaratkan di PPS Nizam Zachman Berdasarkan Jenis Kapal, Oktober 2014–Februari 2015.

Table 3. Landed Catch at PPS Nizam Zachman According to Gear Classification, October 2014 – February 2015.

Jenis Kapal/ *Boat*	Produksi/ *Production* (Satuan: Ton)				
	Oktober 2014	November 2014	Desember 2014	Januari 2015	Februari 2015
Angkut/ *Transports*	1,867,535	2,321,399	979,001	0	0
Bouke Ami	1,840,515	1,148,508	1,650,231	1,460,654	722,113
Pukat Cincin/ *Purse seine*	6,526,409	4,769,734	5,491,662	3,777,331	5,292,066
Rawai Tuna/ *Tuna Longline*	1,079,691	734,138	360,481	379,65	444,092
Lainnya/ *Others*	3.76	0	314,007	162,734	7,676
Jumlah/*Total*	**11,317.91**	**8,973,779**	**8,795,382**	**5,780,369**	**6465,947**

Sumber: Olahan Data PPS Nizam Zachman, 2015/ *Source: PPS Nizam Zachman, 2015*

Tabel 4. Jumlah Persetujuan Berlayar (SPB) Berdasarkan Jenis Kapal, Oktober 2014 - Februari 2015 di PPS Bitung.

Table 4. Approved Departures According to Gear Classification, October 2014 – February 2015.

Alat tangkap/ *Gear*	Oktober/ *October*	Nopember/ November	Desember/ *December*	Januari/ *January*	Februari/ *February*	Pertumbuhan/ *Growth*
Bottom Long Line	0	1	0	0	0	-
Gill Net	5	2	0	0	0	-
Hand line	82	71	46	40	41	-0.13863
Kapal Latih/ *Training ship*	1	1	2	0	0	-
Kapal Penelitian/ *Research ships*	0	1	1	0	0	-
Light Boat	44	36	36	57	34	-0.05157
Pancing Cumi/ *Squid fishing*	0	0	0	0	0	-
Pengangkut/ *Transporter*	214	187	78	40	36	-0.35649
Pole and Line	78	71	31	36	28	-0.2049
Pukat ikan/ *Trawl fishing*	0	3	0	0	0	-
Purse Seine	274	242	258	252	236	-0.02986
Tuna Hand line	532	579	315	371	234	-0.16426
Tuna long line	11	15	6	4	2	-0.34095
Kapal Izin baru/ *New permit ships*	0	0	0	4	0	-
Jumlah/*Total*	**1,241**	**1,209**	**773**	**804**	**611**	**-0.14172**

Sumber: PPS Bitung 2014 - 2015/ *Source: PPS Bitung 2014 - 2015*

kebijakan tersebut. Bagi usaha penangkapan skala besar, pemberlakuan berdampak pada menurunnya kinerja usaha penngkapan ikan skala besar. Penghentian operasi kapal-kapal eks asing dan *trans-shipment* mengurangi kapasitas usaha penangkapan yang dilakukan lebih dari 50%. Menurut responden pemberlakuan kebijakan diterapkan untuk semua kapal eks asing dan *trans-shipment* baik untuk yang melanggar maupun bagi yang taat peraturan. Akibatnya, bagi pemilik kapal yang tidak melanggar aturan pun mendapat dampaknya karena tidak dapat beroperasinya kapal-kapal yang dimiliki. Strategi yang dilakukan oleh pengusaha dalam menghadapi situasi tersebut dengan memberhentikan Anak Buah Kapal (ABK) kapal eks asing dan tetap menggaji Nakhodanya.

Berdasarkan pengamatan di lapangan, nampaknya kedua peraturan tersebut sangat efektif dan tepat sasaran dalam memenuhi tujuannya. Kebijakan moratorium telah berhasil menghentikan kegiatan penangkapan ikan oleh kapal eks asing, yang dapat dilihat dari menghilangnya kapal-kapal eks asing yang biasanya beroperasi di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung dan Nizam Zahman (DKI Jakarta). Kebijakan penghentian praktek *trans-shipment* juga telah diberlakukan dengan efektif, yang ditunjukkan dengan banyaknya kapal pengangkut yang bersandar di Pelabuhan Nizam Zahman.

Dari fakta tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pelaku usaha yang terkena dampak secara langsung dari kedua kebijakan tersebut adalah para pemilik kapal eks asing dan kapal pengangkut yang biasa melakukan *trans-shipment*. Dampak yang diterima tersebut muncul dalam bentuk berkurangnya kegiatan operasional penangkapan dan pengangkutan, serta meningkatnya biaya operasional penangkapan. Selain para pemilik kapal, dampak langsung juga dirasakan oleh para ABK termasuk Nakhoda melalui hilangnya sumber pendapatan dan/ atau turunnya pendapatan akibat berkurangnya waktu melaut

Usaha penunjang bagi penangkapan mengalami kelesuan usaha. Usaha penunjang seperti Penyedia Ransum, Perbaikan Kapal dan Alat-alat Perikanan adalah beberapa dari usaha penunjang yang mengalami kelesuan usaha akibat penurunan permintaan. Di sisi lain, usaha jasa transportasi darat dan jasa penyewaan *cold storage* di beberapa pelabuhan ternyata menerima dampak positif dari kedua kebijakan tersebut. Hal tersebut berkaitan dengan dilarangnya praktek *transhipment*, yang menyebabkan banyak usaha penangkapan di Jakarta memutuskan untuk melakukan penyewaan *cold storage* di pelabuhan terdekat dari *fishing ground*, yaitu Cilacap dan Pelabuhanratu, untuk ditimbun hingga jumlahnya mencukupi untuk diangkut menggunakan kapal angkut secara *port to port.* Selain itu, banyak usaha penangkap ikan bernilai ekonomis tinggi, semisal tuna, memilih untuk mendaratkan tangkapannya di pelabuhan terdekat *fishing ground* dan langsung mengirimkannya ke UPI di Jakarta melalui alat transportasi darat.

Dari hasil wawancara dengan pelaku usaha diperoleh informasi dampak kebijakan yang dirasakan sangat berpengaruh terhadap kinerja usahanya. Dari produksi ikan yang dihasilkan terjadi penurunan karena tidak beroperasinya kapal-kapal eks asing yang dimiliki serta kapal transhipment. Kapal ikan yang dioperasikan hanya kapal-kapal *purse seine* yang beroperasi di Laut Jawa saja. Kapal-kapal tersebut tidak memiliki palka yang banyak, sehingga penangkapan ikan dilakukan hanya memenuhi volume palka yang ada. Penurunan produksi tersebut tercermin dari menurunnya jumlah ikan yang didaratkan di pelabuhan Nizam Zahman sebelum dan sesudah kebijakan mencapai 11%.

Dampak lainnya, terjadi pengurangan jumlah hari melaut dalam sebulan dari 3-5 bulan per trip menjadi 2 bulan per trip. Hal ini disebabkan pasokan BBM yang semula di bawa oleh kapal *transhipment* sudah tidak dapat dipasok lagi. Penangkapan dilakukan berdasarkan ketersediaan BBM yang dibawa. Akibatnya pendapatan nelayan terutama nelayan ABK menurun karena kehilangan pendapatan yang berasal dari bonus tangkapan ikan jenis lainnya.

Secara lebih rinci dampak kebijakan terhadap kinerja usaha penangkapan skala besar dapat dilihat pada Tabel 5.

Disamping dampak langsung terhadap pelaku usaha penangkapan, implementasi kebijakan moratorium telah berdampak pada sektor usaha pendukung lainnya. Seperti diketahui, sektor pendukung usaha perikanan terdiri dari usaha warung makan, jasa angkut, usaha transportasi, toko alat perikanan, penyedia perbekalan melaut, perbengkelan.

Terjadi kelesuan konsumen bagi warung-warung makan yang ada di sekitar Pelabuhan Nizam Zahman setelah diberlakukannya kebijakan moratorium. Dampak yang ditimbulkan menurunnya omzet usaha dari warung kakan yang ada mencapai 50%.

Usaha jasa terdiri dari jasa bongkar muat (ikan, perbekalan), jasa transportasi juga ikut terkena dampak karena aktivitas bongkar muat ikan menurun setelah berhentinya kapal-kapal eks asing dan transhipment.

Usaha pendukung seperti bengkel/*docking,* rumah makan, jasa angkut, toko penyedia alat perikanan, perbekalan melaut bagi penangkapan ikan juga terkena dampak langsung karena menurunnya operasi kapal ikan. Penurunan omzet mencapai > 50%. Selain itu usaha perbengkelan yang juga terkena dampak tidak langsung dari adanya kebijakan moratorium

Kinerja Usaha Penangkapan Skala Kecil

Lokasi penelitian yang di tujukan untuk melihat dampak kebijakan *moratorium* dan *transhipment* terhadap kinerja usaha skala kecil dilakukan Pelabuhan Bitung. Berbeda dengan usaha penangkapan skala besar, usaha penangkapan skala kecil mendapat manfaat dari pemberlakuan kebijakan tersebut. Dari hasil penelitian menunjukkan terjadi peningkatan aktivitas kapal ikan 10 GT yang melakukan kegiatan penangkapan pasca pemberlakuan kebijakan.

Dampak kebijakan terhadap kinerja usaha perikanan skala kecil di Bitung dapat digambarkan sebagai berikut:

Pertama, terjadi peningkatan produksi hasil tangkapan ikan oleh perahu ukuran 10 GT hingga 200% yaitu terjadi peningkatan produksi yang dihasilkan oleh nelayan 10 GT mencapai 200%. Peningkatan produksi tersebut menyebakan meningkatnya pendapatan nelayan > 80%.

Tabel 5. Kinerja Usaha Perikanan Tangkap Sebelum dan Sesudah Implementasi Kebijakan Di DKI Jakarta Tahun 2015.

Table 5. Captured Fisheries Performance, Before and After Policy Implementation, DKI Jakarta - 2015.

Uraian/ *Descripton*	Jakarta	
	Sebelum Permen 56/2014 / *Pre-Permen 56/2014*	**Setelah Permen 56/2014 / *Post-Permen 56/2014***
Produksi/ *Production*	Produksi yang tercatat di PPS Nizam Zahman pada Bulan Nopember 2014 sebanyak 8.973,779 ton / *Production recorded at PPS Nizam Zachman in November 2014 was 8.973,779*	- Terjadi penurunan produksi ikan yang didaratkan sebesar 11% per bulan/ *Monthly average of 11% reduction in fish landed* - Terjadi peningkatan produksi walaupun tidak signifikan oleh kapal <30 GT/ *Subtle raise in production of < 30 GT vessels*
Jumlah Trip/ *Number of Trips*	- Jumlah trip kapal transhipment 6 - 12 bulan/trip/ *The length of trip taken by transhipment vessels were 6-12 month* - Jumlah hari melaut Kapal < 30 GT 3-5 bln (BBM di supply)/ *The number of days at sea of < 30 GT vessels were 3-5 months* - > 30 GT kapasitas palka 50 ton namun hasil tangkapan dapat mencapai 100 ton/trip/ *A 50 GT Vessel may catch up to 100 Tonnes/ Trip*	- Jumlah trip kapal transhipmen menjadi 2-4 bulan/trip/ *The length of trip taken by transhipment vessels were 2-4 months* - Jumlah hari melaut Kapal < 30 GT berkurang menjadi 2 bln sesuai BBM/ *The number of days at sea of < 30 GT vessels were 2 months* - Produksi tangkapan sesuai dengan kapasitas palka nya/ *Production has been as large as the capacity*
Pendapatan nelayan/ *Revenue*	Pendapatan nelayan < 30 GT Rp. 15000/hari di tambah bonus/ *The average revenue of < 30 GT fishers was Rp. 15.000/ day*	Penururnan pendapatan nelayan < 30 GT berkurang karena tidak mendapatkan bonus/ *Decreasing revenue of < 30 GT fishers due to less bonus received*
Jarak Fishing Ground/ *Distance to Fishing Ground*	Kapal-kapal transhipmen > 30 GT Laut Jawa dan Samudera Hindia/ *Around the Java Sea and the Indian Ocean for > 30 GT transhipment vessels*	Tetap di wilayah Laut Jawa/ *Around the Java Sea*
Harga Ikan/ *Price*	Rata-rata harga ikan hasil tangkapan kapal < 30 GT Rp. 10000/kg/ *The average Price of < 30 GT vessels' Catch was Rp. 10.000/kg*	Rata-rata harga ikan meningkat menjadi Rp. 12.000/kg/ *The average price has been rising to Rp. 12000/Kg*
Penggunaan BBM/ *Petrol usage*	penggunaan BBM mengandalkan dari tambahan supply dapat mencapai 750 kiloliter/ *Petrol usage pertrip may used up to 750 Kilolitre*	Penurunan konsumsi BBM menjadi 250 kiloliter karena hanya untuk penggunaaan satu trip saja/ *petrol usage pertrip has been down to only 250 kilolitre*
Jumlah kapal yang melaut/ *Operating vessels*	Kapal kapal transhipment seluruhnya dapat beroperasi/ *The transhipment vessels were fully operating*	Mengalami penurunan kapal yang beroperasi rata-rata 11% / *The average transhipment vessels operation has been decreasing by 11%*
Usaha pendukung/ *Supportive business*	- Mengalami kelesuan usaha akibat berkurangnya permintaan atas jasa yang disediakan/ *Has been waning as the demand for their services had been decreasing*	

Sumber: Data Diolah/ *Source: Data Processed*

Pendapatan nelayan juga didukung oleh adanya kenaikan harga ikan hasil tangkapan nelayan dari Rp. 5.000/ kg menjadi rata-rata Rp. 10.000/ kg.

Kedua, telah terjadi penurunan biaya operasional penangkapan hingga mencapai 30%. Hal ini disebabkan jarak *fishing gound* berkurang. Wilayah penangkapan ikan untuk perahu ukuran 10 GT awalnya mencapi 4 mil setelah implementasi kebijakan hanya 2 mil saja. Hal ini diduga banyaknya ikan yang berenang di perairan lebih dekat disebabkan berkurangnya aktivitas penangkapan oleh kapal-kapal eks asing dan *transhipment*. Secara lebih rinci, dampak kebijakan terhadap kinerja usaha skala kecil dapat dilihat pada Tabel 6.

EFEKTIVITAS TERHADAP PENINGKATAN KINERJA USAHA PENGOLAHAN

Kebijakan moratorium telah nyata berdampak pada usaha pengolahan baik pengolahan skala besar maupun skala kecil. Hal ini diketahui dari adanya pengaruh yang berdampak negatif yang disebabkan kebijakan tersebut.

Tabel 6. Kinerja Usaha Perikanan Tangkap Sebelum dan Sesudah Implementasi Kebijakan Moratorium Di Bitung (Sulawesi Utara) Tahun 2015.

Table 6. Captured Fisheries Performance Before and After Policy Moratorium Implementation, Bitung (North Sulawesi) - 2015.

Uraian/ *Descripton*	Bitung	
	Sebelum Permen 56/2014 / *Pre-Permen 56/2014*	**Setelah Permen 56/2014/ *Post-Permen 56/2014***
Produksi/ *Production*	- Produksi kapal (10GT) 100-500 kg/ trip/ *10 GT vessels were producing at an average of 100-500 Kg/trip*	- Produksi kapal (10 GT) meningkat 200%/ *the average production of 10 GT vessels may rise up to 200%*
Jumlah trip/ *Number of Trips*	Jumlah trip kapal < 10 GT sebanyak 2-3 hari/trip/ *the average legth of trip taken by less than 10 GT vessels was 2-3 days/trip*	Jumlah trip kapal < 10 GT meningkat menjadi 1 hari /trip/ *the length of trip has been down to 1 day/trip*
Pendapatan nelayan/ *Revenue*	- Nelayan dengan kapal < 10 GT memperoleh pendapatan hanya Rp 50.000-150.000 /hari/ *the average revenue of < 10 GT fishers was Rp. 50.000-150.000/day*	• Pendapatan nelayan tradisional meningkat > 80%/ *the average revenue has been rising as much as 80%*
Jarak Fishing Ground/ *Distance to Fishing Ground*	Wilayah penangkapan kapal < 10 GT di lokasi 4 mil/ *4 miles*	Wilayah tangkapan berkurang di sekitar 2 mil karena sudah banyak ikan/ *has been reduced to only 2 miles*
Harga Ikan/ *Price*	Harga ikan hasil tangkapan nelayan <10 GT: Rp. 5.000 /kg/ *Price of captured fish Rp. 5.000/Kg*	• Terjadi peningkatan harga ikan menjadi 10.000 rb/kg (100%)/ *Price has been rising to Rp. 10.000/Kg*
Penggunaan BBM/ *Petrol Usage*	- Akses BBM utk nelayan perahu < 10 GT sulit/ *it was difficult for the < 10 GT vessels to get Petrol* - Kapal tuna < 10 GT 350 liter/ *the average petrol usage for < 10 GT Vessels was 350 litre pertrip*	- Akses memperoleh BBM lebih mudah/ *has been easier to get petrol* - kapal < 10 GT konsumsi BBM berkurang 30%/ *petrol consumption has been reduced by 30%*
Jumlah kapal yang melaut/ *Operating Vessels*	- Kapal < 10 GT yang beroperasi terbatas/ *limited number of < 10 GT vessels*	- Jumlah operasi kapal < 10 GT meningkat/ *more vessels have been operating*

Sumber: Data Diolah/ *Source: Data Processed*

Kebijakan moratorium di kedua lokasi penelitian secara umum menunjukkan kurang efektif untuk peningkatan kinerja usaha pengolahan khususnya usaha pengolahan skala besar. Dari hasil penelitian, menunjukkan beberapa gambaran dampaknya seperti terlihat pada Tabel 7.

Kebijakan telah berdampak pada penurunan produksi hasil olahan dan waktu beroperasinya unit pengolahan ikan. Pengurangan produksi mencapai lebih dari 50%. Disamping itu, jumlah UPI yang masih beroperasi berkurang cukup besar. Akibatnya, terjadi PHK tenaga kerja di UPI dan pengurangan jam kerja atau penggiliran waktu bekerja. Biaya perolehan bahan baku meningkat lebih dari 50%. Hal ini disebabkan berubahnya lokasi pasokan bahan baku seperti yang terjadi di Bitung. Bahan baku dipasok dari Gorontalo, karena dari pelabuhan Bitung tidak dapat memasok ikan lagi.

Penurunan produksi yang disebabkan sulitnya pasokan bahan baku telah menyebabkan terganggunya ekspor ikan oleh UPI yang sudah di sepakati sebelumnya. Kekhawatiran para pelaku usaha pengolahan mendapat "*complain*" dari negara importir.

Tabel 7. Kinerja Usaha Pengolahan Ikan Sebelum dan Sesudah Implementasi Kebijakan Moratorium di Bitung (Sulawesi Utara) Tahun 2015.

Table 7. Fish Processing Performance Before and After Policy Moratorium Implementation, Bitung (North Sulawesi) - 2015.

Uraian/ *Description*	Bitung	
	Sebelum/*Before*	Sesudah *After*
Produksi / *Production*	- Waktu produksi 7 hari kerja/ minggu / *Producing 7 days a week* - Pasokan ikan stabil / *Stable fish supply*	- Waktu produksi 2-3 hari kerja/minggu / *Production has been down to only 2-3 days a week* - Berkurang > 50 % , karena kekurangan bahan baku / *Has been down by more than 50% due to the lack of fish fupply*
Jumlah UPI yang masih beroperasi/ *Number of Operating UPI*	Jumlah UPI di dalam pelabuhan 8 unit / *8 units of UPI within the port*	Jumlah UPI di dalam pelabuhan yang beroperasi 6 unit / *Only 6 UPI left operating within the port*
Tenaga Kerja / *Labor*	- 700.000 per minggu / *the average income was Rp. 700.000/week* - jumlah jam kerja 60-70 jam per minggu / *working hour was about 60-70 hours a week*	- Terjadi pengurangan tenaga kerja sebanyak 80 % / *Labor has been reduced by 80%* - Dilakukan sistem rolling pegawai / *Rolling system has been applied* - Jumlah jam kerja 12 -24 jam per minggu/ *Working hour has been down to 12-24 hours a week*
Supply Ikan ke Pasar Ekspor / *Export supply*	Normal / *Normal*	Supply ikan kalengan berkurang 70% / *Canned fish supply has been down by 70%*
Pasokan Bahan baku / *Raw material supply*	Sumber pasokan dari dalam Bitung / *supplied by bitung producers*	- Berkurang hanya mengandalkan pasokan dari kapal-kapal kecil. / *Lower supply from only small vessels* - UPI Cakalang fufu (asap), pasokan bahan baku mendatangkan dari luar propinsi (Gorontalo) pasokan bahan baku cakalang berkurang sebanyak 50% / *UPI have been getting fish supply from Gorontalo*
Biaya perolehan bahan baku / *Cost of inputs*	Mengalami peningkatan >50% karena harus mendatangkan dari Gorontalo / *Cost of input has been rising by more than 50%*	

Sumber: Data Diolah/ *Source: Data Processed*

Tabel 8. Kinerja Usaha Pengolahan Ikan Sebelum dan Sesudah Implementasi Kebijakan Moratorium Di DKI Jakarta Tahun 2015.

Table 8. Fish Processing Performance Before and After Policy Moratorium Implementation, DKI Jakarta, 2015.

Uraian/ *Description*	Jakarta	
	Sebelum / *Before*	**Sesudah / *After***
Produksi / *Production*	Waktu produksi 7 hari per minggu karena supply bahan baku lancar / *7 days a week*	- Produksi berkurang 50%, karena pasokan bahan baku tersendat / *Unstable input supply, production has been down by 50%* - Bahan Baku impor dari Jepang/ *Has been importing fish from Japan for input*
Jumlah UPI yang masih beroperasi / *Number of Operating UPI*	UPI tuna masih 50% operasi / *as many as 50% of UPIs were operating*	- UPI Tuna berkurang tinggal sekitar 30% / *Tuna UPIs have been down to only 30% left*
Tenaga Kerja / *Labor*	Hari Kerja 7 hari oper minggu / *worked 7 days a week*	Jumlah hari kerja berkurang 50% / *Working days have been down by 50%*
Supply Ikan Ke Pasar Ekspor/ *Export supply*	Normal / *Normal*	Berkurang 75% perbulan / *Export has been dwindling by 75% permonth*
Pasokan Bahan baku / *Raw Material Supply*	Dari kapal-kapal transhipment sendiri atau sekitar Muara Baru/ *Supplied by own transhipment vessels or other suppliers around Muara Baru*	Mengandalkan pasokan dari oelabuhan Ratu dan Cilacap / *Supply has been coming from Pelabuhan Ratu and Cilacap*
Biaya perolehan bahan baku/ *Cost of Input*	Mengalami peningkatan >20% , karena menggunakan transportasi darat dari Pelabuhan Ratu dan Cilacap ke Jakarta (Untuk Tuna) / *Has been rising as much as 20% due to using land transport from Pelabuhan Ratu and Cilacap*	

Sumber: Data Diolah/ *Source: Data Processed*

PENUTUP

Efektivitas kebijakan moratorium terhadap kinerja usaha dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bagi pelaku usaha perikanan tangkap skala besar dinilai kurang efektif karena telah berdampak pada penurunan produksi hasil tangkapan, pemberhentian nelayan ABK, pengeluaran biaya tambahan dan biaya operasional, menurunnya omzet pelaku usaha pendukung usaha perikanan. Bagi usaha penangkapan skala kecil cukup berdampak positif karena terjadi kenaikan produksi hasil tangkapan, meningkatnya biaya operasional terutama untuk pengadaan bahan baku UPI, peningkatan pendapatan nelayan tradisional.
2. Bagi pelaku usaha pengolahan, kebijakan yang diimplementasikan dinilai kurang efektif baik baik usaha pengolahan skala kecil maupun skala besar. Bagi usaha pengolahan skala besar, telah berdampak pada pengurangan produksi olahan ikan, pemberhentian tenaga kerja olahan dan terganggunya ekspor ikan olahan ke luar negeri.

DAFTAR PUSTAKA

Anonim. 2014. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 56/2014 . KKP. Jakarta

Anonim. 2015. Tindak Lanjut Terhadap Kapal Perikanan Indonesia Yang Pembangunannya Dilakukan Di Luar Negeri Dan Ikan Hasil Tangkapan Yang Tersimpan Dalam Colo Storage Atau Palkah/Refigerator Kapal. Surat Edaran Nomor: 581/Sj/Ps.210n1i112015. KKP. Jakarta

Damanik, R., Suhana, dan B. Prasetiamartati. 2008. Menjala Ikan Terakhir (Sebuah Fakta Krisis di Laut Indonesia). Jakarta: WALHI

Jaelani, A. Q. dan B. Udiyo. Illegal Unreported and Unregulated (IUU) Fishing: Upaya Mencegah dan Memberantas Illegal Fishing dalam Membangun Poros Maritim Indonesi. SUPREMASI HUKUM. Vol. 3, No. 1, Juni 2014

Marlyna, dan F. Riza. 2013. Aspek Hukum Peran Masyarakat dalam Mencegah Tindak Pidana Perikanan, (Jakarta: PT. SOFMEDIA, 2013), p. 1.

Nasution, S. 2006. Metode Research Penelitian Ilmiah. Jakarta: Bumi Aksara.

Nazir, M. 1988. Metode Penelitian . Ghalia Indonesia. Jakarta. Halaman 222.

Sitorus, M. T. F. 1998. Penelitian Kualitatif Suatu Pengantar. IPB. Bogor

Sunyowati, D. 2014. Dampak Kegiatan Iuu-Fishing Di Indonesia Departemen Hukum Internasional Fakultas Hukum-Universitas Airlangga . Disampaikan pada Seminar Nasional " Peran dan Upaya Penegak Hukum dan Pemangku Kepentingan Dalam Penanganan dan Pemberantasan IUU Fishing di Wilayah Perbatasan Indonesia". Kerjasama Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dengan Universitas Airlangga Surabaya, 22 September 2014.

STRATEGI ADAPTASI NELAYAN TERHADAP PENETAPAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN DAERAH DI MISOOL SELATAN, KKPD RAJA AMPAT

Adaptation Strategy of Fishermen for the Determination of Waters Conservation Area in South Misool, KKPD Raja Ampat

[*]Rici Tri Harpin Pranata dan Arif Satria

Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat,
Fakultas Ekologi Manusia IPB
[*]email: rici.pranata@gmail.com

Diterima 25 Juli 2015 - Disetujui 8 November 2015

ABSTRAK

Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) ditujukan untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya laut berkelanjutan. Hal yang perlu diperhatikan adalah sumber daya di kawasan KKPD serta karakteristik sosial-budaya dan ekonomi nelayan. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik masyarakat nelayan di wilayah KKPD dan strategi adaptasi yang dilakukan dalam merespon penetapan KKPD. Kasus yang terjadi di KKPD Misool Selatan Raja Ampat menunjukkan adanya karakteristik sosial-budaya dan ekonomi masyarakat nelayan yang beragam meliputi interaksi sosial, organisasi kerja, gaya hidup, diversifikasi pekerjaan, manajemen keuangan, dan adaptasi teknologi. Pada aspek interaksi sosial, mayoritas melayan memilih berhutang ke toko/kios terdekat, disamping kegiatan yang berhubungan dengan plasma dan meminjam uang ke tetangga. Mayoritas nelayan mengikuti perkumpulan nelayan, disamping mengikut pemilik kapal dan menjadi pemimpin kelompok sementara untuk aspek organisasi sosial. Gaya hidup meliiputi kebiasaan jajan, merokok, berada di rumah ketika tidak melaut, dan membawa minuman keras ketika melaut. Untuk aspek manajemen keuangan, mayoritas nelayan menggunakan uang mereka untuk kebutuhan makan dan perawatan perahu, disamping untuk jajan, membeli rokok dan menambah alat tangkap. Diversifikasi pekerjaan dilakukan oleh sebagian besar nelayan dengan bekerja di perusahaan, budidaya rumput laut, membuka kebun, membeli dan memelihara ternak dan memiliki kios/toko untuk berjualan. Mayoritas nelayan melakukan adaptasi teknologi berupa penggunaan motor tempel pada perahu tradisional, disamping memodifikasi alat tangkap dan beralih ke perahu Johnson. Strategi adaptasi nelayan merupakan respon yang muncul, karena adanya perubahan di kawasan konservasi. Seiring dengan berbagai perubahan yang beragam, mayoritas nelayan memilih strategi adaptasi dengan cara berinvestasi untuk menghadapi penetapan KKPD.

Kata Kunci: karakteristik masyarakat nelayan, strategi adaptasi, karakteristik rumah tangga nelayan, KKPD

ABSTRACT

Regional Marine Conservation Area (Kawasan Konservasi Perairan Daerah/KKPD) aims to achieve sustainable marine resource management. The aspects that must be considered were resources in marine conservation area and socio-cultural and economic characteristics of fishermen. This research aims to analyze the characteristics of fishers communities in KKPD area and their adaptation strategies to response KKPD establishment. In case of KKPD Misool Selatan Raja Ampat showed that there are various socio-cultural and economic characteristics consists of social interaction, organization of work, lifestyle, financial management, occupational diversification, and technological adaptations. In the social interaction aspect, most of fishermen owed to nearby shop, besides related activity with Plasma, and borrows money from their neighbors. Most of fishermen had attended the fishermen association, apart from boat owners and temporary group leader for organization of work aspect. Lifestyle aspect consists of habit of snacks consumption, smoking, stay at home when not fishing, and bring liquor when fishing. For financial management aspect, most of fishermen allocated their funds to fulfill dining needs and boat maintenance. Fisherman also have some occupational diversification consists of working in a company,

seaweed culture, farming, buy and raise cattle, and sell in their shop. Then, most of fishermen using outboards motor in their traditional boat as technology adaptation, besides modifying their fishing gear and using Johnson boat. In line with various changes, most of fishermen choose investment strategy to response KKPD establishment.

Keywords: characteristics of fishermen community, adaptation strategy, characteristics of fishers household, KKPD

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan (*archipelagic state*) terbesar di dunia dengan jumlah pulau yang mencapai sekitar 17.504 buah. Data Kelautan dan Perikanan Dalam Angka (2011) menyebutkan bahwa Indonesia juga menjadi salah satu negara yang memiliki garis pantai terpanjang keempat di dunia setelah Amerika Serikat, diikuti Kanada dan Rusia, dengan panjang mencapai lebih dari 95.181.000 m. Keanekaragaman hayati yang beragam membuat wilayah pesisir Indonesia memiliki potensi yang besar untuk ditingkatkan. Potensi yang dimiliki oleh wilayah pesisir Indonesia tidak lepas dari masyarakat yang hidup dari sumber daya di sekitarnya. Satria (2002) menyatakan bahwa secara sosiologis masyarakat pesisir memiliki karakteristik sosial yang berbeda dengan masyarakat lainnya, karena adanya perbedaan karakteristik sumber daya yang dihadapi. Kesejahteraan secara ekonomi masyarakat pesisir sangat tergantung pada sumber daya perikanan baik perikanan tangkap di laut maupun secara budi daya sehingga kondisi lingkungan wilayah pesisir dan laut menentukan keberlanjutan kondisi sosial ekonomi mereka.

Data KKP (2013) menyebutkan bahwa jumlah nelayan yang ada di Indonesia sekitar 2.265.213 jiwa. Dari 2,2 juta jiwa nelayan, mayoritas merupakan nelayan miskin. Nelayan dikenal dengan kemiskinan endemik, artinya apapun yang dikerjakan oleh nelayan, mereka tetap miskin (Bailey, 1998 *dalam* Muflikhati, 2010). Perlu adanya kegiatan bersama antara nelayan (masyarakat) dan pemerintah, serta pihak terkait untuk memperbaiki kondisi nelayan beserta lingkungannnya, salah satunya adalah konservasi.

Konservasi saat ini telah menjadi tuntutan dan kebutuhan yang harus dipenuhi sebagai harmonisasi atas kebutuhan ekonomi masyarakat dan keinginan untuk terus melestarikan sumber daya yang ada bagi masa depan. Salah satu bentuk konservasi yang sekarang berjalan adalah Kawasan Konservasi Perairan Daerah (selanjutnya disebut KKPD). Status luasan KKPD memiliki jumlah 108 daerah. KKPD menjadi salah satu bentuk inisisasi dari kolaborasi Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan Pemerintah Daerah dalam melestarikan sumber daya alam dan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Prinsip pengelolaan kawasan konservasi perairan yang diterapkan kawasan konservasi perairan berdasarkan *Design Principles of Resources Management* (Ruddle, 1999 dikutip KKJI, 2013) menyebutkan bahwa tinjauan kritis adopsi kelembagaan lokal/adat dalam pengelolaan kawasan konservasi perairan sebagai sebuah manajemen dilakukan terhadap unsur-unsur berikut: (1) definisi batas sistem kawasan dan kawasan; (2) sistem hak bagi pengguna kawasan dan sumber daya; (3) aturan main yang diterapkan bagi keberlanjutan kegiatan pemanfaatan kawasan dan sumber daya; (4) sistem penegakan hukum bagi aturan main yang telah disepakati; (5) monitoring dan evaluasi bagi implementasi pengelolaan kawasan dan sumber daya itu sendiri; dan (6) otoritas pengelolaan kawasan dan sumber daya sebagai institusi yang bertanggung jawab terhadap proses dan mekanisme implementasi dari pengelolaan perikanan. Pada batasan sistem kawasan dan sumber daya sangat penting untuk melihat pengetahuan lokal dari masyarakat pengguna sumber daya. Keterlibatan mereka dalam menentukan batasan wilayah perairan yang menjadi obyek kegiatan konservasi. Sistem hak bagi pengguna kawasan dan sumber daya akan menjamin keadilan dan keberlanjutan perikanan. Selain itu, perangkat pengelolaan dalam sistem aturan main muncul sebagai alat bagi implementasi pengelolaan perikanan.

Pemaparan kondisi masyarakat nelayan Indonesia dan adanya konservasi sebagai bentuk solusi dalam memberikan daya dukung terhadap masyarakat dan lingkungan, perlu adanya kajian khusus yang tepat bagi masyarakat dalam beradaptasi dengan pelaksanaan konservasi. Persiapan dan pelaksanaan strategi adaptasi yang tepat dalam menghadapi penetapan kawasan

konservasi harus dilakukan sehingga masyarakat tidak rentan dengan kondisi ini.

Salah satu wilayah yang ditetapkan sebagai bagian dari KKPD Raja Ampat adalah Distrik Misool Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat. Lokasi ini menjadi salah satu penerima penghargaan atas pengelolaan kawasan konservasi yang menjadi percontohan di tingkat nasional. KKPD Raja Ampat telah ditetapkan menjadi Kawasan Konservasi Perairan Nasional (KKPN) pada 3 September 2009 melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor Kep.64/Men/2009. Keputusan ini menetapkan perairan Kepulauan Raja Ampat dan Laut di sekitarnya sebagai Suaka Alam Perairan (SAP). Nelayan Misool Selatan-Raja Ampat merupakan nelayan dengan mata pencaharian pokok mencari ikan di laut. Pekerjaan ini yang dianggap memberikan hasil bagi penduduk setempat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Berdasarkan latar belakang tersebut, kajian ini menganalisis tentang: 1) karakteristik masyarakat nelayan di kawasan konservasi perairan daerah; 2) strategi adaptasi yang dilakukan nelayan dalam menghadapi penetapan kawasan konservasi perairan daerah.

METODOLOGI

Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif dan kualitatif. Metode kuantitatif dilakukan melalui teknik wawancara dengan instrumen kuesioner. Metode kualitatif diterapkan dengan menggunakan wawancara mendalam dan instrumen pedoman wawancara, observasi, dan studi literatur. Pendekatan kuantitatif dan kualitatif dikombinasikan dalam upaya memperkaya data dan lebih memahami fenomena sosial yang diteliti. Penelitian dilaksanakan dari bulan April 2014 sampai dengan Mei 2014. Penelitian ini dilakukan di Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) Raja Ampat, Papua Barat, tepatnya di Distrik Misool Selatan. Pemilihan lokasi dilakukan dengan sengaja (*purposive*) mempertimbangkan kondisi KKPD yang ada di Indonesia, diantaranya ialah:

1. KKPD Raja Ampat, salah satunya Distrik Misool Selatan merupakan kawasan konservasi yang menjadi percontohan pada tingkat nasional.
2. Pelaksanaan KKPD Raja Ampat melibatkan masyarakat dalam pengelolaannya.
3. Karakteristik masyarakat nelayan Misool Selatan yang sangat beragam dengan penduduk yang terdiri dari penduduk asli dan pendatang.

Data diperoleh dengan mewawancarai responden dan informan. Responden dalam penelitian ini adalah sebanyak 45 orang dari 250 kepala rumah tangga di Distrik Misool Selatan, yaitu yang bermatapencaharian sebagai nelayan. Informan dalam penelitian ini meliputi kelompok konservasi, aparat kampung, pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Raja Ampat, dan Lembaga Swadaya Masyarakat *The Nature Conservancy*. Pemilihan responden dilakukan dengan teknik *simple random sampling*, sedangkan pemilihan informan dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive*.

KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN DAERAH RAJA AMPAT

Kawasan Konservasi Perairan Daerah Raja Ampat

Berdasarkan laporan "Rencana Pengelolaan Taman Pulau-Pulau Kecil Daerah Raja Ampat" dari Unit Pelaksana Teknis Dinas KKPD, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Raja Ampat tahun 2012 Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KKP3K) Raja Ampat dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat No. 27 Tahun 2008 tentang Kawasan Konservasi Laut Daerah Kabupaten Raja Ampat dan dijabarkan melalui Peraturan Bupati Raja Ampat No. 5 Tahun 2009 tentang Kawasan Konservasi Laut Daerah Kabupaten Raja Ampat. Peraturan ini menyebutkan kawasan konservasi yang ada meliputi Kepulauan Ayau-Asia, Kawe, Selat Dampier, Teluk Mayalibit, Kepulauan Kofiau-Boo dan Misool Timur Selatan. Selain itu juga disebutkan pengelolaan kawasan konservasi ini dilakukan melalui rencana pengelolaan dan zonasi, secara kolaboratif dengan melibatkan masyarakat setempat serta sistem jejaring karena terdapat keterkaitan antara satu kawasan dengan kawasan lainnya.

Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) Raja Ampat terdiri dari daratan dan lautan sehingga menjadikannya sebagai taman laut terbesar di Indonesia dengan berbagai potensi sumber daya alam yang melimpah (Coremap II, 2009 *dalam* KKJI, 2013). Pada kawasan konservasi terdapat lebih dari 540 jenis karang keras, lebih dari 1 000 jenis ikan karang, dan 700 jenis moluska. Berbagai ekosistem yang ada di KKPD Raja Ampat menjamin kelangsungan hidup berbagai jenis fauna di dalamnya. Sebaran ekosistem tersebut meliputi

terumbu karang, hutan mangrove, dan padang lamun.

Pengelolaan jangka panjang di Raja Ampat memerlukan perencanaan tata ruang laut serta strategi pengelolaan yang memperhatikan konservasi dan pemanfaatan lestari dari sumber daya alam, juga pengetahuan lokal, budaya, sejarah dan aspirasi dari masyarakat Raja Ampat. Meskipun komunitas lokal dan Pemerintah Daerah Raja Ampat telah membuat kemajuan dalam mengembangkan dan menginisiasi pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Daerah Raja Ampat, namun masih terdapat sejumlah ancaman yang saat ini berlangsung maupun yang berpotensi mengancam ekosistem yang ada.

Kawasan Konservasi Perairan Daerah Misool Selatan

Kawasan konservasi perairan daerah Distrik Misool Selatan tergabung dalam KKPD Misool Timur Selatan. Penetapan ini dilakukan setelah adanya penelitian yang dilakukan pemerintah bersama Lembaga Swadaya Masyarakat terhadap sumber daya perairan yang ada di Misool Selatan pada tahun 2002 sampai 2004. Namun, selama ini masyarakat Misool Selatan lebih mengenal kawasan ini sebagai Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD) Distrik Misool Selatan. Hal ini terjadi karena sejak pembentukan kawasan konservasi pada tahun 2006, *The Nature Conservancy* (TNC) bersama Dinas Kelautan dan Perikanan Raja Ampat memperkenalkan kawasan konservasi laut daerah (KKLD). Fungsi KKLD dan KKPD memiliki kesamaan berdasarkan peraturan perundangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun daerah.

KKPD Distrik Misool Timur Selatan memiliki luas 366.000 ha dan 22 persen diantaranya adalah daerah tabungan ikan. Dukungan masyarakat terhadap kawasan konservasi dibuktikan dengan adanya deklarasi zonasi KKLP Misool Timur Selatan pada upacara adat Timai tahun 2012. Lima kampung utama yaitu Dabatan, Yellu, Harapan Jaya, Fafanlap, dan Kayerepop bersama-sama dengan distrik lain mendeklarasikan dukungan terhadap pelaksanaan kawasan konservasi perairan daerah. Hal ini dilakukan, karena setelah berjalannya KKPD masyarakat semakin merasakan perubahan pada kondisi perairan maupun aktivitas di perairan sekitar KKPD. Perbedaan tersebut ditunjukkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Perbedaan Aktivitas dan Kondisi yang Terjadi Sebelum dan Sesudah di Sekitar KKPD Misool Selatan.

Table 1. The Difference Between Activities and Condition That Occur After and Before KKPD South Misool Establishment.

No	Aktivitas dan Kondisi di Perairan / *Activity and Marine Condition*	KKPD Misool Selatan / *KKPD South Misool Establishment*	
		Sebelum/ *Before (1996-2005)*	Sesudah/ *After (2006-2014)*
1	Penggunaan alat tangkap / *Application of fishing gear*	Potasium, bom, kompresor, pukat harimau, bubu, jaring hanyut, jaring insang, dan pancing rawai / *Potassium, bombs, compressors, trawl net, traps, gill nets, and longline*	Pancing timah, pancing dasar, pancing tonda (kecuali di daerah tabungan ikan)/ *Tin fishing line, hook and line, trolling (except in the area of fish saving)*
2	Penangkapan ikan / *Fishing*	*Overfishing*	Dibatasi / *Restricted*
3	Daerah penangkapan ikan / *Fishing area*	Semua wilayah tangkap / *All fishing area*	Kecuali daerah tabungan ikan / *Except in the area of fish saving*
4	Peraturan alat tangkap / *Fishing gear regulation*	Tidak ada / *No*	Ada / *Yes*
5	Pengawasan laut dari nelayan luar / *Marine surveillance from outside fishermen*	Rusak / *Local fishermen*	Semakin membaik / *Local fishermen, NGO, private company, Raja Ampat local government*
6	Kondisi terumbu karang / *Coral reefs condition*	Rusak / *Damage*	Semakin membaik / *Getting better*
7	Peraturan kampung / *Village regulation*	Tidak tertulis (adat)/ *Unwritten (customary)*	Tertulis (peraturan kampung)/ *Written (village regulation)*
8	Penentuan waktu *sasi / The timing of Sasi*	Sesuai musim / *According to season*	TNC, adat, dan masyarakat / *TNC, customary law, communities*

Zonasi di KKPD Misool Selatan Raja Ampat

Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) Misool Selatan Raja Ampat merupakan kawasan perairan yang dilindungi dan dikelola melalui sistem zonasi untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya perairan dan lingkungan yang berkelanjutan. Sistem zonasi kawasan konservasi merupakan pembagian wilayah di dalam kawasan menjadi beberapa zona guna menentukan kegiatan-kegiatan pengelolaan yang diperlukan secara tepat dan efektif dalam rangka mencapai tujuan pengelolaan kawasan konservasi sesuai dengan fungsi dan peruntukkannya (Manoppo, 2002 *dalam* Randan, 2011). Zonasi menjadi pilihan pemetaan wilayah pengelolaan wilayah laut dan pesisir. Penetapan sistem zonasi ini memberikan konsekuensi baik secara langsung maupun tidak langsung. Dampak langsung yang pasti dirasakan masyarakat adalah perubahan pola pemanfaatan yang biasa mereka lakukan. Penetapan zona inti dan zona perlindungan di suatu lokasi mengalihkan sebagian nelayan untuk melakukan aktivitas penangkapan di lokasi lain (Priyanto, 2011).

Menurut Burke *et al.* (2012), KKPD adalah wilayah laut yang "sebagian besar atau seluruhnya dikelola di tingkat daerah" oleh perseorangan atau kelompok yang tinggal di dekatnya. Manfaat utama dari KKPD adalah masyarakat dapat menetapkan dan menyesuaikan pendekatan pengelolaan untuk memenuhi kebutuhan mendesak dan menangani sumber daya dan kegiatan tertentu. Pengaturan zonasi menjadi upaya memenuhi kebermanfaatan KKPD bagi masyarakat, khususnya nelayan.

Beberapa zona tersebut diantaranya zona inti, merupakan bagian dari kawasan konservasi di wilayah pesisir atau pulau-pulau kecil yang dilindungi. Zona ini ditujukan bagi perlindungan terhadap habitat dan populasi sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil. Pemanfaatan terhadap zona yang ada terbatas untuk kegiatan penelitian. Pada zona inti, masyarakat diperbolehkan untuk melakukan kegiatan yang menunjang keberlangsungan sumber daya yang ada, salah satunya adalah patroli pengawasan. Kegiatan lain dengan ijin tertentu diperbolehkan selama tidak merusak daerah sekitar perairan, seperti monitoring dan penelitian non ekstraktif, pendidikan lingkungan hidup dan wisata goa/ tempat keramat. Kegiatan lain yang mengganggu keberlangsungan sumber daya laut, terutama ikan, dilarang berada di daerah ini. Letak zona inti di KKPD Misool Selatan berada di laut sekitar Pulau Jaam.

Sub-zona ketahanan pangan dan pariwisata adalah daerah yang dilindungi dan diperuntukkan bagi perkembangan ikan dan biota laut lainnya. Sub zona ketahanan pangan dan pariwisata termasuk dalam zona pemanfaatan terbatas. Tujuan utama dalam sub zona ini sebagai sumber cadangan pangan bagi masyarakat dan sekaligus memberikan manfaat ekonomi melalui kegiatan ekowisata. Nelayan diperbolehkan untuk menangkap beberapa jenis ikan tertentu dan tidak diperbolehkan untuk melakukan budi daya. Selain itu, pada kawasan ini diperbolehkan adanya beberapa aktivitas pariwisata. Sub zona lain dalam zona pemanfaatan terbatas adalah sub zona perikanan berkelanjutan dan budi daya. Sub-zona perikanan berkelanjutan dan budi daya merupakan zona dengan nilai konservasi, tetapi dapat bertoleransi dengan adanya pemanfaatan budi daya ramah lingkungan. Pada sub-zona ini nelayan diperbolehkan untuk menangkap ikan dan melakukan budi daya, serta diperbolehkan adanya beberapa aktivitas pariwisata.

Zona lain di KKPD Misool Selatan adalah zona pemanfaatan lainnya. Zona ini terdiri dari sub zona pemanfaatan tradisional, sub zona *sasi*, dan zona pemanfaatan umum. Sub zona pemanfaatan tradisional merupakan daerah tangkap ikan bagi masyarakat tradisional yang masih menggunakan alat tangkap tradisional dalam skala kecil. Tujuan utama sub zona pemanfaatan tradisional adalah menjamin keberlangsungan mata pencaharian nelayan tradisional. Pada sub zona ini nelayan diperbolehkan untuk melakukan budi daya.

Sub zona lain yang termasuk dalam zona pemanfaatan terbatas adalah sub zona *sasi.* Sub zona *sasi* merupakan zona tradisional yang dilindungi dan diperuntukkan bagi pemanfaatan sumber daya alam yang disusun oleh masyarakat dan disahkan melalui mekanisme adat (*sasi*). Sub zona *sasi* disepakati oleh masyarakat dengan menentukan daerah laut yang sudah menjadi milik masyarakat adat. Perlindungan yang diberikan oleh masyarakat pada sumber daya laut terbatas pada beberapa biota laut tertentu yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Pada sub zona ini kegiatan penangkapan ikan dapat dilakukan menggunakan peralatan tradisional.

Sub zona pemanfaatan umum adalah daerah yang diperuntukkan bagi pengembangan infrastruktur. Sub zona pemanfaatan umum juga termasuk dalam zona pemanfaatan lainnya. Daerah yang termasuk dalam sub zona pemanfaatan umum

adalah lima kampung yang ada di Misool Selatan. Semua kegiatan pemanfaatan di darat dapat dilakukan oleh nelayan maupun masyarakat luar di daerah Misool Selatan. Namun ada beberapa kegiatan yang harus mendapatkan ijin, diantaranya pemakaian rumpon, wisata goa/tempat keramat, dan pembangunan infrastruktur *homestay*, resor permanen, atau untuk tujuan komersial.

KARAKTERISTIK SOSIAL BUDAYA DAN EKONOMI MASYARAKAT NELAYAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN DAERAH (KKPD) DI MISOOL SELATAN

Karakteristik Sosial Masyarakat Nelayan KKPD di Misool Selatan

Karakteristik masyarakat nelayan yang terjadi berupa hubungan sosial yang dilakukan nelayan dengan masyarakat lain yang ada di sekitar kawasan konservasi. Hal ini dilakukan nelayan agar terus bertahan hidup di sekitar kawasan konservasi melalui bidang sosial yang mampu mereka lakukan. Berdasarkan pengamatan karakteristik sosial masyarakat nelayan kawasan konservasi di Misool Selatan terjadi pada interaksi sosial nelayan dan organisasi kerja yang dilakukan nelayan.

i) Interaksi Sosial Nelayan

Interaksi sosial nelayan merupakan hubungan yang dilakukan nelayan dengan pihak lain terkait dengan ketahanan hidup mereka. Interaksi sosial ini disebutkan oleh Satria (2002) dengan stratifikasi masyarakat pesisir yang ditunjukkan dengan semakin bertambahnya jumlah posisi sosial atau jenis pekerjaan yang bersifat horizontal maupun vertikal dan berjenjang berdasarkan ukuran ekonomi, *prestise*, dan kekuasaan. Hal ini terjadi pada nelayan Misool Selatan dengan memilih interaksi sosial sebagai salah satu bidang yang dilakukan di sekitar KKPD. Pilihan kegiatan yang dilakukan oleh nelayan Misool Selatan, diantaranya merasakan adanya interaksi dengan *plasma*, melakukan peminjaman uang kepada tetangga, dan berhutang ke toko/kios terdekat.

Interaksi dengan *plasma* di Misool Selatan merepresentasikan sistem *patron-klien* yang selama ini dikenal masyarakat terutama masyarakat pesisir. *Plasma* adalah pihak memiliki ukuran ekonomi dan *prestise* yang berbeda dengan nelayan. *Plasma* memberikan kebutuhan melaut nelayan serta memberikan bantuan ketika nelayan yang kesulitan dalam kebutuhan sehari-hari. Nelayan sebagai *klien* sangat tergantung dengan *plasma*, karena ketika masa sulit mereka selalu bertumpu pada *plasma*.

Sebanyak 36,4 persen responden memilih hubungan dengan *plasma,* karena mereka merasakan hubungan ini sangat erat yang terjadi selama ini. Sebanyak 19,3 persen responden memilih meminjam uang kepada tetangga. Hal ini dikemukakan salah seorang responden yang sekarang lebih sering meminjam ke tetangga terdekat, karena kebutuhan semakin bertambah. Persentase terbesar yang dilakukan masyarakat nelayan di sekitar KKPD adalah berhutang ke toko/kios yang ada di sekitar pemukiman nelayan (44,3%). Hal ini mereka rasakan karena hampir setiap hari satu orang nelayan bisa menghabiskan 1 sampai 2 bungkus rokok, permen dan kebutuhan lainnya sehingga mereka berhutang. Nelayan membayar hutang ini setelah mendapatkan ikan atau hasil laut lainnya. Selain itu, kebutuhan yang semakin meningkat dan harga bahan sandang dan pangan yang tinggi membuat nelayan semakin sering berhutang ke toko/kios. Secara ringkas, persentase interaksi sosial masyarakat nelayan KKPD di Misool Selatan ditunjukkan dalam Gambar 1.

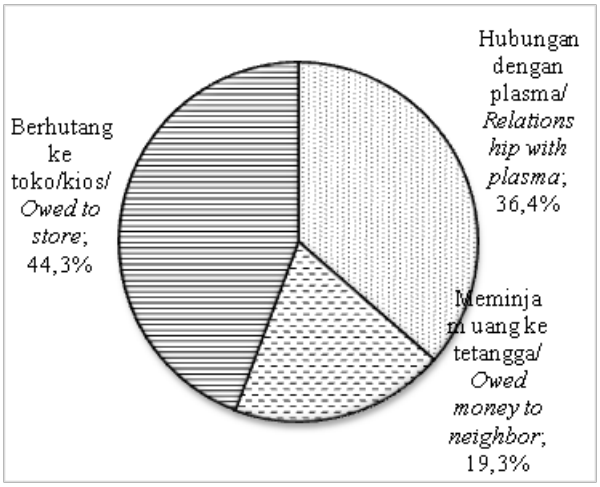
Hubungan dengan plasma/ Relations hip with plasma; 36,4%
Berhutang ke toko/kios/ Owed to store; 44,3%
Meminja m uang ke tetangga/ Owed money to neighbor; 19,3%

Gambar 1. Persentase Masyarakat Nelayan KKPD di Misool Selatan Berdasarkan Interaksi Sosial Masyarakat Nelayan KKPD di Misool Selatan.

Figure 1. Percentage of fishermen in KKPD South Misool by type of social interaction.

ii) Organisasi Kerja

Organisasi kerja yang dilakukan nelayan Misool Selatan menjadi bentuk interaksi sosial dari kumpulan nelayan yang berhubungan dengan sejumlah nelayan lain. Beberapa kegiatan yang

ditemukan ketika penelitian di lokasi, nelayan Misool Selatan mengikuti perkumpulan nelayan, mengikut pemilik kapal, dan menjadi pemimpin di perkumpulan nelayan. Namun selama penelitian dilakukan tidak ada organisasi/kelompok nelayan yang secara resmi dibentuk oleh nelayan bersama pemerintah setempat. Padahal nelayan setempat menginginkan adanya bantuan dalam pembentukan perkumpulan atau dalam bentuk kelompok yang nantinya akan membantu kegiatan perekonomian mereka.

Nelayan merupakan pihak yang menginginkan adanya kelompok nelayan sehingga dapat membantu mereka dalam penjualan hasil ikan hidup. Kelompok nelayan yang dimaksud adalah kelompok yang dibentuk dan dijalankan oleh nelayan sendiri. Selama ini nelayan tidak bisa menjual dalam jumlah kecil ke kapal besar. Nelayan kecil merasa kesulitan ketika akan menjual hasil ikan hidup yang mereka dapatkan. Kapal besar hanya menerima dalam jumlah besar melalui kelompok sehingga muncul plasma yang mengumpulkan ikan hidup milik nelayan.

Perkumpulan nelayan yang ada di Misool Selatan lebih terlihat sebagai bentuk perkumpulan nelayan yang tidak terstruktur dan tidak jelas siapa yang menjadi pemimpin kelompok dan siapa yang menjadi anggota. Nelayan Misool Selatan selama satu minggu melaut dan tinggal di sekitar pulau terdekat dengan daerah melaut mereka. Nelayan setempat menyebut hal ini dengan camp, suatu tempat yang menjadi tempat berinteraksi antar nelayan lain yang sedang beristirahat dan sebagai tempat menyimpan ikan sementara dalam keramba apung.

Camp juga merupakan gubuk kecil yang didirikan nelayan dan menjadi salah satu pusat organisasi kerja yang mempertemukan nelayan dari berbagai kampung yang ada di Misool Selatan maupun distrik lain.

Gambar 2 menunjukkan sebanyak 50,7 persen nelayan memilih mengikuti perkumpulan nelayan, dalam hal ini adalah camp nelayan. Sebanyak 23,9 persen nelayan memilih pernah mengikut pemilik kapal. Kapal yang nelayan maksud adalah kapal bagan apung yang beroperasi di sekitar laut Misool Selatan. Secara langsung nelayan yang pernah membagi kerja menjadi pemimpin kelompok sementara yang nantinya bisa berganti. Hal ini ditunjukkan sebanyak 25,4 persen nelayan menjadi pemimpin kelompok sementara.

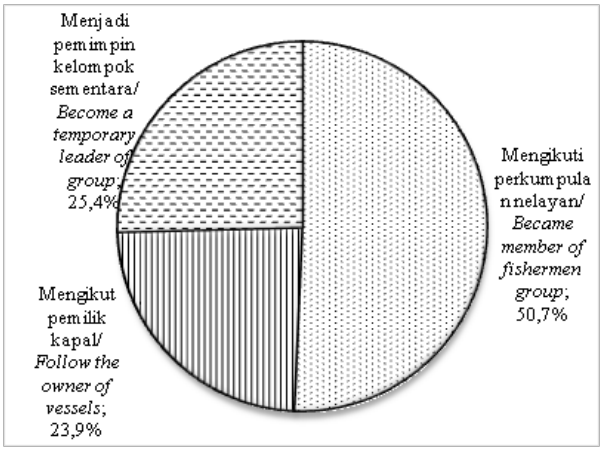
Menjadi pemimpin kelompok sementara/ Become a temporary leader of group; 25,4%
Mengikuti perkumpulan nelayan/ Became member of fishermen group; 50,7%
Mengikut pemilik kapal/ Follow the owner of vessels; 23,9%

Gambar 2. Persentase Masyarakat Nelayan KKPD di Misool Selatan Berdasarkan Organisasi Kerja Masyarakat Nelayan KKPD di Misool Selatan.

Figure 2. Percentage of Fishermen in KKPD South Misool by Type of Organization Work.

Karakteristik Budaya Masyarakat Nelayan KKPD di Misool Selatan

Karakteristik budaya masyarakat nelayan didefinisikan sebagai perilaku yang berhubungan dengan tradisi ataupun kebiasaan yang dilakukan oleh nelayan. Namun budaya yang sejak dahulu dijalankan semakin terkikis dengan adanya perubahan yang terjadi di masyakat. Perubahan tersebut terlihat pada teknologi yang semakin berkembang dan komposisi penduduk yang mayoritas adalah masyarakat nelayan pendatang.

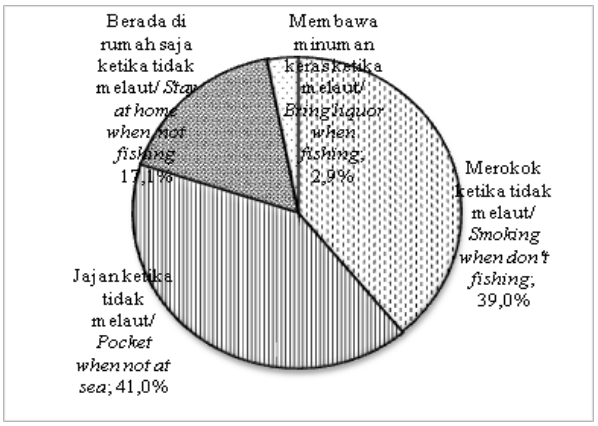
Berada di rumah saja ketika tidak melaut/ Stay at home when not fishing; 17,1%
Membawa minuman keras ketika melaut/ Bring liquor when fishing; 2,9%
Merokok ketika tidak melaut/ Smoking when don't fishing; 39,0%
Jajan ketika tidak melaut/ Pocket when not at sea; 41,0%

Gambar 3. Persentase Masyarakat Nelayan KKPD di Misool Selatan Berdasarkan Kebiasaan Hidup Masyarakat Nelayan KKPD di Misool Selatan.

Figure 3. Percentage of Fishermen in KKPD South Misool by Type Of Lifestyle.

Gaya hidup yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kebiasaan yang nelayan lakukan sehari-hari. Beberapa kegiatan yang semakin menjadi kebiasaan nelayan diantaranya merokok ketika tidak melaut, jajan ketika tidak melaut, berada di rumah saja ketika tidak melaut, dan membawa minuman keras ketika melaut. Gambar 3 menunjukkan terdapat sebesar 39 persen responden yang merokok ketika tidak melaut, 41 persen responden jajan ketika tidak melaut, 17,1 persen responden berada di rumah ketika tidak melaut, dan 2,9 persen membawa minuman keras ketika tidak melaut. Persentase terbesar ada pada aktivitas jajan ketika tidak melaut. Hal tersebut diungkapkan oleh Muflikhati (2010) bahwa nelayan sangat boros dalam menggunakan uang dengan menghabiskan banyak uang untuk merokok dan jajan.

Hal lain diakui nelayan bahwa mereka sering merokok ketika tidak melaut, jajan karena tidak melaut dengan berhutang ke kios, tetap berada di rumah dan terkadang membawa minuman keras ketika melaut di malam hari agar menjaga suhu badan tetap hangat.

Karakteristik Ekonomi Masyarakat Nelayan KKPD di Misool Selatan

Karakteristik ekonomi masyarakat nelayan KKPD di Misool Selatan terjadi pada berbagai bentuk, diantaranya manajemen keuangan nelayan, diversifikasi pekerjaan, dan adaptasi teknologi sebagai usaha meningkatkan hasil tangkapan mereka. Manajemen keuangan didasarkan pada pengalokasian keuangan nelayan untuk kebutuhan sehari-hari maupun bulanan mereka. Diversifikasi pekerjaan melihat pemanfaatan sumber daya yang ada di sekitar pesisir. Sebagaimana disebutkan oleh Satria (2002) bahwa nelayan bergantung pada sumber daya pesisir, salah satunya mata pencaharian lain diluar sebagai nelayan. Adaptasi teknologi menjadi bentuk respon terhadap teknologi yang berkembang untuk meningkatkan hasil laut mereka.

i) Manajemen Keuangan

Manajemen keuangan merupakan karakteristik masyarakat nelayan KKPD di Misool Selatan dengan menganekaragamkan penggunaan keuangan mereka. Manajemen keuangan tersebut meliputi menggunakan uang untuk kebutuhan makan, jajan dan membeli rokok, umtuk merawat perahu, dan untuk menambah alat tangkap. Pancasasti (2008) menyebutkan bahwa nelayan menggunakan lebih dari 50 persen keuangan untuk konsumsi pangan. Hal ini tidak berbeda jauh dengan yang dilakukan nelayan Misool Selatan. Sebesar 25,7 persen dari responden banyak menggunakan uang mereka untuk kebutuhan makan. Kondisi tersebut didukung dengan yang terjadi di lokasi penelitian bahwa kebutuhan makan (beras) nelayan dalam sehari bisa mencapai 2 kg dengan harga antara Rp. 10 000 sampai Rp. 12 000 per hari.

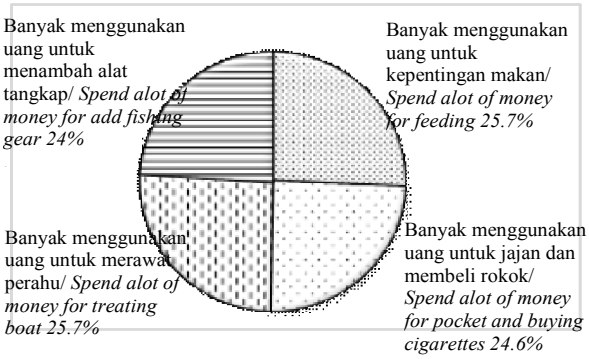
Banyak menggunakan uang untuk menambah alat tangkap/ Spend alot of money for add fishing gear 24%
Banyak menggunakan uang untuk kepentingan makan/ Spend alot of money for feeding 25.7%
Banyak menggunakan uang untuk merawat perahu/ Spend alot of money for treating boat 25.7%
Banyak menggunakan uang untuk jajan dan membeli rokok/ Spend alot of money for pocket and buying cigarettes 24.6%

Gambar 4. Persentase Masyarakat Nelayan KKPD di Misool Selatan Berdasarkan Penggunaan Keuangan.

Figure 4. Percentage of Fishermen in KKPD South Misool by Type of Financial Management.

Gambar 4 menunjukkan sebesar 24,6 persen penggunaan keuangan untuk jajan dan membeli rokok. Hal ini pun ditunjukkan bahwa 39 persen responden nelayan merokok dan 41 persen responden nelayan jajan ketika tidak melaut (Gambar 3). Disebutkan juga oleh Muflikhati (2010) bahwa pengalokasian keuangan yang ada pada nelayan sebagian besar untuk jajan dan merokok. Gambar 4 menyebutkan alokasi keuangan untuk merawat perahu sebesar 25,7 persen karena nelayan merasa perahu merupakan barang yang sangat menunjang aktivitas melaut mereka dan sebesar 24 persen responden menggunakan uang mereka untuk menambah alat tangkap. Menambah alat tangkap lebih banyak dilakukan pada berbagai ukuran pancing timah yang digunakan untuk melaut.

ii) Diversifikasi pekerjaan

Masyarakat nelayan Misool Selatan melakukan pekerjaan lain yang menunjang kebutuhan hidup mereka. Diversifikasi pekerjaan menjadi salah satu bentuk karakteristik masyarakat nelayan Misool Selatan pada bidang ekonomi.

Hal tersebut diungkapkan oleh Mugni (2006) dan Muflikhati (2010) bahwa nelayan melakukan pekerjaan lain khususnya pada musim paceklik. Diversifikasi pekerjaan yang dilakukan masyarakat nelayan Misool Selatan antara lain memiliki kios/ toko untuk berjualan, membuka kebun, bekerja di perusahaan, budi daya rumput laut, dan membeli dan memelihara ternak.

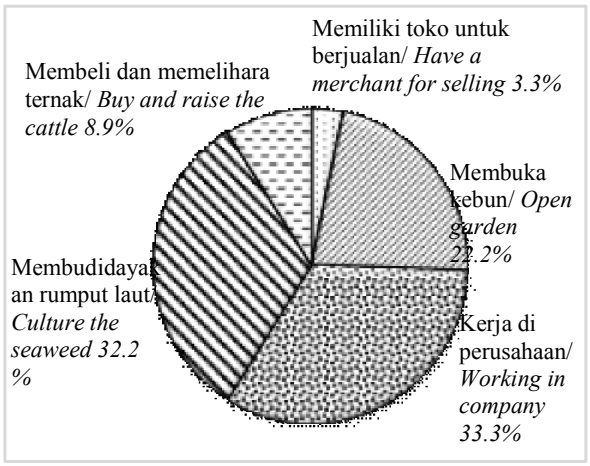
Memiliki toko untuk berjualan/ *Have a merchant for selling 3.3%*
Membeli dan memelihara ternak/ *Buy and raise the cattle 8.9%*
Membuka kebun/ *Open garden 22.2%*
Membudidayakan rumput laut/ *Culture the seaweed 32.2 %*
Kerja di perusahaan/ *Working in company 33.3%*

Gambar 5. Persentase Masyarakat Nelayan KKPD di Misool Selatan Berdasarkan Diversifikasi Pekerjaan Masyarakat Nelayan KKPD di Misool Selatan.

Figure 5. Percentage of Fishermen in KKPD South Misool by Type Of Occupation Diversification.

Gambar 5 menunjukkan terdapat sebesar 3.3 persen nelayan yang memiliki kios/toko untuk berjualan, 22.2 persen nelayan membuka kebun, 33.3 persen nelayan bekerja di perusahaan, 32.2 persen nelayan membudidaya rumput laut, dan 8.9 persen nelayan membeli dan memelihara ternak. Persentase terkecil terdapat pada nelayan yang memiliki kios/toko untuk berjualan. Hal ini terjadi karena pemilik kios/toko adalah nelayan pendatang dari kampung sekitar atau distrik lain. Persentase tertinggi dari diversifikasi pekerjaan nelayan terdapat pada kerja di perusahaan. Perusahaan yang dimaksud adalah perusahaan mutiara yang beroperasi di sekitar KKPD di Misool Selatan. Sebesar 33.3 persen nelayan juga bekerja di perusahaan mutiara.

iii) Adaptasi Teknologi

Adaptasi teknologi merupakan salah satu aktivitas nelayan yang ada di KKPD berhubungan dengan penggunaan teknologi yang disesuaikan dengan kondisi yang terjadi. Hal tersebut diungkapkan oleh Herdian (2003) bahwa nelayan menggunakan kapal bermotor tempel sebagai usaha meningkatkan hasil tangkapan. Selain itu nelayan melakukan modifikasi alat tangkap sesuai kondisi perairan (Sihombing, 2003). Hal ini terjadi di nelayan Misool Selatan sebagai bentuk aktivitas adaptasi wilayah di KKPD.

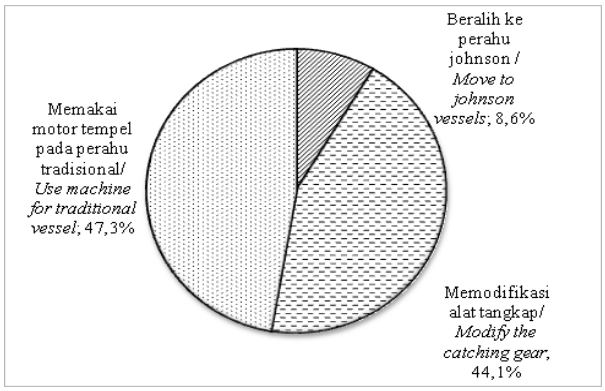
Beralih ke perahu johnson / *Move to johnson vessels*; 8,6%
Memakai motor tempel pada perahu tradisional/ *Use machine for traditional vessel*; 47,3%
Memodifikasi alat tangkap/ *Modify the catching gear*, 44,1%

Gambar 6. Persentase Masyarakat Nelayan KKPD di Misool Selatan Berdasarkan Adaptasi Teknologi Masyarakat Nelayan KKPD di Misool Selatan.

Figure 6. Percentage of Fishermen in KKPD South Misool by Type Of Technology Adaptation.

Gambar 6 menunjukkan sebesar 8,6 persen responden beralih ke perahu *johnson* (perahu mesin), 44,1 persen responden memodifikasi alat tangkap, dan 47,3 persen responden memakai motor tempel pada perahu tradisional. Persentase terbesar ada pada tetap memakai motor tempel pada perahu tradisional. Hampir tidak ditemui nelayan yang melaut menggunakan perahu dayung.

Sebesar 44,1 persen responden nelayan memodifikasi alat tangkap mereka. Memodifikasi alat tangkap yang dilakukan nelayan adalah menambah dan beralih ke alat tangkap yang diperbolehkan di sekitar KKPD seperti berbagai ukuran pancing timah.

STRATEGI ADAPTASI NELAYAN TERHADAP PENETAPAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN DAERAH (KKPD)

Diversifikasi Kegiatan Ekonomi

Sumber penghasilan nelayan Distrik Misool Selatan tidak hanya berasal dari hasil laut yang mereka dapatkan. Sumber penghasilan itu berasal dari berbagai kegiatan lain di luar bidang perikanan. Hasil pengolahan data pada bab sebelumnya

menunjukkan bahwa terdapat strategi-strategi adaptasi yang dilakukan nelayan Misool Selatan dalam menghadapi penetapan kawasan laut menjadi kawasan konservasi perairan daerah. Kombinasi pekerjaan lain yang dilakukan nelayan Misool Selatan menjadikan hal ini sebagai bentuk penganekaragaman sumber penghasilan dan menjadi bentuk adaptasi.

Sejak tahun 2007 nelayan Misool Selatan melakukan diversifikasi kegiatan ekonomi pada kegiatan di bidang perikanan dan non-perikanan. Selain mencari ikan, nelayan mengusahakan budi daya rumput laut. Namun karena keterbatasan pengetahuan tentang budi daya rumput laut, usaha ini kurang memberikan hasil dan berhenti. Selain itu, nelayan mengubah penjualan hasil laut ke orang yang bukan menjadi pembeli seperti biasanya. Kegiatan ini mereka lakukan untuk mendapatkan pembeli lain dan membuat hasil laut mereka terjual.

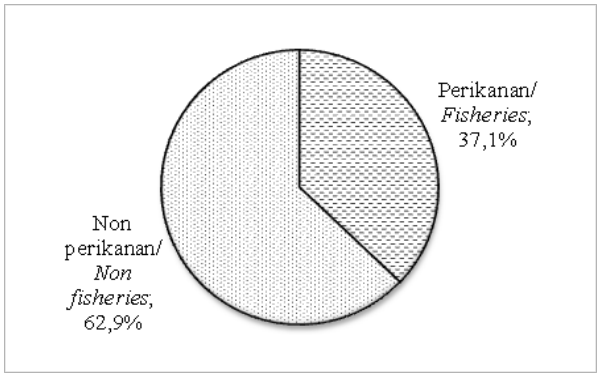

Gambar 7. Persentase Masyarakat Nelayan KKPD di Misool Selatan Berdasarkan Kegiatan Ekonomi Nelayan pada Bidang Perikanan dan Non Perikanan.

Figure 7. Percentage of Fishermen in KKPD South Misool by Type Of Economic Activity.

Gambar 7 menunjukkan nelayan Misool Selatan yang melakukan kegiatan ekonomi melalui bidang perikanan sebesar 37,1 persen dan non perikanan sebesar 62,9 persen. Hal ini diungkapkan oleh Satria (2009) bahwa terdapat dua macam strategi nafkah ganda yang dilakukan nelayan, yaitu di bidang perikanan dan non-perikanan. Nelayan Misool Selatan menerapkan kegiatan ekonomi di bidang perikanan dengan membudidaya rumput laut sebesar 22,8 persen dan mengubah penjualan hasil laut ke orang yang bukan menjadi pembeli seperti biasanya sebesar 77,2 persen (Gambar 8).

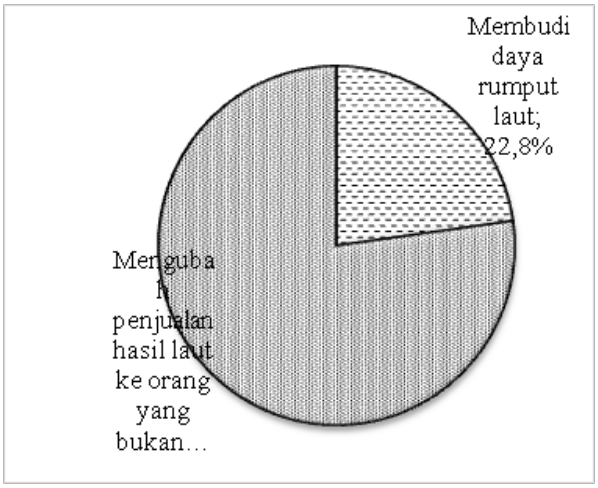

Gambar 8. Persentase Masyarakat Nelayan KKPD di Misool Selatan Berdasarkan Kegiatan Ekonomi di Bidang Perikanan.

Figure 8. Percentage of Fishermen in KKPD South Misool by Type Of Economic Activity In Fisheries Affairs.

Gambar 9 menunjukkan kegiatan pada bidang non perikanan yang dilakukan nelayan adalah bekerja sebagai kuli bangunan (29,9%), mengikutsertakan anggota keluarga untuk bekerja (30,9%), membeli dan memelihara ternak (8,3%), dan bekerja di perusahaan (30,9%).

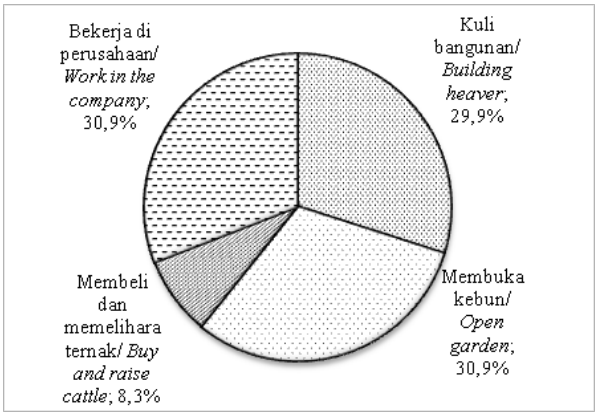
Bekerja di perusahaan/ *Work in the company*; 30,9%
Kuli bangunan/ *Building heaver*; 29,9%
Membeli dan memelihara ternak/ *Buy and raise cattle*; 8,3%
Membuka kebun/ *Open garden*; 30,9%

Gambar 9. Persentase Masyarakat Nelayan KKPD di Misool Selatan Berdasarkan Kegiatan Ekonomi di Bidang Non Perikanan.

Figure 9. Percentage of fishermen in KKPD South Misool by Type Of Economic Activity In Non-Fisheries Affairs.

Bekerja di perusahaan menjadi kegiatan yang paling banyak dilakukan oleh nelayan Misool Selatan. Walaupun hanya menjadi karyawan, pendapatan dari bekerja di perusahaan menjadi

salah satu sumber penghasilan dan tumpuan kebutuhan hidup nelayan. Sebagian besar masyarakat nelayan Misool Selatan pernah dan sedang menjadi karyawan perusahaan budi daya mutiara. Nelayan merasa pekerjaan ini memberikan penghasilan yang pasti di setiap bulannya. Tidak hanya kepala rumah tangga, ibu rumah tangga pun menjadi salah satu pelaku strategi adaptasi nelayan pada bidang ini.

Investasi

Investasi menjadi salah satu bentuk pengalokasian dana yang dimiliki nelayan ke bentuk lain. Pada penelitian ini investasi dibedakan menjadi investasi pada bidang perikanan dan non perikanan. Gambar 10 menunjukkan persentase investasi pada bidang perikanan menjadi kegiatan utama (65,8%). Sedangkan investasi pada bidang non perikanan dilakukan oleh 34,2 persen responden nelayan.

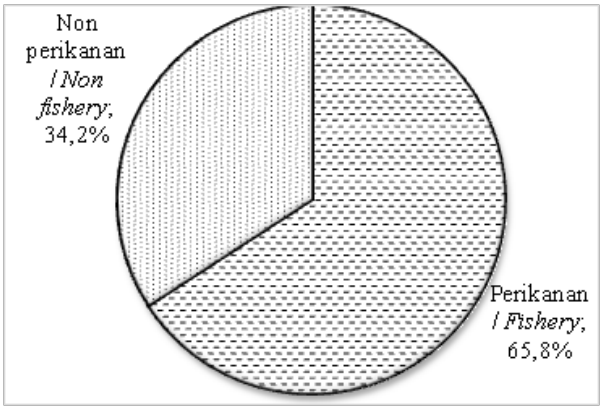

Gambar 10. Persentase Masyarakat Nelayan KKPD di Misool Selatan Berdasarkan Investasi Pada Bidang Perikanan Dan Non Perikanan.

Figure 10. Percentage of Fishermen in KKPD South Misool by Type Of Investation.

Investasi pada bidang perikanan dilakukan oleh masyarakat nelayan dengan menambah jenis alat tangkap (51,9%), membeli mesin perahu (28,6%), dan menambah armada perahu (19.5%). Gambar 11 menunjukkan kegiatan menambah jenis alat tangkap adalah kegiatan yang paling banyak dilakukan oleh nelayan. Menambah alat tangkap dilakukan dengan menambah ukuran salah satu jenis alat tangkap yang sering digunakan untuk menangkap ikan, seperti pancing timah dengan berbagai ukuran.

Sebelum adanya penetapan kawasan konservasi perairan daerah, nelayan masih menggunakan alat tangkap yang merusak, seperti bom, bius, kompressor, pukat harimau, bubu, jaring hanyut, jaring insang dan pancing rawal. Namun, setelah adanya penetapan kawasan konservasi perairan daerah, nelayan meninggalkan kebiasaan mengambil hasil laut yang merusak. Alat penangkapan yang masih digunakan hingga sekarang adalah berbagai ukuran pancing. Adaptasi yang dilakukan nelayan adalah dengan menambah ukuran pancing yang digunakan.

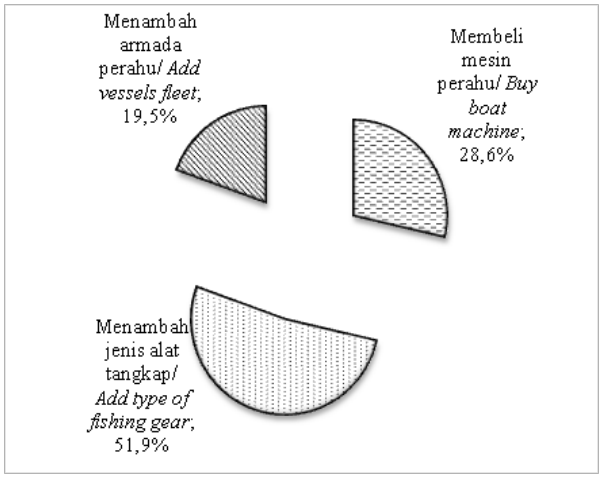
Menambah armada perahu/ *Add vessels fleet*; 19,5%
Membeli mesin perahu/ *Buy boat machine*; 28,6%
Menambah jenis alat tangkap/ *Add type of fishing gear*; 51,9%

Gambar 11. Persentase Masyarakat Nelayan KKPD di Misool Selatan Berdasarkan Investasi Kegiatan Ekonomi di Bidang Perikanan.

Figure 11. Percentage of Fishermen in KKPD South Misool by Type Of Investation In Fisheries Economic Activity.

Masyarakat mengetahui penggunaan alat tangkap yang dapat merusak laut, terutama terumbu karang yang menjadi tempat bertelur dan pemijahan ikan. Hal ini didapatkan nelayan melalui sosialisasi penggunaan alat tangkap ramah lingkungan yang dilakukan oleh pemerintah bersama LSM. Walaupun masih ada masyarakat yang tidak mengerti manfaat yang akan didapatkan, pelaksanaan KKPD mengurangi penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan. Salah satu hasilnya adalah kondisi terumbu karang semakin yang membaik.

Kegiatan yang paling sedikit dilakukan oleh nelayan adalah menambah armada perahu. Kegiatan menambah armada perahu merupakan penggantian jenis perahu yang dimiliki nelayan. Daerah tangkapan yang semakin jauh membuat

nelayan beralih dari perahu tradisional ke perahu bermotor. Kondisi daerah tangkapan ini membuat sebagian nelayan yang lain memiliki lebih dari satu perahu. Nelayan mendapatkan perahu-perahu tersebut dengan membeli sendiri atau dari bantuan pemerintah. Pada bidang non perikanan, nelayan hanya melakukan investasi dengan membeli perhiasan sebagai tabungan.

Jaringan Sosial

Jaringan sosial atau hubungan sosial menjadi salah satu ciri nelayan sebagai makhluk sosial yang membutuhkan orang lain dalam proses hidupnya. Hal ini merupakan salah satu upaya nelayan untuk bertahan dari perubahan kondisi yang terjadi. Strategi adaptasi dalam bentuk jaringan sosial dilakukan nelayan untuk memenuhi kebutuhan mereka, seperti penguasaan sumber daya, permodalan, memperoleh keterampilan, pemasaran hasil dan pemenuhan kebutuhan pokok (Wahyono *et al*., 2001).

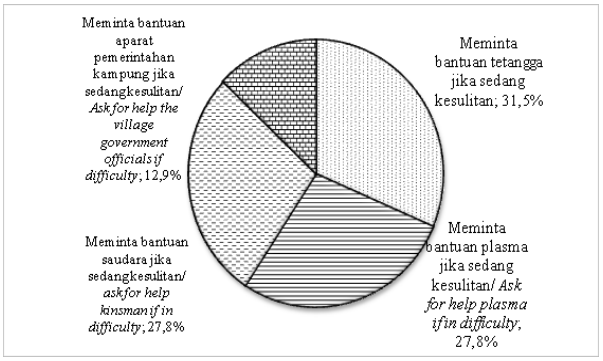
Meminta bantuan aparat pemerintahan kampung jika sedang kesulitan/ Ask for help the village government officials if difficulty; 12,9%
Meminta bantuan tetangga jika sedang kesulitan; 31,5%
Meminta bantuan saudara jika sedang kesulitan/ ask for help kinsman if in difficulty; 27,8%
Meminta bantuan plasma jika sedang kesulitan/ Ask for help plasma if in difficulty, 27,8%

Gambar 12. Persentase Masyarakat Nelayan KKPD di Misool Selatan Berdasarkan Hubungan Sosial Nelayan dengan Pihak Lain.

Figure 12. Percentage of fishermen in KKPD South Misool by Type Of Social Relations Between Fishermen And Other Parties.

Kegiatan yang dilakukan nelayan dalam kerangka jaringan sosial dalam bentuk hubungan dengan tetangga, hubungan dengan *plasma*, hubungan dengan saudara, dan hubungan dengan aparat pemerintahan kampung. Persentase tersebut menunjukkan hubungan nelayan dengan tetangga adalah jenis kegiatan yang paling banyak dilakukan, yaitu sebesar 31,5 persen. Berdasarkan jaringan yang terjadi di masyarakat nelayan, 27,8 persen responden menunjukkan nelayan berhubungan dengan *plasma* apabila sedang dilanda kesulitan. Sama halnya pada tingkat keluarga, nelayan memanfaatkan fungsi hubungan keluarga (27,5%). Pemerintahan kampung sebagai pengayom masyarakat nelayan menjadi salah satu jenis hubungan sosial yang dilakukan nelayan (12,9%).

Jaringan sosial nelayan Misool Selatan menunjukkan hubungan sosial yang terbagi menjadi dua jenis, yaitu hubungan sosial secara horizontal dan vertikal. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Kusnadi (2000) bahwa status sosial-ekonomi rumah tangga nelayan terbagi menjadi dua jenis hubungan sosial yaitu hubungan sosial bersifat horizontal dan vertikal. Pada penelitian ini hubungan sosial yang bersifat horizontal adalah hubungan nelayan dengan tetangga dan saudara. Hubungan sosial dengan tetangga memiliki status sosial yang sama, walaupun kondisi ekonomi yang berbeda tetapi kondisi ekonomi nelayan di lokasi penelitian secara umum tidak jauh berbeda. Hubungan sosial dengan saudara merupakan hal wajar yang dilakukan oleh nelayan ataupun rumah tangga lain ketika ada salah satu diantaranya membutuhkan bantuan. Hubungan yang bersifat vertikal terwujud dalam bentuk hubungan dengan aparat pemerintahan kampung dan hubungan dengan *plasma* dalam sistem *patron-klien*.

Aparat pemerintahan kampung memiliki tugas dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Walaupun kondisi ekonomi individu aparat pemerintahan kampung yang relatif sama dengan nelayan lain, status sosial sebagai aparat pemerintahan kampung menjadi faktor utama dalam hubungan sosial nelayan secara vertikal. Kondisi ini diperkuat dengan adanya kepala adat ataupun kerabat yang menjadi bagian dari aparat pemerintahan kampung. Pengaruh kepala adat menentukan keputusan dari setiap musyawarah yang dilakukan masyarakat.

Jaringan sosial yang dibangun dengan *plasma* merupakan bentuk sistem *patron-klien* yang selama ini masih terjadi pada masyarakat nelayan di Indonesia. *Plasma* yang memerankan sebagai *patron* adalah pengumpul ikan hidup hasil tangkapan nelayan dan kemudian menjual dalam jumlah besar ke kapal dari negara lain. *Klien* adalah nelayan-nelayan kecil yang menangkap ikan hidup dan memiliki ketergantungan pada *plasma* dalam berbagai hal, khususnya dalam bidang sosial ekonomi mereka. Bentuk hubungan yang selama ini dilakukan dalam sistem *patron-klien* adalah pinjaman uang ketika dalam masa sulit, penyediaan

rokok, bantuan keperluan alat tangkap seperti mesin perahu dan alat tangkap lain. Nelayan di Misool Selatan menyadari bahwa mereka harus menjual hasil tangkapan ikan hidup kepada *plasma*, karena selama ini *plasma* memberikan bantuan. Hal ini menimbulkan ketergantungan nelayan kepada *plasma*.

Hubungan *patron-klien* semakin menguat manakala nelayan semakin sulit mencari ikan. Alasan utama mereka adalah daerah tangkapan yang telah berubah sejak penetapan KKPD. Hal ini memaksa mereka untuk mencari daerah lain yang cukup jauh agar mendapatkan ikan. Selain itu, kondisi kawasan yang masih dalam tahap pemulihan akibat penangkapan ikan dengan alat yang dilarang, menjadi tantangan nelayan untuk ikut mengawasi wilayah laut mereka.

Migrasi

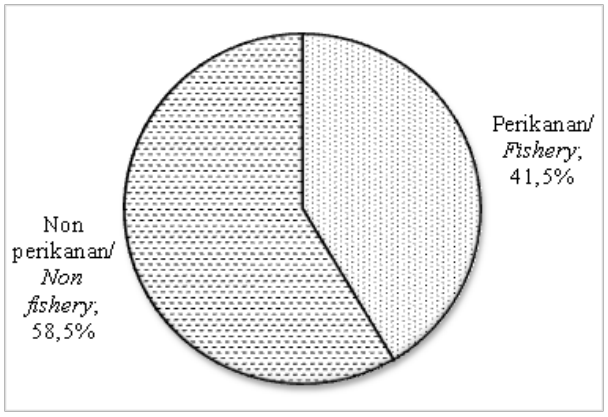

Gambar 13. Persentase Masyarakat Nelayan KKPD di Misool Selatan Berdasarkan Migrasi Pada Bidang Perikanan dan Non Perikanan.

Figure 13. Percentage of Fishermen in KKPD South Misool by Type Of Migration on Fisheries and Non Fisheries Affairs.

Migrasi secara regional yang selama ini pernah dilakukan menitikberatkan pada peningkatan kepadatan penduduk yang pesat di daerah-daerah tertentu, sebagai distribusi penduduk yang tidak merata. Namun pada penelitian ini migrasi dilakukan karena kebutuhan ekonomi nelayan. Migrasi menjadi salah satu strategi adaptasi yang dilakukan nelayan untuk bertahan dari perubahan pada kawasan konservasi. Penelitian ini terlebih dahulu memisahkan strategi adaptasi pada investasi di bidang perikanan dan non perikanan. Hasil penelitian menunjukkan migrasi pada bidang perikanan sebesar 41,5 persen dengan memperluas daerah tangkapan ikan (Gambar 14).

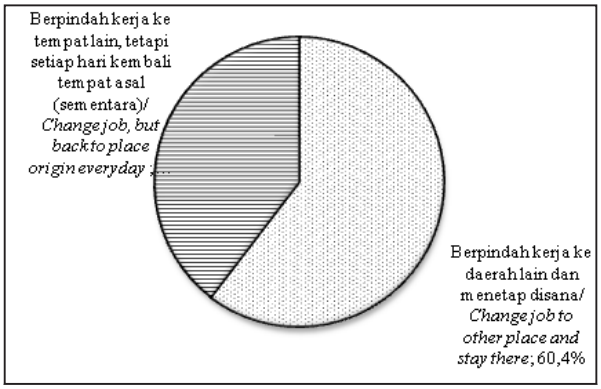

Gambar 14. Persentase Masyarakat Nelayan KKPD di Misool Selatan Berdasarkan Tipe Migrasi Atas Waktu.

Figure 14. Percentage of Fishermen in KKPD South Misool by Type Of Migration Based On Time.

Daerah tangkapan nelayan yang sebelumnya hanya di wilayah kampung sekitar mereka menjadi meluas ke daerah kampung lain. Kondisi tersebut dirasakan oleh hampir semua nelayan responden, namun mereka saling memahami ketika ada nelayan dari kampung lain masuk ke daerah tangkapan mereka. Terkecuali bagi nelayan dari luar Raja Ampat, nelayan sekitar Misool Selatan akan bertindak tegas jika tidak ada ijin tangkap ataupun ijin dari pemerintahan kampung untuk menangkap ikan di daerah tangkapan masing-masing kampung.

Gambar 14 menunjukkan sebesar 58,5 persen responden melakukan migrasi non perikanan. Migrasi non perikanan dibedakan dalam dua bentuk yaitu berdasarkan waktu dan keikutsertaan anggota keluarga.

Berdasarkan waktu, migrasi pada penelitian ini dibedakan menjadi 2 kegiatan yaitu berpindah kerja ke daerah lain dan menetap di sana dan berpindah kerja ke tempat lain tetapi setiap hari kembali ke tempat asal (sementara). Gambar 15 menunjukkan kegiatan yang paling banyak dilakukan nelayan adalah berpindah kerja ke daerah lain dan menetap di sana (60,4%) dan berpindah kerja ke tempat lain tetapi hanya sementara waktu sebesar 39,6 persen. Pengamatan di lokasi penelitian juga menunjukkan masyarakat yang menetap dan bermukim bukan nelayan asli dari kampung tersebut.

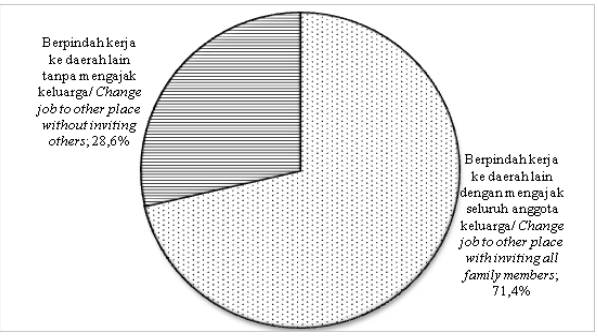
Berpindah kerja ke daerah lain tanpa mengajak keluarga/ Change job to other place without inviting others; 28,6%
Berpindah kerja ke daerah lain dengan mengajak seluruh anggota keluarga/ Change job to other place with inviting all family members; 71,4%

Gambar 15. Persentase Masyarakat Nelayan KKPD di Misool Selatan Berdasarkan Jenis Migrasi pada Anggota Keluarga.

Figure 15. Percentage of Fishermen in KKPD South Misool by Type Of Migration Based on Family Members.

Migrasi berdasarkan keikutsertaan anggota keluarga dilakukan oleh 71,4 persen nelayan dengan mengajak seluruh anggota keluarga dan 28,6 persen tanpa mengajak keluarga. Keikutsertaan anggota keluarga dengan mengajak seluruh anggota keluarga mendominasi strategi adaptasi migrasi. Hal ini terjadi karena mayoritas penduduk pendatang yang awalnya hanya sendiri bermigrasi mengajak anggota keluarga lain untuk ikut bekerja. Terlihat pada karakteristik rumah tangga responden (nelayan) yang memiliki anggota rumah tangga berjumlah 4-6 orang. Lain halnya dengan migrasi tanpa mengajak keluarga yang mayoritas dilakukan oleh pemuda Misool Selatan.

PENUTUP

Kawasan Konservasi Perairan Daerah merupakan kawasan perairan yang dilindungi agar mampu mewujudkan pengelolaan sumber daya laut berkelanjutan. Hal yang perlu diperhatikan adalah sumber daya di kawasan KKPD dan karakteristik sosial-budaya dan ekonomi nelayan. Karakteristik sosial masyarakat nelayan ditunjukkan melalui interaksi sosial masyarakat nelayan. Persentase interaksi sosial menunjukkan kegiatan berhutang ke toko/kios terdekat sebagai jenis yang paling banyak dilakukan, selain hubungan dengan *plasma* dan meminjam uang ke tetangga. Organisasi kerja masyarakat nelayan menunjukkan sebagian besar masyarakat nelayan pernah mengikuti perkumpulan nelayan, selain dari mengikut pemilik kapal dan menjadi pemimpin kelompok sementara. Karaktersitik budaya masyarakat nelayan ditunjukkan melalui gaya hidup. Gaya hidup nelayan terdiri dari kebiasaan jajan, merokok, berada di rumah ketika tidak melaut dan membawa minuman keras ketika melaut.

Karaktersitik ekonomi nelayan ditunjukkan melalui manajemen keuangan nelayan, diversifikasi pekerjaan dan adaptasi teknologi. Manajemen keuangan nelayan menunjukkan sebagian besar penggunaan keuangan untuk kebutuhan makan dan perawatan perahu, selain untuk jajan, membeli rokok dan menambah alat tangkap. Diversifikasi pekerjaan dilakukan oleh sebagian besar nelayan dengan bekerja di perusahaan, selain membudidaya rumput laut, membuka kebun, membeli dan memelihara ternak dan memiliki kios/toko untuk berjualan. Adaptasi teknologi masyarakat nelayan memakai motor tempel pada perahu tradisional sebagai adaptasi teknologi yang paling banyak dilakukan, selain memodifikasi alat tangkap dan beralih ke perahu *johnson*.

Strategi adaptasi nelayan merupakan respon yang muncul karena adanya perubahan di kawasan konservasi. Strategi adaptasi tersebut berupa diversifikasi kegiatan ekonomi, investasi, membangun jaringan sosial, dan migrasi. Investasi menjadi strategi adaptasi yang paling banyak dilakukan oleh nelayan Misool Selatan. Strategi investasi dibedakan dalam dua bidang yaitu bidang perikanan dan non perikanan. Bidang perikanan menjadi investasi terbesar dilakukan oleh nelayan dengan menambah jenis alat tangkap, membeli mesin perahu dan menambah armada perahu. Strategi investasi non perikanan dilakukan nelayan dengan membeli perhiasan. Diversifikasi kegiatan ekonomi pun dibedakan dalam dua bidang yaitu perikanan (membudidaya rumput laut dan mengubah penjualan hasil laut ke orang yang bukan menjadi pembeli seperti biasanya) dan non perikanan (bekerja sebagai kuli bangunan, mengikutsertakan anggota keluarga untuk bekerja, membeli dan memelihara ternak dan bekerja di perusahaan).

Membangun jaringan sosial dilakukan nelayan dengan meminta bantuan tetangga, *plasma,* saudara dan aparat pemerintahan kampung. Migrasi nelayan terjadi pada bidang perikanan (memperluas daerah tangkapan) dan non perikanan (migrasi berdasarkan waktu yaitu berpindah kerja ke daerah lain dan menetap di sana dan berpindah kerja ke tempat lain tetapi setiap hari kembali ke tempat asal dan migrasi berdasarkan keikutsertaan anggota keluarga yaitu

mengajak seluruh anggota keluarga dan tanpa mengajak anggota keluarga). Strategi adaptasi tinggi ditunjukkan oleh investasi dan membangun jaringan sosial. Sedangkan strategi adaptasi sedang ditunjukkan oleh diversifikasi kegiatan ekonomi dan migrasi.

Saran yang peneliti berikan setelah melakukan proses penelitian sampai penulisan laporan hasil penelitian ditujukan kepada beberapa pihak yang terlibat dalam pengelolaan KKPD Misool Selatan, diantaranya nelayan, pemerintah kampung, dan Dinas Kelautan dan Perikanan Raja Ampat. Selain itu peneliti juga memberikan saran kepada peneliti lain untuk melakukan penelitian terkait pengelolaan KKPD khususnya di Misool Selatan Raja Ampat maupun di daerah lain.

Nelayan sebagai aktor yang terlibat dengan pemanfaatan sumber daya di sekitar KKPD perlu mengembangkan bentuk-bentuk mata pencaharian alternatif berbasis pengelolaan sumber daya berkelanjutan, tidak eksploitatif, memberikan nilai tambah yang tinggi, dan selaras dengan budaya yang ada. Pemerintah kampung melakukan penataan ulang kebijakan terkait dengan pengelolaan sumber daya di sekitar KKPD terutama peraturan kampung. Pemerintah kampung bersama Dinas Kelautan dan Perikanan Raja Ampat perlu melakukan upaya antisipasi dengan pendekatan ekonomi maupun sosial budaya guna mencegah potensi kerawanan sosial di masyarakat akibat menurunnya pendapatan yang disebabkan langkanya sumber daya perikanan di daerah tersebut.

Selain itu perlu peningkatan kapasitas sumber daya manusia, kapasitas pemerintahan kampung, kelembagaan nelayan, dan kelembagaan lain dengan pendampingan yang intensif agar dapat mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan. Pengembangan kapasitas nelayan diantaranya dengan memberikan pelatihan kegiatan budi daya, seperti budi daya rumput laut yang dulu pernah dilakukan nelayan. Kelembagaan nelayan yang dimaksud adalah kelompok resmi yang mengakomodasi perkumpulan nelayan, sehingga nelayan dapat dengan mudah menjual hasil laut secara berkelompok ke kapal besar.

Kepada peneliti lain perlu adanya penelitian lanjut terkait persepsi masyarakat terhadap KKPD dan tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan KKPD sehingga pengelolaan berkelanjutan dapat terjadi seperti penguatan kelembagaan, pengawasan, penegakan aturan, monitoring dan evaluasi KKPD. Lebih khusus penelitian terhadap pengaruh status kependudukan dengan persepsi dan bentuk adaptasi nelayan pendatang terhadap kawasan konservasi.

PERSANTUNAN

Pada kesempatan ini, Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr Arif Satria, SP MSi, dosen pembimbing yang senantiasa memberikan saran, kritik, dan motivasi. Semua pihak yang telah memberikan dorongan, doa, semangat, bantuan, dan kerja sama yang selama ini diberikan kepada penulis.

DAFTAR PUSTAKA

Burke, L., K. Reytar, M. Spalding and A. Perry. 2012. Menengok Kembali Terumbu Karang yang Terancam di Segitiga Terumbu Karang. [Buku Elektronik]. [Internet]. [diunduh 2014 Jan 15]. Tersedia pada: http://www.coraltriangleinitiative.org/sites/default/files/resources/RR_CT_Bahasa_low-res_01-14-13.pdf.

Herdian, D. 2003. Karakteristik sosial ekonomi dan pola hubungan patron-klien masyarakat nelayan (studi kasus Desa Bandengan, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, Propinsi Jawa Barat). [tesis]. [Internet]. [diunduh 2014 Jan 7]. Tersedia pada: http://repository.ipb.ac.id/bitstream/handle/123456789/16048/A03dhe.pdf?sequence=2.

Kawasan Konservasi dan Jenis Ikan. 2013. Laporan lokakarya kemitraan dalam pengelolaan kawasan konservasi perairan. Bogor (ID): KKJI.

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. 2013. Kelautan dan Perikanan Dalam Angka 2011. [Internet]. [diunduh 2013 Des 30]. Tersedia pada: http://statistik.kkp.go.id/index.php/arsip/file/37/kpda11_ok_r06_v02.pdf/.

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. 2013. Visi, misi, grand strategy dan sasaran strategis KKP. [Internet]. [diunduh 2013 Des 30]. Tersedia pada: http://kkp.go.id/index.php/arsip/c/8278/VISI-MI-SI-TUJUAN-DAN-SASARAN-STRATE-GIS/?category_id=65.

Kusnadi. 2000. Nelayan: Strategi Adaptasi dan Jaringan Sosial. Bandung (ID): Humaniora Utama Press.

Muflikhati, I. 2010. Analisis dan pengembangan model peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan keluarga di wilayah Pesisir Provinsi Jawa Barat. [disertasi]. Bogor : Institut Pertanian Bogor.

Mugni, A. 2006. Strategi rumah tangga nelayan dalam mengatasi kemiskinan (studi kasus nelayan Desa Limbangan, Kecamatan Juntinyuat, Kabupaten Indramayu, Propinsi Jawa Barat). [skripsi]. Bogor : Institut Pertanian Bogor

Nature Conservancy Raja Ampat. 2011. Analisis Tren Monitoring Persepsi Masyarakat di Kawasan Konservasi Laut Daerah Misool Timur Selatan Dan Kofiau Raja Ampat. Sanur (ID): The Nature Conservancy, Program Kelautan Asia Pasifik.

Pancasasti, R. 2008. Analisis perilaku ekonomi rumah tangga dan peluang kemiskinan nelayan tradisional. [skripsi]. [Internet]. [diunduh 2013 Des 24]. Tersedia pada:http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/10712

Priyanto, F. 2011. Dampak zonasi taman nasional karimunjawa terhadap strategi nafkah nelayan kompresor. [skripsi]. [Internet]. [diunduh 2014 Jan 3]. Tersedia pada: http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/52357.

Randan, N. 2011. Analisis dampak penetapan kawasan konservasi laut daerah terhadap kondisi sosial ekonomi nelayan. [skripsi]. [Internet]. [diunduh 2014 Jan 3]. Tersedia pada: http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/51422.

Satria, A. 2002. Pengantar Sosiologi Masyarakat Pesisir. Jakarta (ID): Cidesindo.

Satria, A. 2009. Pesisir dan Laut Untuk Rakyat. Bogor (ID): IPB Press.

Sihombing, H. A. 2003. Analisis pendapatan nelayan menurut jenis usaha di Desa Pangandaran Kabupaten Ciamis. [skripsi]. [Institut Pertanian Bogor].

Wahyono, A., I. G. P. Antariksa, M. Imron, R. Indrawasih dan Sudiyono. 2001. Pemberdayaan Masyarakat Nelayan. Yogyakarta (ID): Media Pressindo.

POTENSI EKSPOR NENER BANDENG INDONESIA: PELUANG DAN TANTANGAN

Potency of Export of Indonesian Milkfish Jouvenile: Opportunity and Challenges

***Achmad Zamroni, Irwan Mulyawan dan Fatriyandi Nur Priyatna**

Balai Besar Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan
Gedung Balitbang KP I Lt. 4
Jalan Pasir Putih Nomor 1 Ancol Timur, Jakarta Utara
*email: roni_socio@yahoo.com

Diterima 20 Maret 2015 - Disetujui 8 November 2015

ABSTRAK

Produksi nener untuk kebutuhan budidaya bandeng di Indonesia secara kuantitas sudah terpenuhi, namun secara kualitas masih belum memenuhi syarat. Kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi keragaan usaha nener di Indonesia, menganalisis peluang ekspor nener dan merumuskan kebijakan pengembangan nener. Lokasi survey dilakukan di Gondol dengan menggunakan snowball sebagai metode pengambilan data. Hasil analisis secara kualitatif dan kuantitatif menunjukkan bahwa nilai ekonomi usaha nener di lokasi Gondol, Bali setiap tahunnya sebesar Rp 171.360.000.000. Potensi nilai ekspor nener yang berasal dari lokasi Gondol, Bali sebesar Rp 37.800.000.000 per tahun selama tiga bulan. Sementara nilai kehilangan produksi akibat produksi nener berlebih dan tidak terserap oleh pasar baik domestik maupun ekspor selama 9 bulan sebesar Rp 10.800.000.000 per tahun. Oleh karena itu, rekomendasi kebijakan yang bisa diberikan terkait dengan upaya pengembangan dan pengaturan usaha budidaya nener adalah dengan memberikan rekomendasi berupa program prioritas dan langkah eksekusi yang sebaiknya dilakukan oleh direktorat jenderal teknis terkait.

Kata Kunci: expor, nener, peluang, tantangan

ABSTRACT

The Quantity of milkfish jouvenile (nener) production is fit for milkfish farming in Indonesia, but the quality is not eligilbe yet for milkfish farming. This study aims to identify the business performance of "nener", to analyze the export opportunities of "nener", and to formulate policy recommendations for "nener" business development. Gondol was selected as study location by using snowball approach for data collections. The result of this study based on qualitative and quantitative analysis shows that the economic value of "nener" business at Gondol is Rp 171.36 billion per year, potency of export value of is Rp 37.8 billion per year during three months. Meanwhile, the value of lost production due to excess production of milkfish and not absorbed by the domestic and export market for 9 months is about Rp 10.8 billion per year. Therefore, the policy recommendations that can be presented in connection with the development effort and setting the cultivation of milkfish is to provide recommendations in the form of program priorities and execution steps that should be done by the relevant technical directorate general in Ministry for Marine Affairs and Fisheries.

Keywords: export, milkfish jouvenile, opportunity, challenge

PENDAHULUAN

Budidaya ikan bandeng di Indonesia berada pada kawasan budidaya dengan luas kurang lebih sebesar 600.000 Ha, dengan total produksi yang dicapai pada tahun 2014 sebesar 621.393 ton, dari sasaran produksi sebesar 750.000 ton atau sebesar 82,8%. Daerah penghasil bandeng tersebar antara lain di Sulawesi Selatan, sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Kalimantan Timur, Jawa Barat, Jawa timur dan Jawa Tengah. Budidaya Bandeng di Indonesia sebagian besar menerapkan teknologi tradisional dengan hasil rata rata 500 kg-1 ton per ha per tahun dan sebagian kecil menerapkan teknologi semi intensif dengan hasil rata-rata 3 ton per ha per tahun. Ikan bandeng merupakan salah satu sumber protein hewani yang masih terjangkau oleh masyarakat kelas menengah ke bawah dan diversifikasi produk olahan yang sudah berkembang (Aslianti, 1994). Namun, permintaan terhadap produk Ikan Bandeng akhir-akhir berkembang sebagai sebagai umpan hidup untuk penangkapan tuna/cakalang (Ismail dan Sudrajad, 1992).

Nener merupakan larva yang ditetaskan oleh induk dan berwarna bening (Ghufran, 2007). Kebutuhan benih sebagian besar diperoleh dari hatcheri skala besar dan skal kecil yang tersebar di Bali yang terkonsentrasi di Kabupaten Buleleng. Hatcheri skala besar sebanyak 176 unit dan hatcheri skala kecil sebanyak 4500 unit dengan total produksi 10, 2 – 12 Juta ekor nener per hari. Total produksi dari daerah Bali diperkirakan sekitar 4,32 milyar dan daerah lain seperti Sulawesi, Jawa, Sumatera, Kalimantan sebanyak 0.38 milyar sehingga total produksi nasional sebesar 4,7 milyar. Teknologi pembenihan bandeng di Indonesia sudah sangat maju, dimana pada awalnya hingga ukuran panen diperlukan waktu pemeliharaan selama 35 -40 hari. Namun sekarang hanya memerlukan waktu pemeliharaan selama 17-18 hari, sehingga produksi nener menjadi semakin banyak.

Berdasarkan data dari BKIPM ekspor nener tahun 2014 sebesar 1,4 milyar ekor dengan negara tujuan Philipina (1,24 milyar ekor), Taiwan (88 juta ekor), Singapura (76,5 juta ekor), Thailand (27,5 juta ekor), Srilanka (11,7 juta ekor), Malaysia (4,4 juta ekor), Hongkong (2,5 juta ekor), China (0,8 juta ekor), Colombia (0,74 juta ekor), East Timor (0,28 juta ekor) dan Vietnam (75 ribu ekor) dengan nilai ekspor Rp 200 milyar.

Produksi nener untuk kebutuhan budidaya bandeng di Indonesia dari data yang dihimpun melalui pembudidaya bandeng dan pembenihan nener secara kuantitas jumlahnya sudah terpenuhi. Namun demikian secara kualitas masih belum memenuhi syarat. Data yang diperoleh menyatakan bahwa untuk nener yang dihasilkan dari sulawesi (PT. Esa Putlii) hanya mengeluarkan satu tingkatan mutu sedangkan yang dihasilkan dari daerah lain seperti dari Bali mengeluarkan nener dalam beberapa tingkatan mutu. Sehingga menyebabkan kualitas nener yang disuplai oleh pembudidaya tidak seragam dan berakibat pada hasil produksi yang kurang optimal. Harga nener dipengaruhi dari bulan-bulan ekspor dan bulan-bulan tidak ada ekspor. Pada saat tidak ada ekspor harga nener Rp 8-12/ekor sedangkan pada saat ekspor harga nener Rp 20 – 28/ekor. Nener berkualitas baik sulit bersaing dengan nener berkualitas rendah dikarenakan faktor harga. Harga nener di Filipina berkisar antara Rp 57 – 120/ekor; dimana untuk nener ukuran 3 (panjang 10 sd 12 mm) berharga Rp 57 s/d Rp 63 per ekor, benih ukuran 4 (panjang 14 mm) berharga Rp 72 s/d Rp 85 per ekor dan benih ukuran 5 (panjang 16 mm) berharga Rp 100 s/d Rp 120 per ekor. Informasi harga nener berdasar ukuran di philipina ini hanya diketahui oleh beberapa eksportir nener saja dan tidak diketahui oleh pembenih nener di Bali, sehingga HSRT tidak bisa mengambil peluang keuntungan yang lebih besar. Hal ini sangat merugikan para pembenih nener khususnya di Bali dan di Indonesia pada umumnya.

Keperluan nener untuk budidaya bandeng di Indonesia saat ini diperoleh dari Unit-Unit pembenihan baik skala besar maupun skala kecil yang tersebar di Bali, Sulawesi Selatan dan Jawa. Harga Nener Indonesia sangat fluktuatif, pada bulan bulan tidak terjadi ekspor harga nener paling rendah dan meningkat pada bulan bulan terjadi ekspor. Ekspor nener kebanyakan ditujukan ke negara –negara Asia terutama Filipina dan Taiwan.

METODOLOGI

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif, yaitu melibatkan interpretasi dan juga pendekatan naturalistik terhadap subjek penelitian, serta tidak jarang menggunakan berbagai metode atau pendekatan pada satu fokus kajian (Denzin and Lincoln, 1994). Sementara itu, studi kasus digunakan untuk membatasi fokus dan subjek penelitian pada hal-hal atau kasus yang terkait dengan kondisi dan karakteristik usaha

budidaya nener. Studi kasus yang digunakan bersifat studi kasus intrinsik, yaitu didorong oleh suatu ketertarikan pada satu fenomena tertentu dan bukan sebagai upaya untuk membangun suatu teori, walaupun tidak dibatasi untuk sama sekali tidak diperkenankan untuk membangun suatu teori (Stake, 1994). Hal yang mendasari penggunaan studi kasus intrinsik adalah adanya keinginan untuk mempelajari dan mengeksplorasi karakteristik usaha budidaya nener di lokasi penelitian.

Lokasi sampling kegiatan kajian khusus rapid assessment antisipasi kebijakan pengelolaan nener, dilakukan di Dusun Gondol, Desa Penyabangan, Kecamatan Grokgak, Kabupaten Buleleng, Bali. Pertimbangan dipilihnya lokasi ini karena di lokasi ini terdapat banyak usaha rakyat dalam budidaya nener. Data yang dikumpulkan berupa data primer yang diperoleh dari pembudidaya nener, bandar ikan atau pengepul, serta asosiasi pembudidaya nener setempat. Teknik pemilihan responden dilakukan secara sengaja dan snowballing. Sementara teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara mendalam dan juga berperan sebagai observer.

Analisis data dilakukan secara deskriptif dan diinterpretasikan menggunakan metode logik. Metode logik adalah cara menalar dimana data diamati dan dipilah-pilah, buktinya dicari dan dipertimbangkan, dianalisis dan kemudian kesimpulan diambil (Nazir, 1988). Analisis hubungan antara fakta sosial dinyatakan menggunakan pendekatan deskriptif dan kualitatif. Analisis menggunakan metode analisis ekonomi terhadap keragaan usaha budidaya nener juga dilakukan untuk memperoleh informasi tentang besaran nilai ekonomi dari kegiatan usaha produksi nener di lokasi penelitian.

KERAGAAN USAHA BUDIDAYA NENER DI GONDOL

Budidaya nener memegang peranan penting bagi kehidupan ekonomi rumah tangga masyarakat setempat. Sehingga sangat besar ketergantungan masyarakat setempat terhadap usaha ini, hal ini dapat terlihat pada minimnya pendapatan rumah tangga dari sektor lainnya menjadikan usaha budidaya nener ini andalan usaha keluarga.

Awalnya, usaha budidaya ini dicontohkan dari hasil penelitian penetasan dan budidaya nener oleh peneliti, dari Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Budidaya laut, Balitbang Kelautan dan Perikanan di Gondol. Hasil penelitian ini kemudian dikembangkan untuk menjadi contoh di masyarakat dan mendapat respon positif dan berhasil berkembang menjadikan usaha ini sebagai pendapatan utama bagi masyarakat setempat untuk berbudidaya nener. Usaha ini mulai dirintis pada tahun 1997, beberapa masyarakat mencoba untuk mencontoh pembudidayaan nener dan berhasil serta memberi hasil pendapatan yang baik, sehingga marak dicontoh dan dilakukan oleh anggota masyarakat lainnya disekitarnya.

Namun, pada tahun akhir tahun 1999 hingga tengah tahun 2000, terjadi penurunan harga nener yang sangat drastis, menurut beberapa informan, nener sulit terjual meski diturunkan hingga Rp 2-3 per ekor tetap tidak laku terjual. Pada masa tersebut, banyak sekali anggota masyarakat di sekitar Gondol yang harus dengan cepat mengambil keputusan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, sehingga banyak dari kolam/bak budidaya dan lahan budidaya yang dijual. Hal ini juga menunjukkan betapa rentannya ketahanan dan keberlanjutan berusaha secara umum bagi masyarakat setempat. Lahan yang kurang produktif, ketahanan modal yang terbatas menyebabkan kurang variasi bidang usaha yang mampu dilakukan oleh masyarakat setempat.

Kerentanan tersebut juga disebabkan tidak mampunya lahan untuk mendukung difersifikasi usaha ini. Usaha ini hanya penetasan telur bandeng dan budidaya nener. Induk bandeng dibeli/datangkan dari Gresik, ditetaskan kemudian dibudidaya hingga menjadi nener dan kemudian dijual. Ketidakmampuan lahan ini, utamanya ditentukan oleh minimnya lahan budidaya serta suplai air tawar. Lahan mangrove yang sangat cocok untuk tambak tidak ada serta suplai air tawar sangat minim. Namun dengan begitu saja, kebutuhan nener yang diproduksi dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri bahkan diekspor terutama Filipina dan Vietnam.

Produksi

Budidaya nener dilakukan pada bak/kolam berukuran dalam Panjang x Lebar x tinggi (1.5 x 3 x 1) m. Umumnya, tiap pembudidaya memiliki 8 unit kolam. Tiap kolam akan ditebar sebanyak 50 – 70 ribu butir telur. Produksi nener di Kecamatan Grokgak, Kabupaten Buleleng, Bali mencapai 15-25 juta nener per hari. Harga domestik berkisar Rp 5 per ekor hingga Rp 15 per ekor. Untuk memenuhi kebutuhan dan permintaan domestik hanya dibutuhkan 7,5 – 15 juta ekor per hari sepanjang

tahun pemintaan ini dapat dipenuhi. Sedangkan untuk kebutuhan ekspor dibutuhkan 15 – 20 juta ekor per hari yang hanya pada bulan Februari, Maret dan April. Jumlah rumah tangga pelaku usaha budidaya nener ini menurut asosiasi nener di Gondol sebanyak 506 pelaku usaha (RTP).

KERAGAAN JARINGAN PEMASARAN NENER DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI

Selama ini rantai suplai nener berdasarkan ukuran yang diperdagangkan, berturut-turut adalah telur, nener, gelondongan, bandeng, induk bandeng. Sementara itu, berdasarkan lokasi, rantai suplainya sebagai berikut: Telur dan nener diproduksi di Gondol→ nener dijual ke Makassar, Lamongan, Gresik, Balikpapan, Jawa Barat, Lampung (Gambar 1).

Pengembangan (nener, gelondongan, bandeng)

Telur→ Nener → *Gelondongan* → **Bandeng Sarden** → Bandeng → Induk Bandeng

Pengembangan produksi bandeng diperlukan untuk mengembangkan usaha bandeng. Sebagaimana rantai/siklus bandeng diatas, seharusnya tiap tahapan memiliki peluang pengembangan untuk diterapkan di masyarakat. Beberapa hal yang bisa dijadikan sebagai upaya untuk pengembangan nener adalah dengan memandang pengembangan nener sebagai suatu kesatuan utuh sistem produksi bandeng secara keseluruhan.

Diversifikasi Produksi Bandeng

- Bandeng presto
- Bandeng cabut duri
- Nugget bandeng
- Sarden bandeng
- Abon bandeng
- Bakso bandeng
- Bandeng kaleng
- Dan lainnya

Diversifikasi produk turunan dari bandeng merupakan diversifikasi usaha yang akan memacu permintaan produk bandeng. Hal ini kemudian diharapkan dengan meningkatnya permintaan bandeng maka produksi nener di Gondol dan beberapa sentra nener lainnya dapat meningkat.

Pengembangan Gelondongan

Gelondongan merupakan bagian dalam rantai produk nener yang sangat dibutuhkan dalam upaya meningkatan penangkapan ikan, khususnya ikan tuna dan cakalang. Pengembangan gelondongan ini penting untuk menyuplai

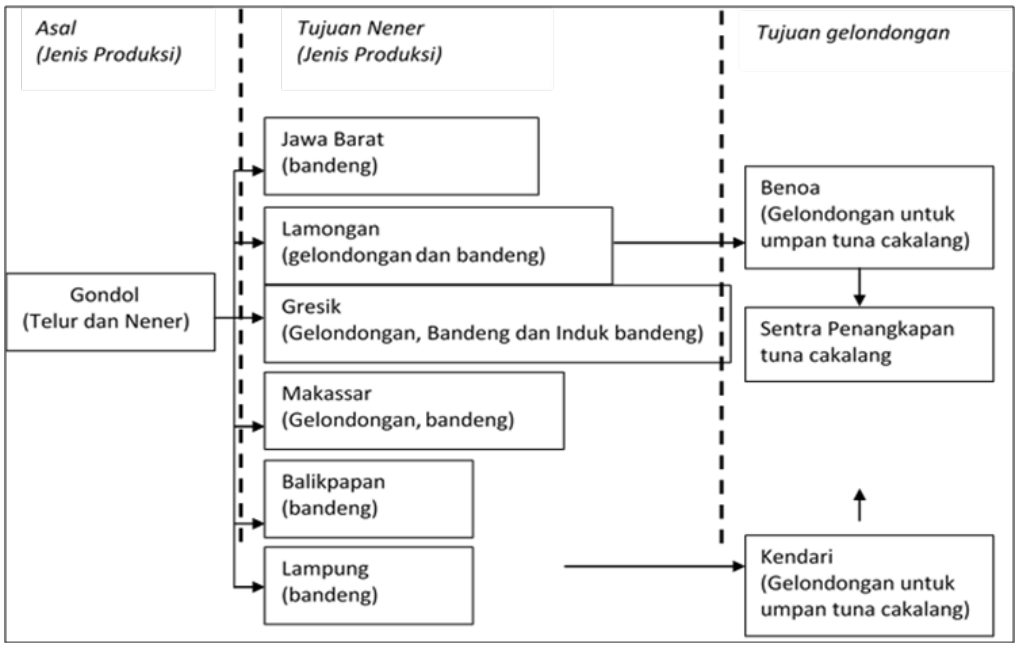

Sumber: Data primer diolah, 2015/*Source: Primary Data Processed, 2015*

Gambar 1. Skema Diversifikasi Nener dan Pemasarannya
Figure 1. Diversification Scheme of Milkfish Seed and Its Marketing

permintaan gelondongan disektor ini. Sebagaimana diketahui lokasi jenis tuna dan cakalang yang menggunakan gelondongan sebagai umpan berada di sentra-sentra penangkapan dan pendaratan ikan di sekitar laut Banda dan Sawu.

Secara strategis mendekatkan sentra produksi gelondongan didekat sentra penangkapan dan pendaratan ikan tunda cakalang akan memberi biaya input yang efisien bagi usaha penangkapan ini. Dengan model backyard farming dalam kolam, budidaya gelondongan dapat diatur suplai dan produksinya guna memenuhi permintaan gelondongan bagi penangkap tuna cakalang.

Intensifikasi tambak → semi intensif

Peningkatan tambak dengan tekonologi yang ramah lingkungan dan murah akan memicu produktifitas budidaya bandeng. Peningkatan buddaya bandeng semi intensif, diyakini cukup efisien dan efektif meningkatkan produktifitas usaha bandeng, serta cukup ramah lingkungan.

Pakan dan Teknologi pendukung lainnya

Sebagaiman diketahui usaha budidaya umumnya secara otomatis menempatkan pakan sebagai variable cost yang sensitive dalam struktur biaya budidaya. Sehingga investasi pemerintah dalam penyediaan pakan dan teknologi pakan yang efektif dan murah akan memudahkan pengembangan usaha bandeng.

Transportasi dan cargo(jasa kurir)

Transportasi, memegang peranan penting dalam distribusi bandeng. Sebagai contoh untuk gelondongan yang diproduksi di Gresik, dilepas dengan harga Rp 400 per ekor, namun tiba di Benoa, Bali, naik mencapai Rp 900 per ekor. Selisih / margin ini sebenarnya cukup mengiurkan usaha budidaya gelondongan, sekaligus mengisyaratkan perlunya penataan sistem distribusi barang dalam untuk sektor perikanan. Selisih sebesar Rp 500 per ekor ini terlalu menekan usaha penangkapan tuna cakalang sehingga menciptakan tata distribusi barang yang mendukung usaha lainnya perlu dipikirkan jalannya untuk efisien dan efektif dalam meningkatkan upaya penangkapan tuna cakalang.

Pasar luar negeri

Peluang pasar luar negeri juga perlu dikembangkan, misalnya dengan menyisipkan bandeng kaleng (sarde bandeng) dan varian produk lainnya dalam aktifitas luar luar negeri warga Negara Indonesia, seperti ibadah haji dan pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Diharapakan akan tercipta pasar luar negeri dengan memanfaatkan peluang tersebut.

KERAGAAN USAHA DAN POTENSI NILAI EKONOMI USAHA NENER

Berdasarkan data dan informasi primer yang diperoleh dari lokasi Gondol, maka diperoleh gambaran keragaan usaha dan potensi nilai ekonomi usaha nener di Gondol, Bali sebagai berikut (Tabel 1).

Nilai Ekonomi Usaha Nener

Keragaan usaha nener di lokasi penelitian kemudian diolah dengan menggunakan pendekatan analisis ekonomi sederhana untuk mengetahui seberapa besar nilai ekonomi dari seluruh keragaan usaha nener yang ada. Untuk itu diperlukan analisis terkait dengan nilai biaya produksi usaha nener per tahun (Tabel 2) dan juga nilai manfaat produksi usaha nener per tahun (Tabel 3).

Tabel 1. Keragaan usaha Nener di Gondol, Bali.
Table 1. Milkfish Jouvenile Business in Gondol, Bali.

Produksi/ *Supply*	Permintaan/*Demand*		Jumlah RTP/*No. of. Householders*	Harga/ *Prices*
	Dalam Negeri/ *Domestic*	Ekspor/ *Export*		
15-25 juta ekor per hari /*15 – 25 Million jouveniles a day*	11 juta ekor per hari/*11Million jouveniles a day*	14 juta ekor per hari selama 3 bulan dalam 1 tahun/*14 Million jouveniles a day during 3 months per year*	506	Rp 28 – 30 per ekor/*IDR 28 – 30 per jouvenile*

Sumber: Data primer diolah, 2015 /*Source: Primary Data Processed, 2015*

Tabel 2. Nilai Biaya Produksi Usaha Nener (Rp per Tahun).
Table 2. Annual Production Cost of Milkfish (IDR/Year).

Produksi/ *Production*	Biaya Produksi per tahun/ *Annual Production Cost*
15 juta ekor per hari selama sembilan bulan dari 506 RTP Pembudidaya Nener dengan biaya produksi sebesar Rp 5 per ekor/*15 Million Jouveniles a day during 9 months from 506 householders by using production cost about IDR. 5 per jouvenile.*	15 juta ekor per hari x 9 bulan x 30 hari x Rp 5 per ekor = Rp 20.250.000.000/*15 Million Jouveniles X 9 months X 30 days X IDR. 5 = IDR. 20,250,000,000*
25 juta ekor per hari selama tiga bulan dari 506 RTP Pembudidaya Nener dengan biaya produksi sebesar Rp 5 per ekor/*25 Million Jouveniles a day during 3 months from 506 householders by using production cost about IDR. 5 per jouvenile.*	25 juta ekor per hari x 3 bulan x 30 hari x Rp 5 per ekor = 11.250.000.000/*25 Million Jouveniles X 3 months X 30 days X IDR. 5 = IDR. 11,250,000,000*
Total Nilai Biaya Produksi/ *Total of Production cost*	**31,500,000,000**

Sumber: Data primer diolah, 2015/*Source: Primary Data Processed, 2015*

Tabel 2 memberikan gambaran seberapa besar keseluruhan nilai biaya produksi dari usaha nener di lokasi penelitian. Terlihat secara keseluruhan biaya produksi yang diperlukan dalam satu tahun sebesar Rp 31.500.000.000. Nampak juga terlihat bahwa terdapat dua karakteristik usaha budidaya nener, yaitu saat musim untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik dan saat musim untuk memenuhi permintaan pasar ekspor. Hal ini terjadi karena sebenarnya secara teknologi, budidaya nener sudah mampu menghasilkan produksi nener seperti pada saat adanya permintaan ekspor. Namun hal ini tidak dilakukan karena kemampuan pasar domestik untuk menyerap sangat terbatas, sementara jika dipaksakan untuk diproduksi berlebih hanya akan menambah biaya produksi dan kerugian pembudidaya saja.

Sementara pada Tabel 3 terlihat nilai keseluruhan manfaat produksi usaha nener per tahun di lokasi penelitian. Seperti dijelaskan sebelumnya bahwa terdapat dua karakteristik usaha nener, saat ada permintaan ekspor dan saat hanya ada permintaan domestik. Total nilai manfaat usaha produksi nener dari Tabel 3 sebesar Rp 150.660.000.000 per tahun. Terlihat bahwa total manfaat produksi nener saat terjadi permintaan ekspor nener tinggi sebesar Rp 67.500.000.000 per tahun yang terjadi selama tiga bulan saja. Jumlah produksi nener yang mencapai 25 juta ekor per hari tersebut sebenarnya untuk memenuhi kebutuhan domestik sebesar 11 juta ekor per hari dan 14 juta ekor per hari untuk kebutuhan ekspor. Jadi secara jumlah dengan adanya ekspor tidak mengganggu kebutuhan domestik, namun demikian pada saat yang bersamaan harga jual menjadi meningkat selama periode ekspor tersebut.

Tabel 3. Nilai Manfaat Produksi Usaha Nener per Tahun (Rp per tahun).
Table 3. Annual Benefit Values of Milkfish Jouvenile (IDR/Year).

Permintaan/ *Demand*	Manfaat Produksi per tahun/ *Annual Benefit Values*
11 juta ekor per hari untuk domestik dengan harga nener Rp 28 per ekor/*11 Million jouveniles a day for domestic market with price IDR. 28 per jouvenile*	11 juta ekor per hari x 9 bulan x 30 hari x Rp 28 per ekor = 83.160.000.000/*11 Million jouvenile a day X 9 months X 30 days X IDR. 28 per jouvenile = 83,160,000,000*
25 juta ekor per hari selama tiga bulan dengan biaya produksi sebesar Rp 5 per ekor/*25 Million jouveniles a day during 3 months by using production cost about IDR. 5 per jouvenile*	25 juta ekor per hari x 9 bulan x 30 hari x Rp 30 per ekor = 67.500.000.000/ *25 Million jouvenile a day X 9 months X 30 days X IDR. 30 per jouvenile = IDR. 67,500,000,000*
Total Nilai manfaat Produksi Nener/ *Total of Benefit Values*	**150,660,000,000**

Sumber: Data primer diolah, 2015/*Source: Primary Data Processed, 2015*

Tabel 4. Nilai Ekonomi Usaha Nener per Tahun (Rp per tahun).
Table 4. Annual Economic Values of Milkfish Jouvenile (IDR/Year).

Nilai Biaya Produksi/ *Production Cost*	Nilai Manfaat Produksi/*Benefit Cost*	Nilai Kehilangan Sisa Produksi/*Loss of Residual Production Cost*	Nilai Ekonomi Usaha Nener/*Economic Values of Milkfish Jouvenile*
31,500,000,000	150,660,000,000	10,800,000,000	171,360,000,000

Sumber: Data primer diolah, 2015/*Source: Primary Data Processed, 2015*

Tabel 4 memperlihatkan besaran nilai ekonomi keseluruhan usaha nener di lokasi penelitian. Nilai ekonomi usaha nener di lokasi Gondol, Bali setiap tahunnya sebesar Rp 171.360.000.000 yang diperoleh dari 506 RTP. Terlihat bahwa terdapat nilai kehilangan yang berasal dari sisa produksi selama sembilan bulan akibat tidak terserapnya sejumlah 4 juta nener oleh pasar domestik.

Ekspor

Berdasarkan hasil informasi di lokasi, ekspor nener tidak berjalan sepanjang tahun. Ekspor nener hanya dilakukan pada bulan Februari, Maret, April. Hal ini terkait dengan permintaan pasar untuk ekspor terjadi pada tiga bulan tersebut. Harga ekspor berkisar Rp 20 per ekor hingga Rp 30 per ekor dengan volume permintaan 15 – 20 juta ekor per hari. Pasar tujuan ekspor yang teridentifikasi adalah Taiwan, Filipina dan Vietnam.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka potensi nilai ekspor nener yang berasal dari lokasi Gondol, Bali sebesar Rp 37.800.000.000 per tahun dengan jumlah permintaan sebanyak 14 juta ekor per hari selama 3 bulan. Sementara nilai kehilangan produksi akibat produksi nener berlebih dan tidak terserap oleh pasar baik domestik maupun ekspor selama 9 bulan sebesar Rp 10.800.000.000 per tahun dengan jumlah nener sebanyak 4 juta ekor per hari.

Kasus lain di Buleleng yang ditemukan oleh Yuliani et al. (2012), bahwa fluktuasi harga nener sangat berpengaruh terhadap pendapatan petani nener. Mereka kesulitan memprediksi kapan akan terjadi kenaikan atau penurunan harga, fluktuasi harga hanya dapat diprediksi secara umum, seperti harga nener yang akan mengalami peningkatan pada musim ekspor dan lebih sering mengalami penurunan saat permintaan nener hanya untuk memenuhi permintaan lokal, namun presentase kenaikan dan penurunannya tidak dapat diketahui. Namun Rangkuti (2012) berpendapat bahwa penetapan harga nener pada kondisi tersebut sulit dilakukan mengingat keputusan untuk menentukan harga merupakan kombinasi antara permintaan dan penawaran, dimana penawaran barang dipengaruhi oleh produksi. Faktor permintaan terdiri dari keinginan atau hasrat konsumen dan kemampuan konsumen untuk membeli, sedangkan faktor penawaran terdiri dari biaya produksi, biaya pemasaran, dan tingkat persaingan.

PENUTUP

Budidaya nener dilakukan pada bak/kolam berukuran dalam Panjang x Lebar x tinggi (1.5 x 3 x 1) m. Umumnya, tiap pembudidaya memiliki 8 unit kolam. Tiap kolam akan ditebar sebanyak 50 – 70 ribu butir telur. Produksi nener di Kecamatan Grokgak, Kabupaten Buleleng, Bali mencapai 15-25 juta nener per hari. Harga domestik berkisar Rp 5 per ekor hingga Rp 15 per ekor. Untuk memenuhi kebutuhan dan permintaan domestik hanya dibutuhkan 7,5 – 15 juta ekor per hari sepanjang tahun pemintaan ini dapat dipenuhi. Sedangkan untuk kebutuhan ekspor dibutuhkan 15 – 20 juta ekor per hari yang hanya pada bulan Februari, Maret dan April. Jumlah rumah tangga pelaku usaha budidaya nener ini menurut asosiasi nener di Gondol sebanyak 506 pelaku usaha (RTP).

Nilai ekonomi usaha nener di lokasi Gondol, Bali setiap tahunnya sebesar Rp 171.360.000.000. Potensi nilai ekspor nener yang berasal dari lokasi Gondol, Bali sebesar Rp 37.800.000.000 per tahun selama tiga bulan. Sementara nilai kehilangan produksi akibat produksi nener berlebih dan tidak terserap oleh pasar baik domestik maupun ekspor selama 9 bulan sebesar Rp 10.800.000.000 per tahun.

Rekomendasi kebijakan yang bisa diberikan terkait dengan upaya pengembangan dan pengaturan usaha budidaya nener adalah

dengan memberikan rekomendasi berupa program prioritas dan langkah eksekusi yang sebaiknya dilakukan oleh direktorat jenderal teknis terkait. Program prioritas yang sebaiknya dilakukan untuk pengembangan perikanan bandeng, khususnya nener adalah: (a) Pengaturan tata niaga nener baik domestik maupun ekspor bertujuan melindungi pembudidaya bandeng akibat peningkatan harga nener yang tinggi sebagai konsekuensi permintaan ekspor nener; (b) Pengembangan paket stimulus budidaya bandeng domestik untuk menyerap hasil produksi nener berlebih sehingga pembudidaya nener terlindungi dari terlalu rendahnya harga nener; dan (c) Mengoptimalkan peluang ekspor bandeng memanfaatkan perjanjian kerjasama ekonomi baik regional maupun bilateral terhadap negara-negara potensial, sebagai contoh mengoptimalkan Early Harvest Program antara China dengan negara-negara ASEAN dalam kerangka AFTA sehingga mampu bersaing dengan Taiwan untuk pasar ekspor bandeng ke China. Sementara langkah eksekusi strategis yang sebaiknya dilakukan adalah: (a) Ditjen Perikanan Budidaya menyiapkan kebijakan dan program stimulus untuk pengembangan budidaya bandeng yang berorientasi ekspor dengan tetap menjaga kebutuhan domestik; (b) Ditjen Perikanan Budidaya menyiapkan dan menegakkan pengawasan kualitas nener yang diproduksi dan menyiapkan program-program bantuan bagi usaha budidaya nener agar memenuhi standar kelayakan kualitas nener yang diproduksi; dan (c) Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan menyiapkan program optimalisasi peluang pasar ekspor bandeng melalui kerjasama ekonomi bilateral dan regional.

DAFTAR PUSTAKA

Aslianti. 1994. Pembenihan Bandeng Departemen Pertanian Badan Litbang Pertanian, Sub Balai Perikanan Budidaya Pantai Gondol-Bali.

Denzin, N. K. and Y. S. Lincoln. 1994. Introduction: Entering the Field of Qualitative Research in Denzin, N.K and Lincoln, Y.S [Eds]. 1994. Handbook of Qualitative Research. Sage Publications, Inc. United State of America. 1-18 p.

Ghufran, H. dan K. M. Kordi. 2007. Pembenihan Bandeng. Jakarta: PT. Perca.

Ismail, A. dan A. Sudrajat. 1992. Budidaya Ikan Bandeng (Chanos-chanos P) Sistem Penggelondongan dan Pembesaran di Tambak

Nazir, M. 1988. Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Rangkuti, F. 2012. Studi Kelayakan Bisnis dan Investasi. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Stake, R. E. 1994. Case Studies in Denzin, N.K and Lincoln, Y.S [Eds]. 1994. Handbook of Qualitative Research. Sage Publications, Inc. U S A. 236-247 p.

Yuliani, K., I. K. Dunia and M. A. Meitriana. 2012. Perspektif Fluktuasi Harga Nener Pada Usaha Tambak Nener di Desa Penyabangan Tahun 2012. Jurnal Jurusan Pendidikan Ekonomi, 3. (1)

ANALISIS DAMPAK MORATORIUM KAPAL EX-ASING TERHADAP KONDISI PASAR TUNA INDONESIA

Impact Analysis of Ex - Foreign Ships Moratorium on Market Condition of Indonesia Tuna

[*]Subhechanis Saptanto, Risna Yusuf,
Tenny Apriliani dan Freshty Yulia Arthatiani

Balai Besar Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan
Gedung Balitbang KP I Lt. 4
Jalan Pasir Putih Nomor 1 Ancol Timur, Jakarta Utara
[*]email: anis_saptanto@yahoo.com

Diterima 20 Agustus 2015 - Disetujui 8 November 2015

ABSTRAK

Peraturan Menteri No. 56 yang dikeluarkan pada bulan Nopember 2014 tentang moratorium kapal eks asing diduga memberikan dampak terhadap sektor perikanan termasuk komoditas tuna. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak moratorium kapal ex-asing terhadap kondisi pasar tuna Indonesia. Waktu penelitian dilakukan dari bulan April hingga bulan Mei 2015 dengan mengambil lokasi di Jakarta dan Bali. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer berasal dari wawancara dengan pelaku usaha eksportir tuna dan data sekunder bersumber dari data produksi, pola pemasaran, dan ekspor perikanan. Sumber data berasal dari Pelabuhan, Dinas KP di lokasi penelitian dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Data-data yang digunakan dalam penelitian diperoleh melalui penelusuran pustaka (desk study) yang relevan dengan kegiatan penelitian dan survey lapang. Data-data yang telah dikumpulkan kemudian ditabulasi dan dianalisis secara deskriptif dan disajikan dalam bentuk tabel dan grafik. Selanjutnya hasil analisis akan diinterpretasikan untuk menghasilkan informasi yang dapat menjawab tujuan dari penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya Permen No. 56 ini memberikan pengaruh pada triwulan pertama (bulan januari sampai Maret), volume ekspor ikan tuna segar mengalami penurunan untuk tuna segar mengalami penurunan sebesar 13% sedangkan nilainya mengalami kenaikan sebesar 1%. Hal ini mengindikasikan Penurunan volume produksi yang dapat berdampak pada penurunan volume ekspor hendaknya harus diimbangi dengan adanya peningkatan harga ekspor sehingga nilai ekspor tidak mengalami penurunan. Jika terjadi penurunan maka dapat berdampak pada penerimaan devisa negara yang secara makro dapat menyebabkan penurunan kontribusi PDB dari sektor perikanan.

Kata Kunci: pasar tuna, moratorium, kapal ex-asing

ABSTRACT

Decree of Minister of Marine and Fisheries No. 56 was issued on November 2014 about a moratorium on ex-foreign ship assumed giving an impact on fishing sector including tuna. This study was aimed to analyze the impact of ex-foreign ships moratorium on Indonesian tuna market conditions. The research was conducted from April to May 2015. The location of research was in Jakarta and Bali. Data used in this study are primary and secondary data. Primary data was based on interviewing to entrepreneurs and exporters of tuna and secondary data was based on data of tuna consist of production, marketing patterns, and fisheries exports. Source of data were obtained by Port, agency of marine affairs and fisheries, Ministry of Marine Affairs and Fisheries (MMAF). The approach of the research was not only by desk study to explore data that relevan of the research but also it by survey. The data have been collected, tabulated and analyzed descriptively and presented on tables and figures. Furthermore, the analysis results are interpreted to generate information that can answer the purpose of research. The results showed that the Decree of Minister of Marine and Fisheries No. 56 have given impact on the first quarter (in January to March). In generally fresh tuna export volume was decreased by 13% but its value was increased by 1%. This result indicated that decreasing of production volume will have an impact to the decreasing of export volume. Therefore, we must concern about the price of export tuna so that value of export tuna has not decreased and it will give an impact to the decreasing of foreign exchange and also it will make decreasing in GDP contribution of the fisheries sector.

Keywords: ex - foreign ships, moratorium

PENDAHULUAN

Salah satu satu kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan pada Kabinet Kerja saat ini adalah Kebijakan Moratorium terkait perizinan usaha penangkapan ikan untuk kapal eks asing berukuran lebih dari 30 GT di perairan Indonesia yang diterapkan sejak bulan Nopember 2014 hingga 30 April 2015. Kebijakan moratorium eks kapal asing ini ditetapkan dalam Peraturan Menteri No. 56/2014 yang isinya adalah kapal yang pembuatan dilakukan di luar negeri tidak akan dberikan izin baru Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI), Surat Ijin Kelayakan Penangkapan Ikan (SIKPI) dan perpanjangan SIPI dan SIKPI. Berdasarkan kajian awal dari Institut Pertanian Bogor (IPB) sebelum diterapkan kebijakan moratorium tersebut diperoleh informasi bahwa terdapat 1.240 kapal buatan asing dari total 5.329 kapal yang berukuran di atas 30 GT di Indonesia (Kurniawan, 2014).

Kebijakan moratorium diambil oleh pemerintah karena kerugian besar dari sektor kelautan dan perikanan yang disebabkan beroperasinya kapal-kapal eks asing tersebut. Pada tahun 2013, PNBP dari total 5.329 kapal tersebut sebesar 250 miliar rupiah. Jumlah ini sangat jauh bila dibandingkan dengan kerugian sebesar US$ 20 miliar atau Rp 240 triliun rupiah akibat *Illegal, Unreported* dan *Unregulated* (IUU) fishing yang terjadi di perairan Indonesia. (Nurhayat, 2014).

Salah satu komoditas yang menjadi tangkapan dominan kapal eks asing yang berukuran lebih dari 30 GT adalah ikan tuna. Hal ini dikarenakan tuna merupakan jenis ikan ekonomis tinggi. Bagi Indonesia, ikan tuna merupakan komoditas penghasil devisa negara nomor dua setelah udang. Pada tahun 2013, volume ekspor TTC mencapai sekitar 209.410 ton dengan nilai USD$ 764,8 juta atau 19% dari total nilai ekspor perikanan Indonesia (Dirjen P2HP, 2014).

Pada tahun 2009, secara angka potensi produksi komoditas tuna di Indonesia diperkirakan hampir mencapai 1,2 juta ton per tahun, dengan nilai ekspor lebih dari 3,5 miliar Dolar Amerika Serikat (AS). Jika dilihat dari hasil produksi, pada tahun 2011 produksi tuna dunia sebesar 6,8 juta ton dan pada tahun 2012 meningkat menjadi lebih dari 7 juta ton. Dari produksi tersebut Indonesia memasok lebih dari 16% produksi tuna dunia. Tuna juga diketahui memiliki permintaan konsumen yang cukup tinggi akibat mulai bergesernya selera konsumen dunia dari *red meat* ke *white meat*. Dengan potensi yang dimiliki dan peluang pasar yang besar, sehingga tidak mengherankan apabila sebagian besar produksi tuna Indonesia di ekspor ke beberapa negara tujuan seperti Jepang, Uni Eropa dan Amerika. Berbagai tanggapan muncul dengan adanya kebijakan moratoritum tersebut. Menurut Laoli (2015), dengan adanya kebijakan tersebut hendaknya lebih dapat dibedakan kapal eks asing yang memiliki ijin dan tidak karena jika semua kapal eks asing dilarang untuk menangkap maka dapat berpengaruh terhadap supply ikan dan penurunan volume ekspor.

Lebih lanjut Susant (2015) menyatakan bahwa kebijakan moratorium tersebut berimplikasi pada penurunan produksi ikan hasil tangkapan dari para pengusaha perikanan tetapi penurunan volume tersebut terkompensasi oleh naiknya harga ikan di pasar tujuan ekspor. Dari berbagai hal yang telah disebutkan di atas maka penelitian ini ingin menjawab bagaimana sebenarnya dampak kebijakan moratorium pasar tuna Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dampak kebijakan moratorium kapal eks asing terhadap kondisi pasar tuna Indonesia, terutama untuk membandingkan kondisi pasar ekspor tuna sebelum dan sesudah adanya kebijakan moratorium.

METODOLOGI

Kerangka Pemikiran

Penelitian ini akan lebih difokuskan dampak moratorium terhadap kondisi pasar tuna Indonesia khususnya ekspor karena hasil produksi tuna cukup banyak yang dijual ke mancanegara. Dengan adanya kebijakan moratorium ini diduga akan menyebabkan berkurangnya jumlah kapal eks asing yang melakukan kegiatan penangkapan sehingga berdampak terhadap nilai ekspor tuna Indonesia. Kerangka pemikiran dapat dilihat pada Gambar 1.

Waktu dan Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Jakarta dan Bali karena di lokasi tersebut merupakan salah satu daerah ekspor tuna terbesar dan jumlah kapal ex-asing yang ada di wilayah tersebut relatif banyak. Menurut data yang dikeluarkan oleh Ditjen Tangkap tercatat ada kapal eks asing sebanyak

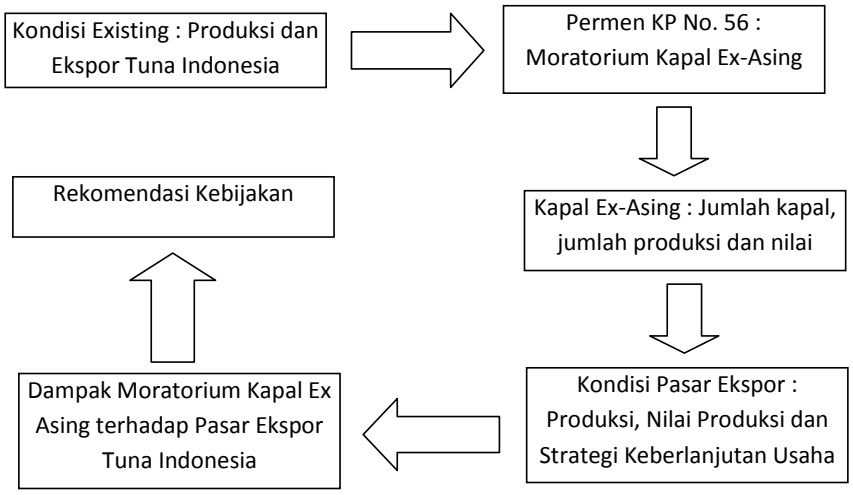
Kondisi Existing : Produksi dan Ekspor Tuna Indonesia
Permen KP No. 56 : Moratorium Kapal Ex-Asing
Kapal Ex-Asing : Jumlah kapal, jumlah produksi dan nilai
Kondisi Pasar Ekspor : Produksi, Nilai Produksi dan Strategi Keberlanjutan Usaha
Dampak Moratorium Kapal Ex Asing terhadap Pasar Ekspor Tuna Indonesia
Rekomendasi Kebijakan

Gambar 1. Kerangka Pemikiran Kegiatan Penelitian.
Figure 1. Framework of The Research.

107 unit dari 756 kapal yang terdapat di Benoa yang melakukan penangkapan tuna. Sedangkan lokasi Jakarta dipilih atas dasar Jakarta merupakan salah satu pelabuhan ekspor terbesar di Indonesia. Waktu penelitian dilakukan dari bulan April hingga bulan Mei 2015.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer berasal dari wawancara dengan pelaku usaha eksportir tuna. Data sekunder bersumber dari data produksi, pola pemasaran, dan ekspor perikanan. .Sumber data berasal dari Pelabuhan, Dinas KP di lokasi penelitian dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Metode Pengumpulan Data

Data-data yang digunakan dalam penelitian diperoleh melalui penelusuran pustaka (desk study) yang relevan dengan kegiatan penelitian dan survey lapang.

Metode Analisis Data

Data-data yang telah dikumpulkan kemudian ditabulasi dan dianalisis secara deskriptif dan disajikan dalam bentuk tabel dan grafik. Selanjutnya hasil analisis akan diinterpretasikan untuk menghasilkan informasi yang dapat menjawab tujuan dari penelitian.

GAMBARAN UMUM PRODUKSI TUNA INDONESIA

Sebelum adanya Peraturan Menteri No 56 tentang Moratorium Kapal Eks Asing, secara nasional produksi tuna mengalami peningkatan dari tahun 2002 hingga 2012 yaitu sebesar rata-rata 6,5% per tahun. Sedangkan volume ekspor tuna ke dunia pada tahun 2012 mencapai 533 ribu ton dengan nilai ekspor mencapai 116 juta USD. Tuna diekspor dalam bentuk segar, beku dan kaleng. Selama ini tuna dipasarkan dalam bentuk segar, beku dan kaleng dimana market share tuna segar ke Jepang 93%, AS 4% dan Uni Eropa 3%. Pasar tuna beku ke Jepang sebesar 50%, AS sebesar 32% dan Uni Eropa 17%. Pasar Ekspor tuna kaleng ke Uni Eropa 36%, Jepang 33% dan AS 31%. Hal ini menunjukkan bahwa Jepang merupakan negara tujuan ekspor utama tuna Indonesia.

Salah satu lokasi pendaratan tuna dominan terdapat di Provinsi Bali dimana di lokasi tersebut banyak terdapat alat tangkap longline. Provinsi Bali merupakan salah satu daerah penghasil tuna yang cukup besar, selain dari potensi perikanan tangkap yang dimiliki, tuna dari Bali juga berasal dari daerah Kawasan Timur Indonesia (KTI) yang dibawa oleh kapal-kapal besar untuk diolah atau diekspor ke negara tujuan melalu Provinsi Bali. Secara umum potensi perikanan tangkap laut provinsi Bali sebesar 147.278,75 ton per tahun. Jika dilihat pada tahun 2009 sampai dengan 2013, rata-rata pertumbuhan produksi perikanan tangkap sebesar 1,6%.

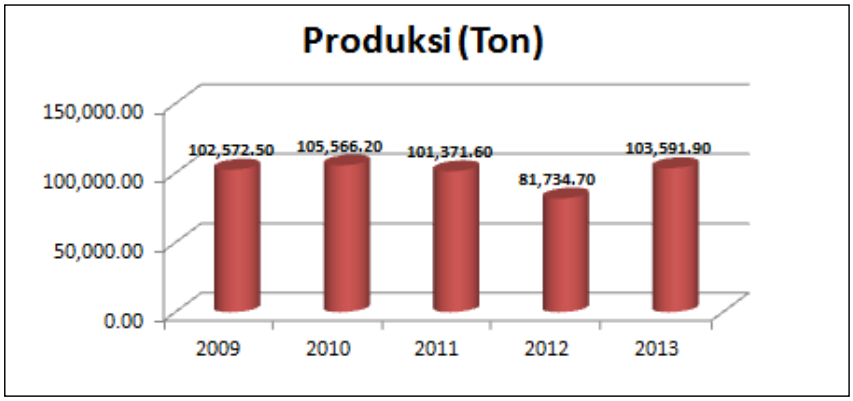

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali (2014)/
Source: Agency of Marine and Fisheries in Bali, 2014

Gambar 2. Produksi Perikanan Tangkap Provinsi Bali Tahun 2009-2013
Figure 2. Production of Marine Capture in Bali Province, 2009-2013

Pada tahun 2009 jumlah produksi perikanan tangkap sebesar Rp. 102.572,50 ton (Rp. 838 juta), tahun 2010 jumlah produksi sebesar Rp. 105.566,2 ton (Rp. 1 miliar), tahun 2011 jumlah produksi sebesar Rp. 101.371,6 ton (Rp. 1,4 miliar), tahun 2012 jumlah produksi sebesar 81.734,7 ton (Rp 1,2 miliar) dan tahun 2013 jumlah produksi sebesar 103.591,9 ton (Rp. 1,7 miliar). Produksi perikanan tangkap provinsi Bali tahun 2009-2013 dapat dilihat pada Gambar 2.

Jika dilihat volume produksi perikanan tangkap berdasarkan jenis komoditasnya yaitu Tuna Tongkol dan Cakalang (TCT), terlihat bahwa volume produksi pada tahun 2010-2012 mengalami peningkatan sebesar 34% seperti terlihat pada Tabel 2.

Jenis armada penangkapan tuna yang ada di Provinsi Bali mengalami penurunan sebesar 8% yaitu pada tahun 2010-2011, sedangkan pada tahun 2011-2012 tidak mengalami perubahan. Pada tahun 2010 total jumlah armada penangkapan ikan sebesar 893 unit sedangkan pada tahun 2010 dan 2012 masing-masing sebesar 813 unit, seperti yang terlihat pada Tabel 3.

Berdasarkan alat tangkap tuna yang digunakan, terlihat bahwa pada tahun 2010-2012 jumlah alat tangkap mengalami penurunan sebesar 26%. Pada Tabel 4 terlihat bahwa penurunan signifikan terjadi pada penggunaan alat tangkap pancing ulur (*handline*) dan pancing tonda.

Tabel 2. Volume Produksi Tuna Cakalang Tongkol (TCT) Pada Tahun 2010-2012 (Ton).
Table 2. Volume of Tuna Cakalang, Tongkol (TCT) Production, 2010-2012 (ton).

No.	Jenis Ikan/*Fish Type*	Tahun (ton)		
		2010	2011	2012
1	Tongkol Krai	730,4	580,6	14.227,0
2	Tongkol Komo	-	-	-
3	Cakalang/*Skipjack*	3.235,8	4.569,3	5.771,5
4	Albakora/*Albacore*	2.786,0	2.887,1	4.916,0
5	Manddihang/Yellowfin Tuna	6.483,3	3.366,3	3.566,2
6	Tuna sirip biru selatan/*Southern Bluefin Tuna*	1.418,9	1.334,8	824,0
7	Tuna Mata Besar/*Big eye tuna*	3.670,2	2.560,8	1.908,7
8	Tongkol abu-abu/*Longtail tuna*	252,7	913,2	254,1
	Total	**18.577,3**	**16.212,1**	**31.467,5**

Sumber : Laporan Statistik Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, 2013/
Source: Statistical Report of Marine and Fisheries Agency in Bali, 2013

Tabel 3. Jumlah Armada Penangkapan Tuna di Provinsi Bali Pada Tahun 2010-2012.
Table 3. Number of Fishing Boats of Tuna in Bali, 2010-2012.

No	Jenis Armada/*Vessel Type*	Tahun (unit)		
		2010	2011	2012
1	Motor Tempel/*outboard*	179	179	179
2	<10 GT	9	9	9
3	11-30 GT	178	178	178
4	31-50 GT	172	87	87
5	51-100 GT	176	176	176
6	>100 GT	179	184	184
	Total	**893**	**813**	**813**

Sumber : Laporan Statistik Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, 2013/
Source: Statistical Report of Marine and Fisheries Agency in Bali, 2013

Tabel 4. Jenis Alat Tangkap Tuna di Provinsi Bali Pada Tahun 2010-2012.
Table 4. Type of Fishing Gears of Tuna in Bali, 2010-2012.

No	Jenis Alat Tangkap/*Type of Fishing Gears*	Tahun (unit)		
		2010	2011	2012
1	Rawai tuna/*Longline*	545	530	706
2	Pancing ulur/*Handline*	3.177	907	990
3	Huhate/*Pole and line*	-	-	-
4	Pukat cincin/*Purse Seine*	-	19	20
5	Pancing tonda/*Troll line*	1.189	158	118
	Total	**4.911,0**	**1.614,0**	**1.834,0**

Sumber : Laporan Statistik Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, 2013/
Source: Statistical Report of Marine and Fisheries Agency in Bali, 2013

Produksi tuna dengan menggunakan alat tangkap longline pada triwulan I pada 2014 sebesar 9.566,68 ton dan pada triwulan I tahun 2015 sebesar 7.728,77 ton dengan kata lain produksi menurun sebesar 19,2%. Sedangkan volume ekspor tuna dari Bali pada triwulan I tahun 2014 sebesar 8.950,46 ton dan di triwulan I tahun 2015 sebesar 8.435,18 ton atau menurun sebesar 5,76%. Secara rinci komoditas tuna yang diekspor mengalami perubahan sebagai berikut : a) volume ekspor tuna segar berkurang sebesar 13%, tuna beku naik 99% & tuna kaleng turun sebesar 27%; 2) Nilai ekspor tuna segar naik 1%, tuna beku naik 123% dan tuna kaleng turun sebesar 24%; 3) Harga tuna segar naik sebesar 12%, tuna beku naik 21% dan tuna kaleng naik sebesar 5%. Penurunan volume produksi dan ekspor tuna di Bali tersebut disebabkan oleh kebijakan moratorium kapal eks-asing dan *transhipment*. Tujuan pasar ekspor tuna segar yang berasal dari Bali banyak yang dikirim ke Jepang, sedangkan tuna beku dan kaleng cenderung ke pasar Uni Eropa dan Amerika Serikat.

PASAR EKSPOR TUNA INDONESIA

Pasar Jepang

Konsumen Jepang memiliki tingkat konsumsi ikan yang tinggi, disamping itu mereka lebih menyukai ikan tuna dalam bentuk segar, biasanya ikan tuna dalam bentuk segar langsung diekspor melalui jalur udara. Biasaya tuna segar diekspor dalam bentuk *whole fresh tuna*. Secara nasional untuk pasar Jepang lebih banyak dieskpor produk *fresh tuna* dari Indonesia sedangkan untuk pasar USA dan Uni Eropa lebih banyak mengekspor *canned tuna* dari Indonesia. Pesaing utama Indonesia untuk ekspor tuna yaitu Vietnam dan Thailand. Berdasarkan perkembangan harga di kedua pasar USA dan Jepang, harga komoditas tuna Indonesia rata-rata hampir selalu lebih rendah dibandingkan dengan harga pesaingnya.

Menurut Rahadian *et al.,* (2012) harga komoditas tuna Indonesia di pasar Jepang pada tahun 2011 hanya menempati posisi keempat, di bawah Vietnam, Thailand dan Malaysia. Rendahnya harga tersebut dapat dilihat dari dua sisi yakni di satu sisi menjadi faktor penunjang bagi tingginya daya saing dan tingginya volume ekspor ke Jepang, akan tetapi di sisi lain juga menjadi indikator rendahnya penghargaan konsumen di Jepang atas komoditas tuna Indonesia.

Pasar AS

Permintaan tuna di AS memang relatif tinggi terutama untuk produk *frozen tuna* baik dalam bentuk tuna saku, loin maupun *tuna cube* dan *steak*. Selain itu Indonesia juga dikenal sebagai daerah penghasil ikan kaleng, produk *canned tuna* dari Indonesia juga memiliki pasar utama negara AS. Pasar AS biasanya lebih menyukai ikan kaleng dengan lebih banyak brain (garam) dan tanpa minyak, hal ini menjadi pertimbangan bagi pelaku usaha yang ingin memasarkan produknya ke AS. Standar dari FDA yang cukup ketat dalam penentuan produk makanan yang diekspor ke USA menyebabkan adanya hambatan *non tariff*. Hal ini sesuai dengan penelitian Rinto (2011) yang menyebutkan bahwa pada tahun 2010 tercatat 146 kasus penolakan ekspor produk perikanan Indonesia ke AS dimana sebanyak 64% kasus penolakan disebabkan oleh adanya bakteri pathogen maupun toksin yang dihasilkan seperti histamin, 26% disebabkan filthy, 6% disebabkan oleh adanya residu kimia, dan 4 % disebabkan oleh misbranding. Bila kasus penolakan ekspor ke pasar AS maka pengusaha banyak mengalihkan produk ekspornya ke pasar lainnya seperti pasar Thailand, hal tersebut dikarenakan hambatan *non tariff* bagi produk yang dihasilkan oleh perusahaan yang sudah terkena kasus tolakan ekspor yang tidak diperbolehkan lagi mengakses pasar AS. Harga tuna di USA yang relatif tinggi juga menjadi pertimbangan bagi pelaku usaha. Meskipun hambatan *non tariff* yang diberlakukan cukup rumit namun dengan harga tuna yang relatif lebih tinggi maka menjadi faktor penarik bagi pengusaha. Negara pesaing utama Indonesia di AS adalah produk ikan kaleng yang berasal dari Thailand dan Vietnam namun berdasarkan wawancara dengan pelaku usaha dapat diketahui bahwa dari sisi kualitas produk tuna Indonesia mampu bersaing dan bahkan dianggap lebih baik dari sisi citarasa dan kualitasnya dibandingkan tuna dari negara lainya.

Pasar Uni Eropa

Hambatan non tariff adalah hambatan yang biasa terdapat pada Pasar Uni Eropa terkait dengan produk tuna. Hal ini dikarenakan adanya kunci pokok regulasi yang ditetapkan oleh Komisi Eropa yang menitik beratkan pada perlindungan konsumen tingkat tinggi untuk standar mutu dan keamanan pangan Uni Eropa yaitu EC

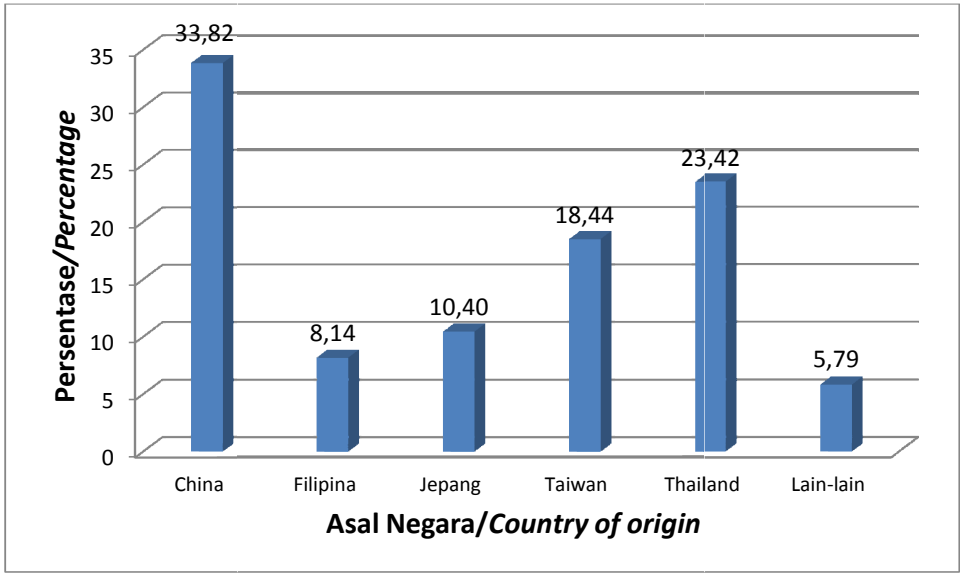

Sumber: Direktorat Jendral Perikanan Tangkap, KKP tahun 2015/
Source: Directorate General of Capture Fisheries, MMAF, 2015

Gambar 3. Kapal Eks-Asing berdasarkan Asal Negara
Figure 3. Ex-Foreign Ship Based On Countries of Origin

No.178/2002. Saat peraturan tersebut dikeluarkan, salah satu kebijakan yang cukup signifikan mempengaruhi perkembangan impor pangan Uni Eropa adalah diterapkannya *Rapid Alert System for Food and Feeds* (RASFF). Hal ini berdampak kepada peredaran produk negara eksportir di Uni Eropa. RASFF merupakan jejaring kerja dalam sistem siaga cepat untuk pemberitahuan resiko langsung atau tak langsung pada kesehatan manusia yang berasal dari bahan pangan atau pakan.

Hambatan tarif menjadi pertimbangan tersendiri, berdasarkan data P2HP, KKP tahun 20010-2012 yang telah diolah dapat diketahui bahwa untuk negara di Uni Eropa yang menjadi tujuan utama ekspor dari Indonesia adalah ke negara Jerman sebesar 32% dari total ekspor tuna dari Indonesia ke Uni Eropa, kemudian Spanyol 21%, United Kingdom 20%, dan sisanya adalah berbagai negara lainya. Uni Eropa yang terdiri dari banyak negara pada umumnya menjadi pangsa pasar yang strategis bagi produk tuna Indonesia, hal ini juga diimbangi dengan harga tuna yang relatif cukup tinggi pada pasar yang dimaksud. Kualitas produk Indonesia menurut data dari eksportir juga dapat bersaing dengan produk dari negara Filipina, Thailand dan China yang menjadi negara pesaing di Uni Eropa. Permintaan ekspor ke Uni Eropa biasanya dipenuhi oleh eksportir tuna di Indonesia melalui pengiriman dengan jalur laut, yaitu melalui kapal.

KONDISI KAPAL EX-ASING YANG BEROPERASI DI INDONESIA

Menurut data yang diperoleh dari Kementerian Kelautan dan Perikanan terdapat kapal buatan asing sebanyak ± 1100 kapal buatan asing atau mencapai 22,28% dari total 4.964 kapal pemegang izin penangkapan. Kapal eks-asing itu paling banyak berasal dari China, Thailand, Taiwan, Jepang dan Filipina. Hal ini menunjukkan bahwa kapal-kapal eks-asing banyak berasal dari wilayah Asia.

Berdasarkan data dan informasi dari Asosiasi Tuna Longline Indonesia (ATLI) terdapat kapal eks-asing sebanyak 122 kapal dari 45 perusahaan/ pemilik yang ada di Benoa, Denpasar. Kapal tersebut tidak lagi melaut karena terkena aturan Permen KP No 56.

DAMPAK MORATORIUM KAPAL EX-ASING TERHADAP KONDISI PASAR EKSPOR TUNA INDONESIA

Kebijakan moratorium kapal eks-asing yang telah diberlakukan sejak bulan November 2014 tentunya berdampak pada kondisi komoditas tuna Indonesia di pasar ekspor. Untuk melihat sejauh mana dampak kebijakan moratorium ini terhadap kondisi komoditas tuna Indonesia dipilih lokasi-lokasi penelitian yang dapat dijelaskan secara detail pada tabel-tabel di bawah ini.

Pada Tabel 5 menunjukan perkembangan volume dan nilai Ekspor Komoditas Tuna Indonesia tahun 2014 dimana jika dilihat berdasarkan volume nya untuk tuna segar pada bulan Januari, Februari dan Maret masing-masing mencapai 406.551 Kg, 311.767 Kg dan 496.679 Kg. Jika dilihat dari sisi nilainya pada bulan Januari mencapai US$ 2.416.648 namun pada bulan Februari terjadi penurunan sebesar US$ 1.963.763. selanjutnya pada bulan Maret terjadi kenaikan sebesar US$ 3.135.258. selanjutnya tuna beku pada bulan Januari sampai bulan Maret 2014 dilihat dari sisi volumenya terjadi kenaikan yang semula sebesar 473.611 Kgpada bulan Januari menjadi 487.934 Kg pada bulan Februari dan selanjutnya naik sebesar

Tabel 5. Perkembangan Volume dan Nilai Ekspor Komoditas Tuna di Pelabuhan Benoa, Tahun 2014
Table 5. Growth of Volume and Export Value Tuna in Port of Benoa, 2014

Jenis Olahan/ Tuna/*type of Processed Tuna*	2014					
	Januari/*January*		Februari/*February*		Maret/*March*	
	Volume/ *volume* (kg)	Nilai/*Value* (Rp)	Volume/ *volume* (kg)	Nilai/*Value* (Rp)	Volume/ *Volume*	Nilai/*Value* (Rp)
Tuna Segar/ *Fresh Tuna*	406.551	2.416.648	311.767	1.963.763	496.679	3.135.258
Tuna Beku/ *Frozen Tuna*	473.611	2.267.524	487.934	2.107.512	648.297	2.105.885
Tuna Kaleng/ *Canned Tuna*	-	-	202.835	745.162	238.412	975.980

Sumber : data diolah/*Processed data (2015)*

Tabel 6. Perkembangan Volume dan Nilai Ekspor Ikan Tuna di Pelabuhan Benoa, Tahun 2015.
Table 6. Growth of Volume and Export Value Tuna in Port of Benoa, 2015.

Jenis Olahan Tuna/*type of Processed Tuna*	2014					
	Januari/*January*		Februari/*February*		Maret/*March*	
	Volume/ *volume* (kg)	Nilai/*Value* (Rp)	Volume/ *volume* (kg)	Nilai/*Value* (Rp)	Volume/ *Volume*	Nilai/*Value* (Rp)
Tuna Segar/ Fresh Tuna	286.915	1.857.476	396.567	3.289.009	312.171	1.853.940
Tuna Beku/ Frozen Tuna	999.764	3.630.840	1.338.251	6.656.400	718.542	4.039.741
Tuna Kaleng/ Canned Tuna	33.731	150.486	82.505	343.182	187.365	788.962

Sumber : data diolah/*Processed data (2015)*

646.297 Kg pada bulan Maret 2014. Namun pada sisi nilai sama halnya dengan tuna segar dimana terjadi fluktuasi nilai pada bulan januari sebesar US$ 2.267.524 menjadi US$ 2.107.512 pada bulan Februari dan bulan Maret menjadi US$ 2.105.885. pada tuna kaleng bulan Januari tidak terjadi ekspor tuna kaleng, namun pada bulan Februari dan Maret ekspor tuna kaleng terjadi kenaikan baik dari sisi volume dan nilai yaitu masing-masing untuk volume 202.835 Kg bulan februari menjadi 238.412 Kg. Sedangkan untuk nilainya semula sebesar US$ 745.162 mencapai US$ 975.980 (Tabel 6).

Pada Tabel 6 menunjukan perkembangan volume dan nilai Ekspor Komoditas Tuna Indonesia taahun 2015 dimana jika dilihat berdasarkan volume nya untuk tuna segar pada bulan Januari, Februari dan Maret masing-masing mencapai 286.915 Kg, 396.567 Kg dan 312.171 Kg. Jika dilihat dari sisi nilainya pada bulan Januari mencapai US$ 1.857.476 namun pada bulan Februari terjadi kenaikan sebesar US$ 3.289.009. selanjutnya pada bulan Maret terjadi penurunan sebesar US$ 1.853.940. selanjutnya tuna beku pada bulan Januari sampai bulan Maret 2014 dilihat dari sisi volumenya terjadi kenaikan yang semula sebesar 999.764 Kg pada bulan Januari menjadi 1.338.251 Kg pada bulan Februari dan selanjutnya naik sebesar 718.542 Kg pada bulan Maret 2014. Namun pada sisi nilai sama halnya dengan tuna segar dimana terjadi fluktuasi nilai pada bulan januari sebesar US$ 3.630.840 menjadi US$ 6.656.400 pada bulan Februari dan bulan Maret menjadi US$ 4.039.741. pada tuna kaleng bulan Januari sebesar 33.731 Kg tuna kaleng, bulan Februari dan Maret ekspor tuna kaleng terjadi kenaikan baik dari sisi volume dan nilai yaitu masing-masing untuk volume 82.505 Kg bulan februari menjadi 187.365 Kg. Sedangkan untuk nilainya semula sebesar US$ 150.486 mencapai US$ 343.182 pada bulan Februari dan US$ 788.962. Selanjutnya dengan melihat perkembangan volume dan nilai komoditas tuna Indonesia di pasar ekspor dapat dilihat perubahannya pada masing-masing jenis tuna (baik tuna segar, tuna beku dan tuna kaleng) dengan membandingkan kedua jenis tuna tersebut di bulan Januari, Februari dan Maret pada tahun 2014 dan bulan yang sama tahun 2015 seperti dijelaskan pada Tabel 7.

Tabel 7. Perubahan Volume dan Nilai Komoditas Tuna Indonesia di Pasar Ekspor.
Table 7. Volume and Value Export of Tuna in International Market.

Jenis Olahan Tuna/ *Processed Tuna*	Perubahan Harga/*Price Fluctuation* (%)						Rata-rata/ *Average* (%)	
	Jan		Feb		Mar			
	Vol	Nilai	Vol	Nilai	Vol	Nilai	Vol	Nilai
Tuna Segar/ *Fresh Tuna*	(29)	(23)	27	67	(37)	(41)	(13)	1
Tuna Beku/ *Frozen Tuna*	111	60	174	216	11	92	99	123
Tuna Kaleng/ *Canned Tuna*	-	-	(59)	(54)	(21)	(19)	(27)	(24)

Sumber : data diolah/*Processed data (2015)*

Tabel 7 menunjukan bahwa secara rata-rata pada triwulan pertama (bulan januari sampai Maret) volume ikan tuna segar mengalami penurunan untuk tuna segar mengalami penurunan sebesar 13% sedangkan nilainya mengalami kenaikan sebesar 1%. Jika dilihat per bulan untuk tuna segar di bulan Januari mengalami penurunan volume dan nilai masing-masing sebesar 29% dan 23%. Di bulan Februari terjadi kenaikan baik sisi volume dan nilai masing-masing sebesar 27% dan 67%, akan tetapi di bulan maret terjadi penurunan volume dan nilai tuna segar masing-masing sebesar 37% dan 41%. Pada tuna beku secara rata-rata baik volume dan nilai terjadi kenaikan sebesar 99% dan 123%. Jika dilihat secara rinci per bulannya (Januari sampai Maret pada tahun 2014 dan 2015 terlihat baik secara volume dan nilai tuna beku terjadi kenaikan sebesar 111% (sisi volume) dan 60% (sisi nilai). Pada bulan Februari pun terjadi kenaikan volume sebesar 174% dan nilai sebesar 216%. Di bulan Maret terjadi kenaikan sebesar 11% untuk volume dan 92% untuk nilai. Tuna kaleng secara rata-rata terjadi penurunan volume sebesar 27% dan nilai sebesar 24%. Secara rinci tuna kaleng bulan Februari terjadi penurunan volume dan nilai masing-masing sebesar 59% dan 54%, sedangkan di bulan Maret terjadi penurunan sebesar 21% dan 19%. Selain melihat perubahan yang terjadi pada sisi volume dan nilai komoditas tuna Indonesia di pasar ekspor, juga melihat perubahan harga komoditas berdasarkan jenis tuna yang di ekspor (segar, beku dan kaleng)seperti dijelaskan pada Tabel 8.

Tabel 8. Perubahan Harga Komoditas Tuna Indonesia di Pasar Ekspor, tahun 2014-2015.
Table 8. Price Fluctuation of Tuna in International Market, 2014-2015.

Jenis Olahan Tuna/*type Processed Tuna*	Perubahan Harga/*Price Fluctuation* (%)			
	Januari/*January*	Februari/*February*	Maret/*March*	Rata-rata/ *Average* (%)
Tuna Segar/ *Fresh Tuna*	8,911207	31,670885	-5,91803	11,55468675
Tuna Beku/ *Frozen Tuna*	-24,1459	15,157729	73,07756	21,36312329
Tuna Kaleng/ *Canned Tuna*	0	13,223462	2,862136	5,361866046

Sumber : data diolah/*Processed data (2015)*

Tabel di atas menunjukan perubahan harga komoditas tuna Indonesia di pasar ekspor. Perubahan harga ini dilihat berdasarkan jenis tuna (segar, beku dan kaleng). Secara rinci rata-rata perubahan harga untuk tuna segar dimana mengalami kenaikan sebesar 11,55%, tuna beku sebesar 21,36% dan tuna kaleng sebesar 5,36%. Jika dilihat secara rinci perubahan harga komoditas tuna segar pada bulan Januari terjadi kenaikan sebesar 8,91%, bulan Februari sebesar 31,67%, akan tetapi pada bulan Maret mengalami penurunan harga sebesar -5,92%. Perbandingan Tuna beku pada tahun 2014 dan tahun 2015 pada bulan Januari mengalami penurunan sebesar -24,14%, akan tetapi pada bulan Februari dan Maret masing-masing terjadi kenaikan sebesar 15,16% dan 73,08%. Tuna kaleng pad bulan Januari tidak mengalami perubahan namun pada bulan Februari terjadi kenaikan sebesar 13,22% dan 2,8% kenaikan pada bulan Maret.

PENUTUP

Tuna merupakan salah satu komoditas penting pasar ekspor Indonesia. Tuna yang diekspor dalam bentuk tuna segar, beku dan kaleng. Tujuan ekspornya ke Jepang, Amerika Serikat, dan Uni Eropa. *Market share* dari tuna segar ke Jepang 93%, AS 4% dan Uni Eropa 3%. Pasar tuna beku ke Jepang sebesar 50%, AS sebesar 32% dan Uni Eropa 17%. Pasar Ekspor tuna kaleng ke Uni Eropa 36%, Jepang 33% dan AS 31%.

Kebijakan moratorium kapal ex-asing memberikan dampak terhadap kondisi pasar tuna, di Benoa, Bali. Bila dibandingkan antara triwulan pertama tahun 2014 (sebelum moratorium) dan 2015 (saat moratorium) terjadi fenomena sebagai berikut : 1) berkurangnya volume ekspor tuna segar sebesar 13%, tuna beku naik 99% & tuna kaleng turun sebesar 27%; 2) Nilai ekspor tuna segar naik 1%, tuna beku naik 123% dan tuna kaleng turun sebesar 24%; 3) Harga tuna segar naik sebesar 12%, tuna beku naik 21% dan tuna kaleng naik sebesar 5%.

Penurunan volume ikan tuna segar tersebut karena banyak kapal ex asing yang tidak melaut. Terdapat 122 kapal longline eks-asing yang tidak melaut dari 533 kapal yang ada. Selain itu adanya kebijakan transhipment juga menyebabkan tidak bisa menghasilkan ikan tuna segar secara optimal karena ekspor ikan tuna segar ke Jepang dibutuhkan waktu selama 14 hari sehingga ikan lebih banyak diproduksi dalam bentuk beku.

Tuna merupakan salah satu komoditas penting pasar ekspor Indonesia. Tuna yang diekspor dalam bentuk tuna segar, beku dan kaleng. Tujuan ekspornya ke Jepang, Amerika Serikat, dan Uni Eropa. *Market share* dari tuna segar ke Jepang 93%, AS 4% dan Uni Eropa 3%. Pasar tuna beku ke Jepang sebesar 50%, AS sebesar 32% dan Uni Eropa 17%. Pasar Ekspor tuna kaleng ke Uni Eropa 36%, Jepang 33% dan AS 31%.

Kebijakan moratorium kapal ex-asing memberikan dampak terhadap kondisi pasar tuna, di Benoa, Bali. Bila dibandingkan antara triwulan pertama tahun 2014 (sebelum moratorium) dan 2015 (saat moratorium) terjadi fenomena sebagai berikut : 1) berkurangnya volume ekspor tuna segar sebesar 13%, tuna beku naik 99% & tuna kaleng turun sebesar 27%; 2) Nilai ekspor tuna segar naik 1%, tuna beku naik 123% dan tuna kaleng turun sebesar 24%; 3) Harga tuna segar naik sebesar 12%, tuna beku naik 21% dan tuna kaleng naik sebesar 5%.

Penurunan volume ikan tuna segar tersebut karena banyak kapal ex asing yang tidak melaut. Terdapat 122 kapal longline eks-asing yang tidak melaut dari 533 kapal yang ada. Selain itu adanya kebijakan transhipment juga menyebabkan tidak bisa menghasilkan ikan tuna segar secara optimal karena ekspor ikan tuna segar ke Jepang dibutuhkan waktu selama 14 hari sehingga ikan lebih banyak diproduksi dalam bentuk beku.

Menurut informasi dari eksportir ikan tuna segar yang memiliki kapal penangkap, eskpor ikan tuna segar akan tetap menguntungkan jika jumlah ekspor ikan tuna segar sebesar ≥ 70% dari jumlah total ikan tuna tangkapan. Dengan adanya kebijakan transhipment ini menyebabkan jumlah ikan segar berkurang dan eksportir akan merugi.

Penurunan volume produksi yang dapat berdampak pada penurunan volume ekspor hendaknya harus diimbangi dengan adanya peningkatan harga ekspor sehingga nilai ekspor tidak mengalami penurunan. Jika terjadi penurunan makan dapat berdampak pada penerimaan devisa negara yang secara makro dapat menyebabkan penurunan kontribusi PDB dari sektor perikanan. Sebaiknya kebijakan moratorium kapal eks-asing sebaiknya melihat kondisi wilayah penangkapan yang memiliki resiko terjadinya illegal fishing. Pada umumnya nelayan Benoa melakukan penangkapan di WPP 573 sehingga untuk mengekspor ikan secara langsung ke negara lain seperti Jepang melalui *transhipment* akan sangat sulit. Hal ini berbeda dengan wilayah Bitung yang berdekatan dengan General Santos, Filipina.

DAFTAR PUSTAKA

Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP). 2014. Statistik Ekspor Komoditas Perikanan Indonesia 2013. Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Kurniawan, A. 2014. Susi Usul Subsidi untuk Kapal Besar Dihapuskan. http://www.indopos.co.id/2014/11/susi-usul-subsidi-untuk-kapal-besar-dihapuskan.html.

Laoli, N. 2015. Ekspor Tuna Pengusaha Tuna Siap Ekspor. http://industri.kontan.co.id/news/pengusaha-tuna-siap-ekspor

Nurhayat, W. 2014. 2014. Menteri Susi: Kerugian Akibat Illegal Fishing Rp 240 Triliun.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 56/Permen-KP/2014 tentang Penghentian Sementara (Moratorium) Perizinan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Rinto. 2011. Kajian Penolakan Ekspor Produk Perikanan Indonesia ke Amerika Serikat. Seminar Nasional Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan III. Jakarta, 26 juli 2011

Sularso, A. 2015. Implikasi Moratorium Kapal Eks Asing. http://ajisularso.com/implikasi-moratorium-kapal-ikan-eks-asing/.

Susanto, I. 2015. Tuna Indonesia Dihargai Lebih Tinggi. http://www.koran-sindo.com/read/973227/150/tuna-indonesia-dihargai-lebih-tinggi-1425693969

(Indeks Pengarang)
(Author Index)

Apriliani, Tenny ..... 71 - 82, 137 - 146

Eliata Sallata, Alfiani ..... 83 - 87

Hikmayani, Yayan ..... 101 - 112

Kohar Mudzakir, Abdul ..... 89 - 100

Kukuh Febrianto, Reza ..... 89 - 100

Muhartono, Rizky ..... 101 - 112

Mulyawan, Irwan ..... 129 - 136

Nur Priyatna, Fatriyandi ..... 129 - 136

Nurlailii ..... 101 - 112

Putera Hari Anggara, Fachruddin ..... 83 - 87

Rahadian, Rikrik ..... 101 - 112

Rosyid, Abdul ..... 89 - 100

Saptanto, Subhechanis ..... 137 - 146

Satria, Arif ..... 113 - 128

Tri Harpin Pranata, Rici ..... 113 - 128

Yulia Arthatiani, Freshty ..... 71 - 82, 137 - 146

Yusuf, Risna ..... 137 - 146

Zamroni, Achmad ..... 137 - 146

JURNAL KEBIJAKAN SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN

Pedoman Bagi Penulis

NASKAH
Redaksi hanya menerima naskah yang belum pernah dipublikasikan dan tidak dalam proses penerbitan pada publikasi lain. Misi publikasi ini adalah membahas isu aktual kebijakan kelautan dan perikanan dalam bentuk gagasan, dialog maupun polemik. Sesuai dengan misi tersebut, maka naskah harus mengandung pembahasan tentang isu analisis kebijakan kelautan dan perikanan yang aktual.

BENTUK NASKAH

Susunan naskah relatif bebas, namun harus memuat permasalahan, pendekatan yang digunakan dalam analisis masalah, pemecahan isu kebijakan dan penutup, Naskah diketik dengan menggunakan huruf Calibri, 12pt dan 1,5 spasi.

PENUTUP
Menyajikan sinopsis naskah dengan menampilkan opsi kebijakan untuk memecahkan masalah tematik atau isu kebijakan yang ada. Kebijakan yang ditawarkan perlu dikomplementasikan dengan kebijakan pendukung lintas sektoral dan koordinasi institusi terkait dalam implementasinya.

PENYERAHAN NASKAH
Naskah diserahkan ke Redaksi Pelaksana.

BAHASA
Naskah ditulis dalam bahasa Indonesia.

JUDUL NASKAH
Judul naskah dalam bahasa Indonesia dan Inggris.

ABSTRAK
Setiap naskah dilengkapi abstrak yang terdiri dari dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan Inggris terdiri dari 250 kata.

KATA KUNCI
Pemilihan kata kunci mengacu pada description yang tercantum dalam AGROVOC. Apabila istilah yang dipilih tidak terdapat dalam AGROVOC, maka thesaurus lain atau kamus istilah dapat dipakai sebagai rujukan.

TABEL
Tabel data mencantumkan teks isi, tahun dan sumber data (dalam bahasa Indonesia dan Inggris).

GAMBAR DAN GRAFIK
Gambar dan grafik harus dicetak tebal sehingga memungkinkan diperkecil antara 50 sampai 60% dari teks asli. Judul gambar dan grafik diletakan di bawah tanpa mempengaruhi bagian gambar dan grafik (dalam bahasa Indonesia dan Inggris).

SATUAN PENGUKURAN
Satuan pengukuran dalam teks, grafik dan gambar memakai sistem metrik, misalnya cm, ton, ha.

REFERENSI
Referensi ditulis dalam bentuk catatan kaki atau pada halaman daftar pustaka yang disusun dengan urutan nama pengarang, tahun terbit, judul tulisan, nama majalah dan penerbit.

BALAI BESAR PENELITIAN SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN
Gedung Balitbang KP LT. 3
Jalan Pasir Putih Nomor 1 Ancol Timur, Jakarta Utara
Telp. (021) 6471 1583, Faks.(021) 64700924
Web : www.bbrse.kkp.go.id
www.bbrse.net
email : pt.sosek@gmail.com

ISSN **2089-6980**